

# KAUM MUDA DAN BUDAYA DEMOKRASI

Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014



Direktorat  
Budayaan

# KAUM MUDA DAN BUDAYA DEMOKRASI

Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014

30.4  
KAU  
K





# **KAUM MUDA**

## **DAN BUDAYA DEMOKRASI**

### **Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014**

Penulis: Arini Ayatika Sadariskar, dkk.  
Editor: M. Alie Humaedi dan Lukman Solihin  
Pengantar: Hurip Danu Ismadi



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KAUM MUDA

## DAN BUDAYA DEMOKRASI

Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014



*Kaum Muda dan Budaya Demokrasi:*  
*Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014*  
© Penulis, 2014

Editor | M. Alie Humaedi dan Lukman Solihin  
Penulis | Arini Ayatika Sadariskar, dkk.  
Desain Sampul dan Isi | Genardi Atmadiredja  
Pemeriksa Aksara | Adi Winarto dan Indah Pratiwi

Cetakan 2014

Diterbitkan oleh:



Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan  
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung E Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan,  
Jakarta 12041  
Telp. (021) 5725573  
Fax. (021) 5725543

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
M. Alie Humaedi dan Lukman Solihin (Editor).  
Kaum Muda dan Budaya Demokrasi: Bunga Rampai Lomba Esai  
Sosial Budaya Nasional 2014  
Cetakan I, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta.  
xxvi + 163; 14 x 20.8 cm  
ISBN 978-602-72093-1-2

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

# KATA PENGANTAR

**Hurip Danu Ismadi**

Kepala Puslitbang Kebudayaan

**S**yukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya buku *Kaum Muda dan Budaya Demokrasi: Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014* ini. Buku ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Lomba Esai Sosial Budaya Nasional tahun 2014. Penerbitan buku hasil lomba ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pemikiran kaum muda, yaitu anak SMA/ sederajat yang menjadi peserta lomba ini, sekaligus untuk mengapresiasi pemikiran mereka, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat pembaca.

“Kaum Muda dan Budaya Demokrasi” yang menjadi topik lomba esai tahun ini merupakan tema yang tepat berkenaan dengan pesta politik di tahun 2014. Melalui tema ini Puslitbang Kebudayaan mengajak para siswa tidak hanya aktif untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berusaha mengajak mereka melihat realitas politik Indonesia kontemporer dan mengkritisnya. Dari sinilah kami berharap tumbuh generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu terkini yang menyangkut perkembangan bangsanya.

Lomba esai sendiri diadakan oleh Puslitbang Kebudayaan sebagai upaya untuk mendorong mereka menyenangi dunia tulis-menulis, sehingga mereka terpacu untuk memikirkan, mengkritisi, dan menuangkan gagasannya melalui media tulisan. Lomba esai seperti ini penting sebagai upaya untuk menyokong terbentuknya budaya literer di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda. Dengan begitu, cita-cita untuk membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif, dan inovatif dapat segera terwujud.

Dari dua kali penyelenggaraan lomba, yakni di tahun 2013 dan 2014, terlihat antusiasme peserta yang sangat tinggi, dibuktikan dengan jumlah esai yang dikirim di setiap lomba mencapai lebih dari seribu naskah dari seluruh Indonesia. Meluasnya jaringan internet rupanya ikut andil dalam meluaskan informasi mengenai lomba ini, serta

menyediakan kemudahan tersendiri bagi mereka untuk mengirimkan naskah. Terlepas dari itu, animo ini tentu cukup membanggakan dan merupakan potensi besar bagi masa depan Indonesia, karena banyak pemuda yang peduli dan mau memikirkan masa depan bangsanya.

Selain menyelenggarakan lomba, di tahun 2014 ini Puslitbang Kebudayaan juga mengadakan pelatihan menulis esai untuk siswa tingkat SMA/ sederajat di Yogyakarta. Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan mutu penulisan esai, baik dari tataran konsep maupun praktik penulisan, sehingga mereka memiliki bekal untuk menyampaikan gagasan yang runtut secara tertulis.

Penyelenggaraan lomba esai ini tentu tak akan berhasil tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu Puslitbang Kebudayaan menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyelenggaraan lomba, hingga tindak lanjutnya berupa penerbitan buku ini. Mereka antara lain Dewan Juri lomba ini: S. Dloyana Kusumah (Peneliti Puslitbang Kebudayaan), Dr. M. Alie Humaedi (Peneliti PMB-LIPI), Putu Fajar Arcana (Redaktur Budaya *Kompas*), Setiawati Intan Savitri (Forum Lingkar Pena), Dr. Donny Gahril Adian (Universitas Indonesia), dan Damhuri Muhammad (Redaktur Budaya *Media Indonesia*). Untuk penyelenggaraan pelatihan menulis esai, Puslitbang Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, antara lain Tarli Nugroho, Khidir Marsanto P., dan Zen Rahmat Sugito. Panitia lomba ini juga patut diapresiasi, karena telah bekerja keras menyelenggarakan, menyeleksi, dan menerbitkannya menjadi buku. Mereka antara lain Lukman Solihin, Ais Irmawati, Mila Puspitasari, Irawan Santoso Suryo Basuki, Mikka Wildha, Unggul Sudrajat, Budiana Setiawan, Ihya Ulumuddin, Romeyn Perdana, dan Damardjati Kun Mardjanto.

Kami berupaya agar lomba esai ini menjadi program rutin, sehingga dapat menjadi barometer pemikiran kaum muda perihal isu-isu sosial budaya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menuangkan gagasan melalui tulisan. Sebab seperti pepatah Latin, “*verba volant scripta manent*” (yang terucap terbang bersama angin, yang tertulis abadi).

Selamat membaca!

# MENYEMAI BUDAYA DEMOKRASI YANG BERMARTABAT

**M. Alie Humaedi**

Peneliti Kajian Budaya  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Maumere NTT, 9 April 2014.**

Pukul 6 pagi, menjelang Pileg, di Transito, tempat para pengungsi gunung Rokatenda menetap, telah sepi. Mereka pergi dengan menggunakan truk dan bus yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Para relawan bencana dari gereja dan lembaga kemanusiaan pun ikut mengkoordinir perjalanan para pengungsi itu ke tempat pencoblosan. Di Watumeriah, 32 km dari Transito, mereka pun berkumpul sesuai asal kampungnya. Setiap orang mendaftarkan diri ke PPS, untuk antri dipanggil.

Jelang pukul 08.00, ketika matahari mulai terik, beberapa orang “bergentayangan” memasuki kelompok-kelompok massa pengungsi itu. Terlihat amplop-amplop

berisi uang Rp. 20.000 diselip-selipkan mereka ke saku atau tas para pengungsi yang terlihat amat sederhana, sambil berujar dan menyebut nama seseorang Caleg dari kabupaten dan provinsi. Tidak hanya ke calon pencoblos, mereka pun berbisik-bisik ke beberapa orang PPS.

Matahari semakin terik, setiap orang yang akan masuk diarahkan coblosannya, dan ketika mereka keluar dari tempat pemilihan suara pun dikonfirmasi ulang siapa yang dicoblosnya. Beberapa PPS setempat pun akhirnya mengundurkan diri saat itu juga, ketika pihak pengamat dari Lembaga Nasional dan Badan Internasional memergoki mereka melakukan kecurangan, baik melalui pencoblosan kartu suara ataupun intimidasi terhadap calon pencoblos.

Untung saja, saat penghitungan suara, suara para pencoblos di TPS 23 Watumeriah itu benar-benar menyebar ke banyak calon, tidak ada pemenang mutlak yang memperoleh suara di atas 100. Hal ini terjadi, karena sebagian besar para calon legislatif itu mengirimkan “orang-orang bergentayangan” untuk dapat mempengaruhi orang terhadap pilihannya. Mereka bersaing dalam memberikan uang saku, tetapi pada akhirnya tidak memperoleh apapun karena banyaknya ketersebaran itu. Sehari kemudian diberitakan bahwa sulit sekali untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sikka, walaupun setiap kursi hanya dihargai dengan 800 suara saja.

(M. Alie Humaedi. 2014.

*Perisai Rokatenda: Ketahanan Para Penyintas*. Jakarta: HFI)

Dalam banyak pemberitaan, fenomena seperti di atas tidak hanya terjadi pada kelompok pengungsi Rokatenda di wilayah Nusa Tenggara Timur saja. Banyak kasus politik uang membelit partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif (Pileg), dan bahkan Pilpres sekalipun. Barangkali ada konsepsi, bahwa para pengungsi yang hidup dalam keterbatasan akibat meninggalkan tanah kelahirannya di Pulau Palue, akan mudah diarahkan untuk memilih calon tertentu, yaitu si pemberi uangnya. Padahal, uang yang diberikan benar-benar berjumlah kecil atau bahkan sangat kecil, baik di mata orang Indonesia pada umumnya ataupun orang NTT pada khususnya. Para Caleg yang seharusnya mengarahkan diri sebagai

pionir-pionir demokrasi malah berlaku sebaliknya, yaitu menjadi para agen yang menjungkirbalikkan norma-norma dalam budaya demokrasi yang seyogianya mengedepankan kebebasan memilih tanpa tekanan dan iming-iming.

Secara dasariah, fenomena politik uang dalam budaya demokrasi ini terjadi karena dua motif, yaitu motif kekuasaan dan motif eksistensi diri. Motif kekuasaan didasarkan pada upaya memperoleh pekerjaan, jabatan, dan aksesibilitas terhadap sumber-sumber daya yang memutar roda kehidupan diri, keluarga, kelompok, dan partainya. Para pemangku motif ini kebanyakan berasal dari kelompok pragmatisme, kutu loncat (*opportunist*), dan barangkali mereka yang serakah. Sementara motif eksistensi diri lebih didasarkan pada pilihan pribadi untuk menyatakan dan mempertahankan diri, serta memasuki status sosial elite yang mampu menghegemoni alam pikiran kelompok-kelompok massa. Secara abstrak, menghegemoni berarti menundukkan, dan akhirnya dapat memuaskan para pelaku pemegang kuasanya. Para pemangku kelompok ini kebanyakan berasal dari kelompok elite tradisional seperti tokoh-tokoh agama, spiritual, adat dan tradisi, dan lainnya; ataupun dari kelompok elite baru yang berasal dari kaum berpendidikan modern yang memiliki kesadaran nasional dan kebangsaan. Mereka sebenarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan pembaharuan sosial ekonomi (Van Niel, 1984).

Kelompok dengan motif eksistensi diri pada awalnya akan memperjuangkan politik sebagai sarana untuk ikut serta memperbaiki negeri dan menyejahterakan warga negara. Namun, ketika kolaborasi bersama dilakukan pada mesin politik yang mengenal konspirasi dan nominalisasi uang, maka pelaku dari motif eksistensi diri pun kemudian hanya menjadikan politik semacam adegan dari sebuah *screen* kehidupannya saja. Sebuah adegan, baik dalam sifat “hadap wajah” ataupun “belakang wajah”, merupakan perilaku yang diskenariokan dalam sebuah kepentingan. Rangkaannya seperti yang dinyatakan oleh Baudrillard (1992) tentang *simulacra*, yaitu suatu arena permainan teatrikal yang menunjukkan para aktor memainkan perannya, sebagai antagonis, protagonis dan penengah yang sekadar

menggembirakan dan memberikan janji dan mimpi-mimpi indah para penontonnya. Oleh karena itu, adagium dunia politik bahwa “tidak ada kawan sejati dan musuh sejati, yang ada hanyalah kepentingan” sesungguhnya merupakan simbolisasi dari motif eksistensi diri seperti ini. Para politisi di era tahun 1950-an selalu menyebutnya dengan kata-kata “sepandai-pandainya *siyasa*h”. Kata-kata ini merujuk makna “saling tipu, saling siasat, saling mencurigai, dan saling berkolaborasi” antara satu dengan lainnya, walaupun di dalamnya akan sarat dengan argumentasi dan analogi-analogi. Politik, dengan segala motifnya, pada akhirnya adalah dunia kepura-puraan.

Di sisi lain, kepura-puraan pada setiap pelaku politik, sesungguhnya adalah kemampuan beradaptasi, atau kemampuan untuk menyesuaikan diri. Pengertiannya adalah memahami kepentingan diri di tengah kepentingan pihak lain, dan sebaliknya, mengerti kepentingan orang atau pihak lain, sehingga seseorang dapat memosisikan kepentingannya. Oleh karena itulah, politik adalah sarana mencitra-gambarkan dan memoles tampilan luar, agar sesuai dengan keadaan di luar dirinya. Bahkan, kadangkala seseorang atau sekelompok orang pun dapat menipu eksistensi dirinya, demi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Sekalipun harus mengorbankan martabat dirinya untuk menghindari politik uang. Bagi sebagian yang lain, ada warga negara yang lebih memilih untuk keluar dari kepura-puraan itu, dan tidak mau terlibat dalam tontotan, baik yang mendukung peran protagonis, antagonis, ataupun penengah dari lakon yang ada. Mereka sangat muak terhadap adegan “basabasi” yang ada, dan kemudian lebih memilih untuk keluar dari zona *simulacra* itu. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok golput (golongan putih).

Kehadiran mereka beserta “pilihan untuk tidak memilih” aliran dan partai politik apapun pada iklim demokratisasi terbuka seperti ini akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang cukup seru. Satu pihak menyatakan bahwa “pilihan untuk tidak memilih” sesungguhnya menjauhkan para pemilihnya dari “kewajiban warga negara” untuk menjaga dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumentasinya, dengan terlibat dalam pemilihan umum legislatif

(Pileg) ataupun pemilihan kepala negara dan daerah (Pilpres, Pilkada, dsb), berarti ia ikut meletakkan dasar-dasar keberlanjutan kepemimpinan nasional dan daerah. Argumentasi ini dikuatkan dengan dasar-dasar normatif bahwa mengangkat pemimpin dan wakil rakyat yang sekalipun buruk kualitasnya lebih baik dibandingkan tidak adanya pemimpin. Ketiadaan keduanya akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dalam arti luas. Negara atau daerah itu akan tercabik-cabik oleh “perang saudara” dan konflik kekuasaan tiada henti.

Sementara pihak yang mendukung kelompok golput ini didasarkan pada prinsip demokratisasi bahwa memilih adalah bagian penting dari hak asasi manusianya. Asas ini mengaraskan bahwa pilihannya untuk tidak memilih juga dilindungi oleh suatu nilai yang paling mendasar dari manusia, yang mampu mengalahkan undang-undang dasar sekalipun. Selain aras tentang hak asasi manusia ini, kelompok golput sesungguhnya lebih “memilih untuk tidak memilih” lebih didasarkan pada kemaukkan atas ingar-bingar dunia politik beserta para pelakunya yang menurut anggapan mereka tidak lagi mengenal etika kehidupan berbangsa. Mereka melihat bahwa aliran dan partai politik yang dipegang dan didukung oleh siapapun berdekatan dengan aliran “uang haram” ataupun “utang najis” akibat rente modal yang dikeluarkan saat kampanye mengumpulkan pundi suara. Uang seolah menjadi segalanya, seperti yang dipertuan agung. Uang juga telah menafikan nilai mendasar tentang membangun kebangsaan, yaitu sumbangsih warga negara tanpa pamrih. Hak-hak mendasar kewarganegaraannya telah dikompensasi begitu rendahnya dengan nominalisasi uang. Bagi kelompok golput, terlibat pemilihan suara terhadap partai tertentu, berarti ikut serta menyuburkan politik uang itu.

Dalam kasus seperti ini, memaknai politik di Indonesia, termasuk demokratisasi dalam arti praktis, berarti memaknai uang. Nominalisasi akan nilai uang kemudian memompa berjalannya mesin politik dari hulu sampai hilir kelompok masyarakat, yang pada akhirnya berimbas pada pergerakan komplotan kaum partai untuk merampok uang negara. Korupsi, adalah nama lain dari politik beserta seluruh

aspek yang mencakupinya. Tak ayal, dilema tentang uang dalam dunia politik pun sedikit demi sedikit telah ikut menggerus nilai-nilai budaya demokrasi yang dikenal sebagai bagian dari khazanah sosial budaya di masyarakat. Sayang sungguh sayang, hawa demokratisasi pasca reformasi yang ada kemudian hanya diterjemahkan menjadi politik praktis saja, untuk meraih kekuasaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Politik dan demokrasi tidak lagi menjadi sarana untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Politik tidak lagi mampu mengarahkan haluan pembangunan berbasis pemerataan dan kemakmuran, melainkan pembangunan berbasis kantong suara. Demikian juga, nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya menjadi ruh dari tradisi musyawarah dan mufakat, gotong royong, *sambatan*, dan sekian nama lainnya sedikit demi sedikit tergerus dengan keputusan tunggal, aklamasi, *voting*, dan *walk out*. Fenomena-fenomena terakhir adalah buah dari *lobby*, negosiasi, politik dagang sapi, dan “transaksi paha” yang sarat dengan afiliasi kekuasaan dan perampokan terhadap uang negara.

Seiring budaya demokrasi yang hanya diterjemahkan menjadi politik praktis itu, aspek yang tidak kalah seru, masyarakat tidak lagi percaya kepada para pemimpin lokal tradisionalnya. Padahal, mereka itulah yang menjadi aktor paling penting mencipta harmoni dan menjaga stabilitas negara di tingkat paling bawah. Nilai-nilai kharisma dan spiritualitas para tokoh masyarakat, khususnya yang berasal dari pemegang legitimasi keagamaan sedikit demi sedikit memudar. Seringkali para pelaku politik praktis yang berusaha menggandeng kelompok agamawan dengan tujuan memompa pundi-pundi suara, telah menjadikan dunia politik di Indonesia penuh dengan nuansa kolaboratif atau persekongkolan. Bahkan sebagian lain, berusaha menjadikan agama sebagai asas tunggal partai. Akibatnya, ketika nilai-nilai perenial keagamaan masuk dalam ranah politik yang seringkali dianggap “najis”, dan ketika “yang najis” itu bermasalah, semisal terlibat korupsi, maka yang perenial pun pada akhirnya menjadi barang tertawaan, ejekan, dan sebagainya. Beberapa kasus yang menimpa anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang berasaskan agama, dan partai yang dikenal memiliki kedekatan dengan pemimpin agama

telah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin agama yang memiliki otoritas atas nama Tuhan itu.

Memang benar, bahwa saat pemilihan umum, legislatif, presiden, dan pimpinan daerah yang melibatkan partisipasi suara dari masyarakat, maka kelompok agama benar-benar dianggap seksi. Mereka adalah ujung tombak pengumpulan pundi suara. Suara mereka, seperti suara Tuhan dan wakil Tuhan, sehingga akan selalu dimanfaatkan pelaku politik praktis untuk mendapatkan mandatnya. Kasus kedekatan partai PPP dengan seorang pemimpin agama di Madura, dan bahkan selanjutnya beliau terlibat dalam kampanye-kampanye misalnya, telah menyumbangkan suara besar bagi partai itu. Demikian juga kasus pelibatan pemimpin-pemimpin *tarbiyah* dalam kampanye partai PKS telah pula menyedot perhatian massa non-kader untuk memilih partai berlambang bulan sabit dan padi itu.

Dalam ranah antropologi budaya, Bourdieu (1997) pernah merumuskan adanya konsep kuasa simbol berbasis kepada tradisi yang menganggap simbol-simbol dalam mitos, bahasa, seni, dan agama sebagai sarana untuk mengetahui dan untuk menciptakan dunia objek. Pada konteks Indonesia, simbol-simbol tersebut kebanyakan ada atau melekat pada kelompok keagamaan dan tokoh adat tradisi yang memiliki ikatan sosial dan historis dengan masyarakatnya (Fashri, 2007). Simbol-simbol ini memiliki fungsi sosial dan sangat penting dalam menjamin integritas, kepaduan, dan kekompakan masyarakat. Simbol-simbol ini telah membentuk dan menstrukturkan dunia serta bersifat fungsional sebagai sarana dominasi untuk menghubungkan produksi simbolik dengan kepentingan kelompok dominan untuk menjustifikasi dominasinya. Artinya, betapa strategisnya para pemimpin agama dan kelompok pemegang legitimasi tradisional lainnya. Potensi dan posisi inilah yang dilihat oleh dunia politik Indonesia untuk melibatkan mereka dalam aktivitas politiknya. Sayangnya, para pemimpin lokal tradisional itu pun “sadar atau tidak disadari” ikut menikmati kolaborasi dengan para pelaku politik praktisnya, dan pada akhirnya, fungsi utama mengintegrasikan dan menjadi teladan bagi warga masyarakatnya kemudian terabaikan sedemikian rupa. Demokratisasi di Indonesia, tidak hanya berdampak

secara politik kenegaraan saja, tetapi juga ikut “menghancurkan” atau menganomali dinamika dan nilai-nilai sosial budaya luhur yang ada sebelumnya.

Kelompok yang paling rentan terkena imbas dari politik praktis atas nama isu demokratisasi adalah kelompok muda, terlebih kelompok pemilih pemula. Kelompok muda merupakan “pangsa pasar” strategis dari proses produksi perolehan suara partai politik. Seturut dengan pendapat Bourdieu (1997) yang menyatakan bahwa ada tiga lembaga utama, yaitu keluarga, lembaga keagamaan (masjid, gereja, dsb), dan sekolah yang mampu melakukan kerja reproduksi budaya dan praktik-praktik tertentu, maka pemanfaatan kelembagaan untuk kepentingan perolehan suara pun dapat dilakukan. Artinya, jika kelompok pelaku politik telah menguasai tiga lembaga ini, maka ia dapat dengan mudah menggiring kelompok muda sesuai kepentingannya. Terlebih ketika pemimpin lokal tradisional yang umumnya juga terlibat dalam tiga lembaga itu telah juga digandeng.

Oleh karena itulah, ketidaktahuan atau kekurangpahaman kelompok muda dalam membaca peta politik Indonesia, beserta afiliasi dan mekanismenya, akan menyebabkannya mereka masuk dalam lingkaran politik yang partisan dan pragmatis. Bahkan, para pelaku politik yang kolaboratif dan penggemar “utang najis” akibat rente kampanye bisa saja menjadi citra gambar dari cita-citanya untuk ikut serta dalam memasuki dunia politik itu. Namun demikian, kita tidak sepenuhnya bisa menafikan bahwa tiga lembaga itu pun bisa memiliki fungsi untuk mencegah citra gambar yang buruk dunia politik masuk ke alam pikiran dan perilaku kelompok muda. Menanamkan kembali nilai-nilai yang luhur tentang budaya demokrasi beserta landasan nilai-nilai lain yang baik terhadap kelompok muda merupakan langkah yang tepat untuk menyemaikan aktivitas dan aktivis politik yang bermartabat. Para pemimpin lokal tradisional, pengurus kelembagaan agama dan sekolah, dan orang tua di tingkat keluarga, sebagai pemegang utama reproduksi budaya, harus benar-benar menawarkan kepada kelompok muda sebuah “ritme tarian bersama” antara pembelajaran budaya demokrasi dan praktik-praktik politik yang bisa diteladani karena nilai-nilai luhurnya.

Tahun 2014 adalah tahun politik, sekaligus tahun dimulainya bonus demografi yang cukup menantang. Di tahun ini, nuansa kontestasi para pelaku politik akan begitu nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara di sisi lain, jika masyarakat Indonesia tidak dapat memanfaatkan jumlah tenaga produktif untuk kepentingan pembangunan, maka Indonesia berarti akan kalah bersaing di konteks global dalam waktu yang sangat lama. Di tahun politik di satu sisi, dan di sisi lain daya saing global seperti ini, maka perekaman terhadap fenomena-fenomena yang bertumbuh kembang bersamanya tentu akan sangat menarik. Apakah demokrasi akan dipahami sebagaimana adanya saja? Ataukah demokrasi sebagai bagian dari budaya hidup manusia akan beradaptasi sebagaimana kehendak manusia pelaku dalam ruang dan waktunya? Sebagian besar fenomena-fenomena ini rupanya menjadi isu esai yang ditulis oleh peserta lomba esai kebudayaan tingkat nasional tentang “Kaum Muda dan Budaya Demokrasi” yang diselenggarakan Puslitbang Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014.

Proses penilaian terhadap 1.000 tulisan yang diterima panitia, dan diseleksi menjadi 100 tulisan, dan kemudian dikecilkan menjadi 15 finalis yang berhak diundang ke Jakarta pun cukup lama, karena bersangkutan paut pada persoalan teknis dan substansi. Secara teknis, persoalan *copy paste* dari internet ataupun literatur pendukung yang paling sering dijumpai. Kecenderungan plagiarisme terlihat pula pada kurangnya penyebutan sumber, padahal beberapa kutipan telah diambil. Selain itu, kesalahan tata bahasa seperti salah ketik, pembuatan kalimat dan paragraf, penggunaan kata-kata yang kurang tepat juga terlihat jelas dari naskah yang masuk. Sementara secara substansi, isu-isu yang diangkat, walaupun terlihat beragam judulnya, namun tetap bermuara pada isu politik dan budaya demokrasi. Sayangnya, banyak tulisan yang secara substansial, konteksnya telah tertinggal lama, sehingga tulisan tersebut tidak bisa merekam konteks kekinian.

Walaupun demikian, dewan juri akhirnya dapat menemukan 15 finalis dengan isu-isu yang cukup menarik. Dari 15 finalis itu, secara

substansi setidaknya ada empat pengelompokan isu yang diajukan. *Isu pertama*, isu tentang lembaga yang melakukan kerja reproduksi “budaya demokrasi”, sehingga dapat diterima kelompok muda, sebagaimana pandangan Bourdieu di atas. Tulisan Arini Ayatika Sadariskar, “Tantangan Demokrasi di Sekolah dan Rumah Kita”, telah merekam secara baik bahwa proses demokratisasi itu sesungguhnya terlahir dan terinternalisasi oleh kelompok muda di lingkungan sekolah dan keluarganya. Pola pembelajaran, pendidikan dan pengasuhan, memberikan pengaruh signifikan bagi kelompok muda dalam memahami dan mempraktikkan demokrasi pada praktik-praktik hidupnya, termasuk saat pemilihan suara. Mereka akan mempertimbangkan secara matang pilihannya, dengan mengurai dan menganalisis potret para pelaku politiknya. Kesadaran berpolitik ini tentu didasarkan juga pada sistem keteladanan yang diberikan guru dan orang tuanya. Naskah ini unik dan satu-satunya naskah yang memiliki kerangka dasar yang jelas, sehingga layak menempatkannya pada posisi juara pertama.

*Isu kedua*, nilai-nilai demokrasi, baik nilai hakiki yang melekat pada budaya demokrasi ataupun nilai-nilai yang diejawantahkan pada tradisi dan praktik hidup lainnya. Tulisan pemenang kedua, Alief Moulana, dengan judul “*Nescire Causa est Timendi: Gerak Antagonis antara Demokrasi dan Rasa Takut*”, pada awalnya memang sulit dipahami, karena tulisannya didasarkan pada kajian filsafat politik. Namun, ketika kata kunci “penyebab dari ketakutan adalah ketidaktahuan”, diterjemahkan kepada berbagai persoalan kehidupan bangsa, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas dan marginal baik secara keagamaan ataupun seksualitas, maka dapatlah dipahami bahwa budaya demokrasi sesungguhnya didasarkan pada prinsip “pemahaman mendalam dan pengertian atas segala sesuatunya”. Pengetahuan atas nilai, tata cara, dan mekanisme yang ada dan melekat pada suatu kelompok atau pilihan aliran paham tertentu, dapat menjadikan seseorang mau menerima perbedaan. Inilah prinsip dasar demokrasi.

Abstraksi yang ditulis oleh Alief Moulana, seolah dilanjutkan oleh beberapa tulisan lain yang mengangkat berbagai nilai demokrasi

yang ada pada tataran praktiknya. Hal ini terlihat jelas pada tulisan Jessica Anzamar Sibarani tentang “Belajar dari Seloka Adat Kerinci sebagai Kearifan Lokal menuju Demokrasi Indonesia yang Beradab” yang berusaha menggali nilai-nilai demokrasi pada tradisi lisan yang masih berkembang di masyarakat Jambi. Sayangnya, tulisan ini belum memberikan refleksi komprehensif terhadap hubungannya dengan konteks demokrasi yang berkembang sekarang ini. Seturut tulisan Jessica, tulisan I Wayan Juniartawan, tentang “Konsepsi Pasraman *Tat Twam Asi*: Visualisasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Hidup Berasrama”, juga mampu menerjemahkan konsepsi saling pengertian dan pemahaman tentang nilai orang lain dalam praktik hidup bersama satu asrama. Asrama menjadi miniatur berbagai perbedaan. Wayan sepertinya hendak menyimpulkan bahwa orang yang bisa hidup dan beradaptasi di dalam asrama, berarti akan bisa hidup di masyarakat luas.

Demikian juga dengan tulisan “Mengatasi Konflik Komunal Mahasiswa Makassar melalui *Tudang Sipulung*” karya Rahmat Nur Hidayat, dan “*Duduak Barapak*: Nilai Dasar Demokrasi Khas Minangkabau yang Terlupakan” karya Zihaul Abdi pun merupakan penerjemahan pentingnya memahami orang lain. Pemahaman ini akan membuahkan proses adaptasi para pelaku, sehingga dapat melahirkan kompromi berbagai kepentingan untuk mengatasi persoalan yang sulit diselesaikan. Pengertian tentang sesuatu umumnya dapat terwujud bila komunikasinya dapat dilakukan dalam dua arah, dan saling mengisi bukan saling menghegemoni. Oleh karena itulah, tuturan menjadi sarat utama untuk mendamaikan dan menyesuaikan diri dengan pihak lain. Tentu, tuturan bukanlah sesuatu yang keluar dan menjadi pemanis saja, tetapi juga harus diarsikan pada keyakinan dan kesungguhan diri dalam komitmen yang jelas. Hal seperti ini tersirat jelas pada tulisan “Elegi Budaya *Siri’ Na Pacce* dalam Ranah Demokrasi di *Butta Panrita Lopi*”, karya Rifaldy Fajar.

*Isu ketiga*, terkait pada aktor atau para pelaku demokrasi. Isu ini sebenarnya didasarkan pada pengertian bahwa demokrasi tidak semata urusan politik. Oleh karenanya, para aktor demokrasi itu bukan hanya berasal dari pelaku partai politik, tetapi juga kelompok-

kelompok lain yang mampu mengartikulasikan demokrasi di berbagai bidang dan arena kegiatannya. Setidaknya ada tiga tulisan yang masuk dalam isu ketiga ini. Tulisan pemenang ketiga, Citra Anggia Fathia, “Kaum Muda dan Budaya Demokrasi: Pilihan Politik di antara Idealisme dan Pragmatisme”, adalah tulisan yang tertuju pada aktor demokrasi dari kelompok muda. Citra, mempersoalkan pelaku partai politik praktis yang berperilaku sangat pragmatis dalam mendapatkan kekuasaan, uang dan jabatan; sementara yang lain, dan hanya sebagian kecil berada pada idealisme yang kokoh memperjuangkan ideologi dan kesejahteraan masyarakat. Dua pola penokohan yang ada ini ikut mempengaruhi perspektif kelompok muda, khususnya saat penentuan sikap untuk mencoblos calonnya. Kenyataan seperti ini pun menjadi inspirasi dari Hendra Sugianto dengan tulisannya yang berjudul “Jangan Salahkan Pemuda Indonesia!”.

Selain aktor perorangan, ada juga bahasan yang cukup menarik dari sisi komunal etnik, sebagaimana yang dilakukan Cicilia Yeo, dengan tulisan “Etnis Tionghoa dan Hak Demokrasi di Indonesia”. Menurutny, hak demokrasi warga Tionghoa selama berpuluh tahun terkekang, bahkan diakhiri dengan tragedi kemanusiaan. Namun, pada satu dekade terakhir, hak-hak demokrasi itu dapat direngkuh, dan warga Tionghoa pun dapat berunjuk diri secara bebas untuk menyatakan pendapat dan pilihannya sendiri. Tulisan ini menjadi menarik, karena penulisnya dapat merekam pengalaman yang didapatinya, baik dari lingkaran terdalam keluarga ataupun kelompok etniknya. Tulisan terakhir dari isu tentang aktor adalah “Manifesto Gerakan Pemuda Santri dalam Pendidikan Budaya Demokrasi: Refleksi Pemilu 1999 dan Pemilu 2014 di Wilayah Jepara”. Ani Triana telah berusaha merekam realitas politik di wilayah Jepara. Kontestasi politik di wilayah ini sejak lama dikenal cukup panas, yaitu antara kelompok santri yang memilih PPP, dan sebagian lain memilih PKB. Tulisan ini sebenarnya menarik karena dapat merefleksikan pernyataan Bourdieu, bahwa simbol-simbol agama sering dimainkan aktor dan struktur untuk kepentingan kekuasaannya. Santri sebagai kelompok *grassroot*, berusaha mengaktualisasikan dirinya secara politik. Namun, langkahnya seringkali berkolaborasi sehingga

menghantarkannya pada posisi yang tidak baik, atau bertentangan antara satu dengan lainnya karena didasarkan pada pilihan para pemimpin kelompoknya. Akibatnya, keterlibatan santri dalam dunia politik akan mudah sekali untuk dipecah.

*Isu keempat*, arena berdemokrasi. Isu ini tidak hanya dimengerti pada arena atau ruang terbatas saja, seperti sebuah wilayah negara, provinsi ataupun kabupaten/kota, tetapi ruang-ruang tanpa batas demografis dan geografis. Ruang tanpa batas umumnya bersifat imajiner, bersifat maya, serta melampaui ruang dan waktu (baik *real time* ataupun *beyond*). Tulisan “Meninjau Peran Kaum *Gadget* dalam Kematangan Demokrasi Kita: Menghadapi Generasi Kritis, Reformis, dan Dinamis” karya Mochammad Arief Wicaksono, sesungguhnya berusaha merentang tanpa batas proses produksi dan pembelajaran berdemokrasi itu. Dunia tanpa bentuk dan tanpa batas dari sosial media memberikan andil besar bagi demokrasi kekinian. Buktinya, partai dan pelaku politik pun berusaha dan mengerahkan “pasukan tanpa bentuk” untuk menanamkan imej dan menyebarkan citra gambar dari tokoh-tokohnya, sehingga pantas ‘dicoblos’ oleh kaum muda sebagai pengguna paling besar *gadget*. Selain *gadget*, Denise Weldy Hellen Sahulata, melihat adanya aspek lain, yang juga berpengaruh terhadap pembentukan kaum muda dalam memahami demokrasi. Salah satunya melalui tafsir ulang terhadap budaya-budaya yang memiliki nilai tentang demokrasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini direfleksikan dalam tulisannya yang berjudul “Restorasi Budaya Demokrasi Bangsa melalui Pembentukan Karakter Kaum Muda”.

Indonesia yang dipenuhi berbagai perbedaan; budaya, bahasa, agama, dan suku sebenarnya merupakan arena berdemokrasi yang cukup baik. Artinya, Indonesia bisa menjadi semacam “Laboratorium Demokrasi Dunia”, sehingga dapat menjadi contoh kelompok-kelompok negara bangsa lain dalam mengatasi perbedaan itu. Ide ini tercermin dalam esai berjudul “Pesona Itu Bernama Miniatur Demokrasi Indonesia” karya Putri Demes Dharmesty. Akhirnya, konteks nasional sebuah miniatur demokrasi keindonesiaan itu diturunkan dalam konteks yang sangat lokal, yaitu hubungan antara “Kelompok Piara

Burung Puyuh dan Demokrasi”, karya Baiq Nabila Muftia Utami. Tulisan ini setidaknya menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kecil berbasis *hobby* (kesukaan) saja, bisa menerjemahkan nilai-nilai demokrasi pada keputusan bersama, baik dalam persoalan tata cara permainan ataupun pengelolaan organisasinya.

Akhirnya, dari 15 naskah dengan pengelompokan pada empat isu yang ada, telah memberikan gambaran bahwa kaum muda pun telah mengerti dan memahami budaya demokrasi dalam berbagai tatarannya. Kita, seringkali berprasangka bahwa kaum muda, khususnya para pelajar SMP dan SMA, tidak tahu apa-apa tentang demokrasi dan politik. Bahkan, kita seringkali menafikan bahwa mereka bisa merekam dan menganalisis fenomena, kenyataan, dan pengalaman yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Akibatnya, pola asuh dan pola pembelajaran dalam rumah dan sekolah seolah “tidak baik” jika memberikan ruang-ruang diskusi tentang politik dan demokrasi itu. Sadar atau tidak sadar, kita telah ikut membutakan mata batin dan mata mereka tentang pengertian dan pemahaman mendalam tentang sebuah perbedaan. Jika hal ini terus berlanjut, maka hegemoni tata cara berpikir *mainstream* akan tidak terkalahkan. Melalui tema “Kaum Muda dan Budaya Demokrasi” ini, setidaknya kita telah memberikan ruang-ruang kepada kaum muda untuk bersuara tentang fenomena yang ada di sekitarnya, walaupun fenomena itu bukan sesuatu yang *mainstream* sekalipun. Harapannya, kesadaran berdemokrasi kaum muda akhirnya akan berujung pada upaya mencipta keindonesiaan yang sejahtera dan bermartabat. Semoga.

### Daftar Pustaka

- Baudrillard, Jean. 1983. *Simulation*. New York: Semiotext[e].
- Bourdieu, Pierre. 1997. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu, Randal Johnson [ed]. Columbia: Columbia University Press.
- Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Humaedi, M. Alie. 2014. *Perisai Roketenda: Ketahanan Para Penyintas*. Jakarta: HFI.

- Merton, R.K. 1963. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: Free Press.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*, diterjemahkan oleh Bur Rasuanto. Jakarta: Dunia Pustaka.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar <i>Hurip Danu Ismadi (Kepala Puslitbang Kebudayaan)</i> .....	vii
Menyemai Budaya Demokrasi yang Bermartabat <i>M. Alie Humaedi (Peneliti PMB-LIPI)</i> .....	ix
Tantangan Demokrasi di Sekolah dan Rumah Kita <i>Arini Ayatika Sadariskar (SMA Labschool Jakarta)</i> .....	1
<i>Nescire Causa est Timendi:</i>	
Gerak Antagonis antara Demokrasi dan Rasa Takut <i>Alief Moulana (SMA Pribadi Bandung)</i> .....	11
Belajar dari Seloka Adat Kerinci:	
Kearifan Lokal Menuju Demokrasi Indonesia yang Beradab <i>Jessica Anzamar S. (SMAN 3 Kota Jambi)</i> .....	23
Konsepsi Pasraman <i>Tat Twam Asi</i> :	
Visualisasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Hidup Berasrama <i>I Wayan Juniartawan (SMA Negeri Bali Mandara)</i> .....	31
Mengatasi Konflik Komunal	
Mahasiswa Makassar dengan <i>Tudang Sipulung</i> <i>Rahmat Nur Hidayat (SMAN 8 Bulukumba, Sulsel)</i> .....	41
<i>Duduak Barapak,</i>	
Nilai Dasar Demokrasi Khas Minangkabau yang Terlupakan <i>Zihaul Abdi (SMAN 1 Padang)</i> .....	49
Elegi Budaya <i>Siri' Na Pacce</i>	
dalam Ranah Demokrasi di <i>Butta Panrita Lopi</i> <i>Rifaldy Fajar (SMA Negeri 1 Bulukumba)</i> .....	57

Kaum Muda dan Budaya Demokrasi: Pilihan Politik antara Idealisme dan Pragmatisme <i>Citra Anggia Fathia (SMAN 5 Kota Bekasi)</i> .....	69
Jangan Salahkan Pemuda Indonesia! <i>Hendra Sugianto (SMA Negeri 4 Berau)</i> .....	77
Etnis Tionghoa dan Hak Demokrasi di Indonesia <i>Cicilia Yeo (SMA Djuwita Tanjungpinang)</i> .....	85
Manifesto Gerakan Pemuda Santri dalam Pendidikan Budaya Demokrasi: Refleksi Pemilu 1999 dan Pemilu 2014 di Wilayah Jepara <i>Ani Triana (MA Safinatul Huda Jepara)</i> .....	95
Meninjau Peran "Kaum <i>Gadget</i> " dalam Kematangan Demokrasi Kita: Menghadapi Generasi Kritis, Reformis, dan Dinamis <i>Mochammad Arief Wicaksono (SMAN 10 Malang)</i> .....	103
Restorasi Budaya Demokrasi Bangsa melalui Pembentukan Karakter Kaum Muda <i>Denise Weldy Hellen Sahulata (SMA Kristen Kalam Kudus Ambon)</i> .....	111
Pesona Itu Bernama Miniatur Demokrasi Indonesia <i>Putri Demes Dharmesty (SMA Santa Maria Surabaya)</i> .....	119
Demokrasi dan Komunitas Piara Burung Puyuh <i>Baiq Nabila Muftia Utami (SMAN 1 Praya, Lombok Tengah)</i> .....	131
Generasi Gawai Merayakan Demokrasi Catatan Penutup Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 <i>Lukman Solihin (Peneliti Puslitbang Kebudayaan)</i> .....	141
Profil Penulis .....	150



# TANTANGAN DEMOKRASI DI SEKOLAH DAN RUMAH KITA

Arini Ayatika Sadariskar  
SMA Labschool Jakarta

Indonesia dengan jumlah penduduk 253 juta jiwa<sup>1</sup> melibatkan 185,8 juta pemilih terdaftar<sup>2</sup> pada Pemilu April 2014 lalu. *Freedom House*, salah satu NGO dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat, serta satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam kategori *Free*.<sup>3</sup> Majalah *Financial Times* mengemukakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mekanisme Pemilu paling kompleks di dunia.

- 1 Central Intelligence Agency. 2014. "The World Factbook." <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>. Diakses 01 Mei 2014
- 2 Tia Fitriyyah. 2014. "Pemilu 2014, KPU Resmi Tetapkan DPT 185,8 Juta." <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2027929/pemilu-2014-kpu-resmi-tetapkan-dpt-1858-juta>. Diakses 1 Mei 2014.
- 3 Prachatai English. 2010. "Freedom House Urges Obama to Engage Indonesia on Human Rights and Democracy." <http://www.prachatai.com/english/node/2131>. Diakses 14 Mei 2014

Tingkat partisipasi yang mencapai 75 persen berdasarkan survei *exit poll* dan *quick count* yang dilakukan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) bahkan melampaui Amerika Serikat yang tidak mencapai 60 persen.<sup>4</sup>

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Indonesia tinggi. Jumlah pemilih yang memutuskan untuk menggunakan haknya meningkat sejak Pemilu 2009 yang terjun bebas ke 70 persen. Masyarakat telah memutuskan untuk berpartisipasi, dan partisipasi adalah salah satu elemen paling fundamental yang meniupkan ruh dalam setiap negara yang menjunjung demokrasi. Apakah ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan? Tentu saja. Mengapa tidak berbangga sedikit terhadap satu-satunya prestasi demokrasi yang kita punya?

Indonesia memang telah melaksanakan praktik yang sangat demokratis, yakni Pemilu, dan berhasil mendongkrak angka partisipasi. Inilah yang menyebabkan namanya terpampang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun sayangnya, demokrasi di Indonesia hanya berjalan sampai pemilihan umum saja. Bungkus yang begitu manis, begitu rapi untuk menyembunyikan masyarakat yang masih jauh dari demokrasi. Berdasarkan data dari *Global Democracy Ranking* 2013, kualitas demokrasi Indonesia hanya menduduki peringkat 66 dari 115 negara, dengan Thailand di peringkat 65 dan India di peringkat 67, dan termasuk dalam kategori *flawed democracy*.<sup>5</sup> Peringkat tertinggi di raih oleh Norwegia, Swedia, dan Finlandia.

Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak zaman kemerdekaan. Panjang sudah rasanya perjuangan bangsa ini untuk menjunjung tinggi asas yang dianut tersebut. Lantas apa yang membuat Indonesia belum juga dinilai demokratis? Akar permasalahannya berada tidak jauh dari kita: di rumah, dan di sekolah.

---

4 Demos Polcny Brief. 2010. "Voter Turnout." [http://elections.gmu.edu/voter\\_turnout.htm](http://elections.gmu.edu/voter_turnout.htm). Diakses 1 Mei 2014.

5 David F.J Campbell *et al.* 2013. "Democracy Ranking 2013 (pdf)." [http://democracyranking.org/ranking/2013/data/Scores\\_of\\_the\\_Democracy\\_Ranking\\_2013\\_a4.pdf](http://democracyranking.org/ranking/2013/data/Scores_of_the_Democracy_Ranking_2013_a4.pdf). Diakses 17 Mei 2014.

## Demokrasi dan Pola Asuh

Keluarga bagaikan arsitek yang mendesain dan membangun pondasi diri seorang individu. Kemanapun individu tersebut akan mengarah nantinya, nilai-nilai paling mendasar dan penanaman identitas yang paling krusial berada pada keluarga. Ini menyebabkan keluarga menjadi ruang lingkup yang sangat fundamental dalam menanamkan budaya demokrasi di Indonesia.

Penanaman demokrasi dalam keluarga dilakukan melalui penerapan pola asuh yang demokratis. Pola asuh demokratis menurut Baumrind (1967) adalah pola asuh yang mendorong anak untuk bebas tetapi tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka dan merupakan pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak. Menurut psikolog Tika Bisono, pola asuh demokratis menuntut orang tua bersikap rasional dan selalu mendasari tindakannya dengan pemikiran. Mereka juga memahami kemampuan anaknya sehingga tidak memberikan ekspektasi yang menekan. Orang tua demokratis memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan membebaskan anak dalam memutuskan suatu tindakan. Apabila hendak menasehati, orang tua demokratis selalu melakukannya dengan pendekatan yang hangat. Aturan yang diberikan berdasarkan pada alasan yang logis, jadi tidak asal suruh. Hal ini akan membentuk karakter anak yang bebas tetapi bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Sayangnya, masih banyak keluarga yang tidak menerapkan pola asuh demokratis dalam rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dari budaya paternalisme yang masih mengakar kuat pada mayoritas keluarga Indonesia. Budaya ini mengedepankan ayah sebagai orang yang memiliki wewenang paling besar dalam keluarga. Keluarga yang bersifat paternalistis cenderung menganggap anak sebagai individu yang belum dewasa, sehingga anak cenderung *overprotected* atau terlalu dilindungi dan hampir tidak memiliki wewenang untuk mengemukakan pendapatnya.<sup>7</sup> Hal ini menentang salah satu syarat

6 Roshma Widayani. 2013. "Pentingnya Pola Asuh Demokratis pada Anak." <http://health.kompas.com/read/2013/04/29/15433449/Pentingnya.Pola.Asuh.Demokratis.pada.Anak>. Diakses 14 Mei 2014.

7 Universitas Terbuka. "Tipe-tipe Kepemimpinan." [http://www.ut.ac.id/html/suplemen/luht4327/tipe\\_kepemimpinan\\_dan\\_fungsi%20kep/tipe\\_tipe%20dan%20fungsi%20kepemimpinan.htm](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/luht4327/tipe_kepemimpinan_dan_fungsi%20kep/tipe_tipe%20dan%20fungsi%20kepemimpinan.htm). Diakses 4 Mei 2014.

dasar terselenggaranya demokrasi di bawah *Rule of Law*, yaitu poin nomor 4 yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat.<sup>8</sup>

Budaya paternalisme bertalian dengan pola asuh otoriter, yang merupakan pola asuh yang menuntut anak untuk mengikuti aturan ketat yang ditetapkan orang tua. Pola asuh otoriter menurut Baumrind cenderung gagal memberikan alasan akan aturan yang diberikan, namun aturan tersebut tetap harus dituruti karena orang tua lebih berwenang dan anak dianggap belum dewasa. Ini akan menyebabkan anak melakukan sesuatu atas dasar keharusan, bukan karena mereka mengerti mengapa hal tersebut harus dilakukan. Anak pun tumbuh menjadi individu yang memiliki inisiatif yang minim dan daya kreasi yang rendah sebab jarang dituntut untuk berpikir dan membuat pertimbangannya sendiri. Sebagian besar dari keputusannya adalah hasil proyeksi keinginan orang tuanya. Anak menjadi bidang proyeksi dari keinginan orang tua.

Budaya tersebut akan membuat anak menjadi tidak dekat dengan orang tuanya. Hal ini membuat anak menjadi enggan mengemukakan pendapatnya, sebab tidak akan dipandang sebagai lawan bicara yang setara. Padahal, keluarga adalah ruang paling aman dan paling krusial bagi seorang anak untuk mengemukakan pendapat.

Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki ekspektasi terhadap anak untuk selalu datang dengan hal-hal yang menyenangkan, seperti hasil ulangan yang bagus atau bentuk prestasi lainnya. Anak pun menjadi enggan menceritakan masalah yang dihadapinya dan cenderung menyembunyikan atau bahkan memutarbalikkan fakta agar orang tuanya senang. Rumah tidak lagi menjadi tempat paling nyaman bagi anak, apalagi tempat untuk penanaman budaya demokrasi.

### **Sekolah dan Ruang Demokrasi**

Sebagai lembaga yang memiliki ikatan kuat dengan anak dalam rentang waktu 12 tahun dari SD sampai SMA, sekolah dapat menjadi sumber paparan budaya demokrasi yang paling besar dalam hidup

---

8 Miriam Budiardjo. "Dasar-Dasar Ilmu Politik." Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 60

seorang anak. Penanaman demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui pendidikan karakter dengan membentuk *soft skills*, atau seperti diperkenalkan oleh Robert Stenberg dari Universitas Yale, *successful intelligence* (SI). SI dipercaya lebih penting daripada *hard skills*. Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi (EQ) berkontribusi sebanyak 80 persen pada kesuksesan seseorang, sementara kecerdasan intelektual (IQ) hanya memiliki kontribusi 20 persen.

Sungguh disayangkan bahwa sistem sekolah konvensional di Indonesia tidak mendukung pembentukan SI tersebut. Data dari TIMSS 2007 (*Trends in International Math and Science Survey*) menunjukkan bahwa hanya 1 persen dari siswa Indonesia memiliki kemampuan berpikir tinggi (*high order thinking skills/HOTS*) yakni kemampuan untuk mengolah informasi, membuat generalisasi, menyelesaikan masalah nonrutin, serta mengambil kesimpulan data. Angka ini jauh kalah dibandingkan dengan Singapura, Taiwan, dan Korea yang mencapai lebih dari 40 persen. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah (*low order thinking skills/LOTS*) di Indonesia mencapai 78 persen, dengan Singapura, Taiwan, Korea, Jepang dan Hongkong hanya di bawah 15 persen.<sup>9</sup>

Ratna Megawangi menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sistem sekolah konvensional di Indonesia yang terlalu berorientasi akademis, dengan proses yang menekankan pada metode menghafal, latihan berulang/*drilling*, dan pengajaran satu arah. Orientasi tersebut hanya melatih kemampuan berpikir rendah dan berpotensi negatif terhadap pembentukan SI, sebab hanya mengondisikan siswa untuk belajar demi lulus ujian. Setelah ujian berakhir dan siswa telah lupa seluruh hafalannya, siswa tidak punya keterampilan apa-apa lagi karena tidak disiapkan kemampuan menganalisis dan mengolah informasi yang membutuhkan kemampuan berpikir tinggi.

Siswa Indonesia menjadi terbiasa disuapi. Diajarkan “apa” yang mereka harus pikirkan, bukannya “bagaimana” cara berpikir. Akibatnya lulusan yang dihasilkan hanya sekadar *baca* atau *tahu* tentang suatu masalah, namun tidak dibekali kemampuan

---

<sup>9</sup> Ratna Megawangi, “*Tantangan Besar Pendidikan Kita*”, dalam koran *Kompas*, 15 Oktober 2012, hlm. 6

yang mencukupi untuk melakukan bagian yang paling penting: menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, siswa mengetahui apa itu G30S/PKI dan kapan terjadinya tanpa mengerti mengapa peristiwa tersebut terjadi atau bahkan apakah sumber yang dibacanya itu dapat dipercaya.

Evaluasi pembelajaran nasional, yakni Ujian Nasional (berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional), yang menggunakan sistem pilihan berganda tidak sama sekali berkontribusi untuk memperbaiki keadaan. Sistem seperti ini dengan hanya satu jawaban yang benar dari pilihan yang diberikan memaksa siswa untuk menghafal jawaban mutlak dari sebuah pertanyaan, tanpa ruang untuk berpikir fleksibel dan mencari alternatif. Akibatnya, siswa biasa dididik untuk melihat hal secara hitam dan putih dan tidak kenal dengan sisi abu-abu. Cara berpikir tersebut juga membentuk karakter takut salah, yang akan menyebabkan siswa mudah terombang-ambing dan memiliki sifat ikut-ikutan atau bertahan pada mayoritas/zona aman agar tidak disalahkan. Sistem yang diterapkan berorientasi pada mendapatkan nilai bagus, sehingga siswa pun dilatih untuk mengabaikan proses dan mementingkan hasil yang dapat menjadikannya melakukan segala cara demi mendapatkan hasil yang bagus.

Hal ini dengan keras mempersempit ruang untuk terbentuknya masyarakat yang demokratis. Siswa terbiasa melihat hal secara benar-salah, merasa paling benar, dan tidak menerima perbedaan. Orientasi nilai membuat siswa terdorong menyontek dan berbuat curang agar mendapatkan nilai yang bagus. Tidak heran jika banyak politisi yang melakukan segala cara seperti politik uang, penyuapan, dan manipulasi agar dapat terpilih untuk menduduki kursi pemerintahan.

## **Mari Berubah**

Sebuah studi yang dilakukan oleh Yonk dari *Utah State University* dan Profesor Shauna Reilly dari *Northern Kentucky University* menyimpulkan bahwa warga negara dengan kualitas hidup yang lebih tinggi lebih terlibat dalam proses demokrasi daripada warga negara

dengan kualitas hidup rendah. Penemuan ini dapat menjelaskan mengapa negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia dan Denmark menempati peringkat 10 teratas demokrasi terbaik dunia. Berdasarkan *Where-to-be-born Index* 2013 (sebelumnya disebut *Quality-of-life Index*) yang diterbitkan *The Economist Intelligence Unit*, negara-negara tersebut menempati peringkat 3,4, dan 5 kualitas hidup terbaik di dunia. Indonesia menduduki peringkat 71.<sup>10</sup>

Denmark dinobatkan sebagai negara terbahagia di dunia berdasarkan *World Happiness Report* 2013. Beberapa dari enam faktor yang berpengaruh di antaranya adalah dukungan sosial dan kebebasan untuk memilih dalam hidup. Orang tua di Denmark dinilai memiliki daya dukung tinggi terhadap anak, yang disebabkan oleh daya dukung negara yang tinggi terhadap orang tua.<sup>11</sup> Rata-rata jam kerja di Denmark 1.546 jam per tahun, lebih sedikit dari rata-rata berdasarkan OECD yang mencapai 1.765 jam.<sup>12</sup> Hanya 2 persen pegawai bekerja dengan jam kerja yang panjang, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 9 persen. Hal ini berarti orang tua memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan waktu yang lebih banyak bersama anak mereka. Rendahnya stres membuat orang tua lebih rasional dalam menghadapi anak, yang akan berdampak pada lebih mudahnya penanaman pola asuh demokratis. Waktu yang banyak mempererat kedekatan orang tua pada anak yang akan membuat anak nyaman bersama orang tua dan lebih leluasa untuk mengemukakan pendapat. Belanda, negara yang menempati peringkat 6 kualitas demokrasi dan peringkat 8 kualitas hidup, memiliki rata-rata jam kerja tersedikit di dunia dengan 29 jam per minggu.<sup>13</sup>

10 Yonk RM, Reilly S. "Citizen Involvement: Quality of Life in a Time of Direct Democracy." *Applied Research in Quality of Life*, 2011; DOI: 10.1007/s11482-011-8142-x.

11 Huffington Post . 2013. "Denmark Is Considered The Happiest Country. You'll Never Guess Why." [http://www.huffingtonpost.com/2013/10/22/denmark-happiest-country\\_n\\_4070761.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/10/22/denmark-happiest-country_n_4070761.html). Diakses 18 Mei 2014.

12 OECD Better Life Index . "Denmark." <http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark/>. Diakses 18 Mei 2014.

13 Annalynkurtz. 2013. "World's Shortest Work Weeks." <http://money.cnn.com/gallery/news/economy/2013/07/10/worlds-shortest-work-weeks/5.html>. Diakses 18 Mei 2014.

Selain itu, implementasi pendidikan di negara-negara tersebut juga sudah bergerak menuju pembangunan SI. Megawangi menyebutkan bahwa banyak negara maju yang tidak memberikan nilai apalagi ranking pada siswa kelas rendah (SD atau SMP). Swedia hanya memberikan penilaian deskripsi verbal tanpa skala angka hingga siswa menginjak kelas IX. Begitu pula dengan Finlandia. Evaluasi siswanya menggunakan esai, *reasoning*, dan pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan berpikir tinggi. Kedua negara ini berdasarkan TIMSS dan PISA (*Programme for International Student Assessment*) menduduki peringkat tertinggi pendidikan dunia.

Penerapan kurikulum yang menuju pembangunan SI sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia, namun baru pada sekolah-sekolah progresif dan sekolah-sekolah internasional yang menggunakan kurikulum *International Baccalaureate* (IB). Meskipun masih menggunakan skala angka, kurikulum IB menggunakan kriteria dan deskriptor yang jelas untuk setiap skor yang diberikan. Skor maksimum tidak selalu 10, melainkan tergantung pada kriteria yang diujikan.<sup>14</sup> Penerapan *Personal Project* untuk syarat kelulusan *Middle Years Programme* (MYP) dan *Extended Essay* untuk syarat kelulusan *Diploma Programme* (DP) jelas menuntut kemampuan berpikir tinggi.

Akhir kata, demokrasi di Indonesia masih bersifat sangat superfisial. Pelaksanaan Pemilu yang mendongkrak partisipasi hanyalah demokrasi pada kulit luarnya saja. Secara substansial, masyarakatnya belum menganut demokrasi sebagai asas berbangsa dan bernegara, tercermin jelas dalam kehidupan rumah tangga dan penerapan sistem pembelajaran dalam sekolah.

Pembenahan terhadap fenomena ini harus dilakukan secara sinergis oleh semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang bersangkutan. Orang tua perlu menanamkan pola asuh yang demokratis dalam rumah tangga dan mengedepankan pendekatan partisipatif daripada otoriter. Anak tidak menjadi proyeksi dari keinginan orang tua, melainkan individu bebas yang berhak menentukan keputusannya sendiri sebagai bagian dari masyarakat

14 Internasional Education. 2014. *International Baccalaureate*.” <http://www.ibo.org>. Diakses 14 Mei 2014

demokratis. Orang tua harus dapat mengendalikan kapan bersikap sebagai orang yang dituakan dan kapan bersikap seperti teman kepada anak. Meluangkan lebih banyak waktu untuk anak sangatlah penting. Pada akhirnya, kesuksesan karir tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan dan kepuasan dari kesuksesan mendidik anak.

Pemerintah, di sisi lain, perlu membenahi sistem pendidikan di negeri ini. Seperti kata Tan Malaka, *"Belajarliah dari Barat, tetapi jangan menjadi peniru Barat. Melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas"*. Indonesia perlu belajar banyak dari sistem pendidikan di negara-negara Barat yang berhasil mendukung pembentukan SI pada siswa-siswanya. Guru patut diperlakukan sebagai tenaga profesional yang setara dengan dokter, insinyur, atau penegak hukum, sebab di tangan merekalah masa depan generasi muda dibentuk.

Indonesia telah jatuh bangun bermetamorfosis dari rezim yang otoriter menuju keterbukaan yang begitu luas. Sekarang tinggal bagaimana kita membangun keluarga dan lingkungan pendidikan yang dapat menjadi pondasi-pondasi kokoh dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Semua itu dapat dimulai dengan merubah sikap. Dari sikap pesimis akan bobroknnya keadaan, menjadi sikap optimis akan adanya perubahan. Dari sikap mengkritik akan kesalahan-kesalahan yang ada, menjadi sikap meluruskan agar menjadi benar. Dari sikap yang hanya pasif menerima keadaan, menjadi sikap yang aktif menjadikannya lebih baik. Dari masyarakat yang masih jauh tertinggal, menjadi masyarakat yang dengan sepenuh hati menjunjung tinggi demokrasi sebagai asas berbangsa dan bernegara. Mari mulai dari sekarang.



# ***NESCIRE CAUSA EST TIMENDI***

## **GERAK ANTAGONIS ANTARA DEMOKRASI DAN RASA TAKUT**

**Alief Moulana**

SMA Pribadi Bandung

*“Timendi causa est nescire* (penyebab dari ketakutan adalah ketidaktahuan),” dikutip dari *Naturales Quaestiones* oleh Seneca.

**P**ertama, saya hendak menjelaskan ungkapan Latin yang diangkat dalam tulisan ini. Dapat diperhatikan bahwa ada perubahan susunan letak antara kata Latin *timendi* (ketakutan) dengan *nescire* (ketidaktahuan) pada judul yang saya angkat dan kalimat singkat yang saya kutip dari Seneca. Saya tidak bermaksud untuk menyangkal sebuah ungkapan mutiara Latin yang sudah sangat lama mengakar di dalam ilmu filsafat (*Naturales Quaestiones* ditulis sekitar tahun 65 SM), tetapi saya berusaha untuk melihat petuah ini dari sudut pandang yang berbeda—sudut pandang yang menurut saya sangat cocok jika dikaitkan dengan keadaan kehidupan demokrasi bangsa

Indonesia saat ini. Selain itu, perlu diberitahukan bahwa susunan kata yang saya angkat pada judul tidak mengikuti kaidah bahasa Latin sepenuhnya; hal tersebut dilakukan semata untuk mempermudah transisi dari ungkapan Seneca ke ungkapan yang saya pakai dalam tulisan ini.

Sebagai gambaran umum, ungkapan Seneca tersebut biasanya dijelaskan dalam ilustrasi pendek sebagai berikut: *“Ketika kita berada dalam tempat yang gelap, kita merasakan ketakutan bukan karena adanya kegelapan, namun kita merasa takut karena kita tidak mengetahui apa saja yang ada di sekeliling kita.”* Sebaliknya, berikut penjelasan singkat saya terhadap ungkapan baru yang dipakai di tulisan ini: *“Jika kita berada di depan sebuah ruangan yang gelap, kita tetap tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya jika kita terus-menerus tidak memiliki keberanian untuk memasukinya.”* Secara sederhana, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kedua ungkapan ini sama-sama valid.

Kevalidan ganda dalam hal ini akan lebih mudah dijelaskan dengan diagram sebagai berikut.



### ***Historia Vitae Magistra* (Sejarah adalah Guru Kehidupan)**

Lalu, apa hubungan *“nescire causa est timendi”* (penyebab dari ketidaktahuan adalah ketakutan) dengan budaya demokrasi? Banyak. Sangat banyak.

Untuk memulainya, mari kita membahas terlebih dahulu lintas sejarah dunia yang mengantarkan kita kepada budaya demokrasi modern. Kita tidak akan memulai dari sejarah panjang Yunani dan Romawi kuno yang begitu erat dengan periode lahirnya demokrasi, namun akan bergeser ke zaman yang setidaknya lebih relevan untuk digunakan sebagai perbandingan dengan abad kedua puluh satu ini: Persemakmuran Polandia-Lithuania.

Dalam persemakmuran ini, kebijakan kedua pemerintahan,

Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lithuania, menghasilkan toleransi umat beragama yang seakan-akan sudah menyamai apa yang terjadi di zaman modern ini. Hal yang perlu dicermati adalah keterbukaan persemakmuran ini terhadap pendatang asing yang menjadi tonggak kehidupan berdemokrasi yang begitu maju. Di awal abad keempat belas, ketika banyak kebudayaan lain yang masih merasakan “ketakutan” dari bekas-bekas kejayaan Islam di abad sebelumnya yang bisa saja mengancam budaya mereka, Lithuania mengundang suku Tatar Lipka yang beragama Islam. Di saat bangsa-bangsa ini merasa “ketakutan”, dengan “berani”, Raja Grand Vytautas yang Agung menerima, bahkan mengundang, mereka dengan tangan terbuka. Hal ini menghasilkan perbaikan “pemahaman” masyarakat tentang Islam dan budayanya.

Tidak hanya Islam, masyarakat Persemakmuran Polandia-Lithuania saling menghargai antar semua umat beragama, baik yang menganut Katolik Roma (agama kenegaraan), Katolik Yunani, Ortodoks Timur, Protestan, maupun Yahudi yang dianut imigran dari Spanyol dan Portugal. Keterbukaan ini melahirkan sistem demokrasi yang kokoh dan nyaris sempurna (perlu diketahui bahwa persemakmuran ini runtuh bukan karena adanya perpecahan, tetapi karena adanya kekosongan kekuasaan dilanjutkan oleh serangan dari Rusia).

Apa kunci dari keberhasilan demokrasi persemakmuran ini? Pemahaman dan “pengertian” antarmasyarakat. Apa kunci dari pemahaman dan pengertian tersebut? “Keberanian” pemerintah di tengah-tengah “ketakutan” bangsa lain. Persemakmuran Polandia-Lithuania telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan demokrasi, kita perlu menghilangkan rasa takut yang menghalangi toleransi antarumat, karena “*nescire causa est timendi*”.

Mari berpindah ke Amerika Serikat di abad kedua puluh. Kita akan berbicara jauh dari apa yang sudah terlalu biasa diperbincangkan: heroisme Martin Luther King Jr., aktivisme penolakan terhadap diskriminasi gender oleh Eleanor Roosevelt, atau tentang gerakan Malcolm X yang cenderung radikal. Dalam tulisan ini, saya ingin mengangkat seorang tokoh yang mungkin jarang kita dengar, Harvey

Milk. Lumrah saja bila kebanyakan dari kita tidak mengenal tokoh ini, karena ia bergerak untuk melawan diskriminasi orientasi seksual—hal yang masih tabu untuk diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia.

Harvey Milk, yang biografinya diangkat dalam film *Milk* oleh sutradara Gus van Sant, adalah tokoh yang begitu dihargai di kalangan aktivis anti-diskriminasi di Amerika Serikat dan di dunia. Kisahnya menentang diskriminasi dimulai di awal dekade 1970, di tengah masih ramainya aksi kekerasan terhadap kaum minoritas. Semangatnya dan teman-temannya mengubah San Francisco, Amerika Serikat, bahkan dunia—Milk dikenal sebagai awal penolakan terhadap diskriminasi orientasi seksual secara besar-besaran. Hingga ditembak dan gugur pada tahun 1978, ia sudah berhasil menjabat di dalam bagian salah satu kantor publik San Francisco yang membuatnya dikenal sebagai salah satu aktivis yang paling berpengaruh di kota yang dijuluki *The Paris of The West* ini.

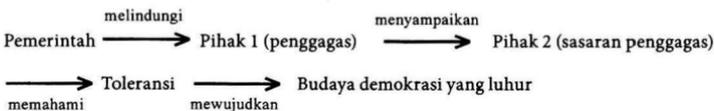
Hal yang sangat menarik dari perjuangannya adalah bagaimana ia tiba-tiba muncul di tengah sikap skeptis masyarakat Amerika Serikat di tahun-tahun tersebut. Di saat jutaan orang lainnya merasa “takut” untuk memperbincangkan masalah ketidaksetaraan hak-hak pada orientasi seksual minoritas, ia dengan “keberanian” muncul di hadapan publik, tidak hanya sekadar bersuara, namun bertindak lebih jauh hingga mencapai sebuah posisi penting bagi kehidupan berdemokrasi dunia. San Francisco senantiasa mengenang Milk dalam pawai lilin di malam hari kematiannya, yang sampai sekarang masih menyisakan sebuah semangat anti-diskriminasi untuk siapapun. Walaupun masih banyak masyarakat yang tidak “memahami” dan menghargai adanya perbedaan, namun Milk sudah membuktikan bahwa dengan “keberaniannya” menyampaikan pendapat, ia dapat mengubah dunia.

Sebagai penutup, tak lengkap rasanya jika tidak membahas seorang gadis yang ketika berusia sepuluh tahun yang “berani” menulis surat kepada Yuri Andropov, pemimpin Uni Soviet pada tahun 1982. Praktik demokrasi dalam mengemukakan pendapat yang dilakukan oleh Samantha Smith, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat,

mengubah hubungan yang ekstrem dan sama sekali tidak harmonis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menuju ke tahap yang lebih baik; walaupun perlahan-lahan, hubungan Rusia, setelah pecahnya Uni Soviet, dengan Amerika Serikat kembali memburuk.

Smith dengan “berani” dan dengan sikap tak berdosa menulis surat yang menyampaikan kekhawatirannya akan kemungkinan perang nuklir, dan Andropov menjawab dengan sangat baik bahwa ia juga menginginkan kedamaian sama seperti banyak orang lain di dunia. Smith menjadi ikon bagi persahabatan kedua bangsa besar yang tak akur. Dalam usia sepuluh tahun, Smith membuktikan kepada enam miliar populasi dunia bahwa demokrasi, menyalurkan aspirasi, adalah sebuah anugerah yang perlu dijaga oleh semua orang demi mencapai ketertiban umum.

Dari ketiga sejarah di atas kita menemukan pola baru yang dapat menjelaskan lebih rinci konsep “*nescire causa est timendi*.” Jika kita perhatikan, ada kesamaan yang mencolok di antara ketiga kisah ini: adanya seorang atau sekelompok orang yang mengungkapkan sebuah gagasan, adanya kelompok lain—mayoritas—yang menerima gagasan itu, serta akhirnya muncul pemahaman yang lebih baik akan gagasan tersebut. Tetapi, ada satu kesamaan lain yang juga sangat jelas sebagai awal dari setiap kisah di atas: perlindungan pemerintah. Sudah jelas bahwa kehidupan demokrasi Persemakmuran Polandia-Lithuania dimulai oleh pemerintahnya. Sementara Harvey Milk memiliki fakta lain bahwa ia pindah dari New York menuju San Francisco, kota yang lebih melindungi hak-hak kaum minoritas pada masanya. Samantha Smith juga tumbuh di negara yang melindungi hak-hak mengemukakan pendapat. Praktisnya, persamaan ini kembali membentuk komponen baru dari kerangka pemikiran “*nescire causa est timendi*”. Untuk lebih jelas, kerangka pemikiran ini saya paparkan melalui diagram di bawah ini.



Di Indonesia, yang menjadi penghalang runtutan kronologi yang baik di bawah, sesuai dengan "*nescire causa est timendi*", adalah rasa takut. Dari penjelasan pada kerangka pemikiran tersebut, saya membagi ketakutan ini menjadi dua bagian: 1) rasa takut yang dirasakan oleh masyarakat terhadap gagasan baru (rasa takut pihak 2); dan 2) rasa takut yang dimiliki oleh penyampai suatu gagasan akan reaksi masyarakat yang lain (rasa takut pihak 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, marilah kita bahas kedua jenis rasa takut ini secara lebih detail.

### **Rasa Takut yang Dialami Pihak 2**

Untuk keperluan tugas akhir Bahasa Indonesia, sebuah survei singkat pernah saya lakukan pada teman-teman di sekolah tentang bagaimana pandangan mereka terhadap kehidupan toleransi di Indonesia. Mayoritas, lebih dari delapan puluh persen menyatakan bahwa keadaan kehidupan bertoleransi di Indonesia baik-baik saja, di saat begitu maraknya tindakan-tindakan diskriminatif terjadi di dunia nyata, dan terlebih lagi di dunia maya. Mayoritas ini adalah mereka yang akan menjadi sasaran dari pihak pertama. Mereka yang kurang peka terhadap isu ini adalah penerima gagasan yang akan disampaikan oleh pihak pertama mengenai isu tersebut; dapat kita simpulkan bahwa mayoritas di atas adalah pihak kedua (sasaran penggagas).

Pihak kedua bukan berarti selalu menentang perubahan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pihak kedua yang benar-benar tidak siap akan gagasan-gagasan baru; mereka adalah golongan masyarakat yang melakukan anarkisme dan penolakan melalui kekerasan terhadap ide-ide yang menurut mereka menentang norma yang sudah ada. Pihak kedua tidak hanya melingkupi golongan tersebut saja, tetapi juga adalah mereka yang kurang peka akan perubahan sosial. Dalam banyak kesempatan, mereka adalah mayoritas yang dituju oleh pihak pertama dalam menyampaikan pendapatnya.

Dengan kata lain, dalam cerita Samantha Smith, pihak kedua adalah masyarakat Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta Yuri

Andropov. Sementara itu dalam sejarah Persemakmuran Polandia-Lithuania, masyarakat (dari segala agama) merupakan pihak kedua. Perjalanan Harvey Milk juga menjadikan masyarakat luas, yang rata-rata masih belum menerima kesetaraan seksualitas dan gender, sebagai pihak keduanya. Pihak kedua ini, secara garis besar, adalah kelompok umum yang dapat dianalogikan dengan istilah populasi.<sup>1</sup> Sementara pihak pertama yang berasal dari bagian lain akan membentuk sebuah komunitas<sup>2</sup> dengan pihak kedua ini.

Apa ketakutan yang dimiliki oleh pihak kedua?

Tentu saja ketakutan terhadap pemikiran baru tadi. Sebagai contoh besar yang dialami masyarakat di Indonesia adalah ketika sebuah gagasan baru terangkat di publik, dan banyak pihak yang menilai bahwa gagasan tersebut menentang norma Islam, maka rakyat Indonesia mayoritas, terutama yang beragama Islam, akan ikut-ikutan menentang gagasan ini tanpa tahu apa yang dipermasalahkan.

Kebanyakan masyarakat yang berada di pihak arus utama yang ikut-ikutan memiliki “rasa takut” jika nilai-nilai kehidupan yang mereka miliki dan tertanam di diri mereka tiba-tiba dikalahkan oleh gagasan baru, walaupun gagasan tersebut lebih baik untuk diterapkan. Nyaris, ini adalah sama sekali kebalikan dari apa yang terjadi di negara-negara yang kehidupan berdemokrasinya sudah maju.

Apa yang salah?

Ketika saya masih berada di bangku sekolah dasar, atau jauh

---

1 Dalam ilmu biologi, populasi berarti sekumpulan makhluk hidup yang sejenis menempati suatu lingkungan; di dalam konteks ini, berarti sekumpulan manusia yang memiliki pandangan sejenis menempati suatu daerah tertentu.

2 Dalam ilmu biologi, komunitas berarti seluruh jenis populasi makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan; di dalam tulisan ini berarti seluruh pihak (pihak satu dan pihak dua) yang menempati suatu daerah tertentu. Perlu diketahui bahwa dalam komunitas ini, ada ekosistem yang juga tergabung ke dalamnya komponen-komponen tak hidup; pemerintah adalah komponen abiotik itu, yang dapat kita analogikan sebagai matahari atau air yang walaupun tak berada di dalam lingkungan masyarakat, namun mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Hal penting lain adalah bahwa dalam ekosistem, terdapat hubungan antarmakhluk, terkadang bersifat mutualisme (baik), terkadang bersifat parasitisme dan predator (buruk); hubungan antara pihak pertama dan kedua bisa harmonis dan juga bisa anarkis.

sebelum itu, saya ditanamkan nilai-nilai yang diawali dengan kata-kata “harus” dan “tidak boleh”. Nilai-nilai ini, seiring berjalannya kehidupan saya dari masa kanak-kanak menuju remaja, tertanam dan membatu di dalam pikiran saya, seakan-akan menjadi sebuah nilai mutlak positif yang tidak dapat disangkal. Beruntung bagi saya untuk tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan sebuah lingkungan yang kemudian memberi dukungan kepada saya untuk memandang dunia secara lebih global.

Ya, pendidikan awal sejak di lingkungan kanak-kanaklah yang mendasari pola pikir ini. Saya mengharapkan agar masyarakat mulai menghapus kebiasaan mengatakan “harus” dan “tidak boleh” kepada anak-anak seakan-akan mereka mutlak harus mengikuti semua hal yang dipercayai oleh orang dewasa, karena ini tidak lain adalah bentuk penjajahan pikiran yang mengakibatkan tidak berkembangnya logika sadar dari generasi penerus bangsa. Jalan ini, sangat diharapkan, akan menyembuhkan rasa takut dari pihak kedua, dan bahkan akan memunculkan banyak pihak-pihak pertama lainnya di masa depan.

### **Rasa Takut yang Dialami Pihak I**

Pihak satu: Samantha Smith, Harvey Milk, pemerintah Persemakmuran Polandia-Lithuania, Skeeter Phelan dalam film *The Help* atau Atticus dalam *To Kill a Mockingbird*,<sup>3</sup> Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. dan masih banyak lagi. Mereka adalah pencetus suatu pemikiran baru yang terkadang bertentangan dengan apa yang sudah mengakar pada pemahaman masyarakat banyak. Namun, mereka semua memiliki “keberanian” yang begitu tinggi yang bahkan tidak dapat dipatahkan oleh kebencian apapun yang mereka terima. Faktanya adalah bahwa semua yang berada di pihak pertama tentu memiliki pembencinya (*hater*) masing-masing.

---

3 Kedua karya tersebut bercerita tentang masa-masa terjadinya kejahatan apartheid; *The Help* bercerita mengenai seorang penulis kulit putih Skeeter Phelan yang mengungkapkan realita kehidupan yang buruk yang dialami oleh kulit hitam, sementara *To Kill a Mockingbird* mengisahkan seorang pengacara kulit putih Atticus dan anak-anaknya yang lugu yang sama-sama memperjuangkan hak seorang kulit hitam yang dituduh melakukan kekerasan terhadap seorang wanita kulit putih.

Smith dibenci oleh kalangan pendukung perang nuklir. Milk dibenci oleh lebih dari separuh penduduk dunia saat itu. Gandhi dibenci oleh masyarakat penentang bentuk demokrasi baru.

Ada satu bagian penting yang hilang dari daftar panjang pihak pertama itu: diri kita masing-masing. Sebagai pemuda, kebanyakan dari kita adalah orang yang memiliki ide dan gagasan yang benar-benar bertentangan dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kita memiliki sebuah pemikiran yang kita anggap baik namun kita memiliki sedikit nyali untuk menyampaikannya. Sebagai pemuda, banyak di antara kita yang menginginkan adanya persamaan hak lebih jauh antara laki-laki dan perempuan seperti yang sedang terjadi di belahan dunia lain, namun kita hanya dapat diam. Sebagai pemuda, banyak di antara kita yang ingin mengakhiri ketidakpedulian publik terhadap isu-isu diskriminasi, namun kita hanya bisa menunduk. Kenapa?

Karena kita “takut” bahwa suatu saat kita bisa saja didatangi dengan cacian, hujatan, ancaman, bahkan dengan senjata, oleh masyarakat tertentu yang tergabung ke dalam pihak kedua. Namun, kita perlu mengingat bahwa orang-orang besar yang saya sebutkan di pihak pertama di atas juga telah mengalami masalah-masalah tersebut.

Saya menyadari bahwa kebanyakan pihak pertama memang tumbuh di lingkungan demokratis, sehingga pendapatnya bisa didengar oleh banyak orang. Kebanyakan dari mereka mendapatkan perlindungan pemerintah, bahkan dunia, yang lebih sehingga suara mereka bisa tersampaikan dengan baik, dan terlindungi dari segala bentuk anarkisme. Tetapi saya optimis, dengan pemerintahan yang semakin baik, kita sebagai sebuah bangsa yang bercita-cita tinggi dalam membangun sebuah kehidupan demokrasi yang harmonis tentu bisa bangkit. Saya yakin bahwa seiring dengan perjuangan yang berkelanjutan, setiap individu akan dapat mengemukakan gagasan barunya masing-masing di hadapan jutaan penduduk Bumi Pertiwi lainnya.

### **Pihak Pemerintah: Belajar dari Sebuah Anekdote (Analogi) Lain**

Saya duduk di tengah pelajaran pendidikan kewarganegaraan berlangsung. Topik kami begitu hangat: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ibu Ina Rahayu, guru pendidikan kewarganegaraan yang mengajar kami selama tiga tahun, membuka diskusi kelas yang rutin dilakukan. Di tengah-tengah diskusi, beliau melontarkan pertanyaan yang begitu kontroversial. “Apakah koruptor harus dihukum mati?”

Enam belas tangan kanan terangkat, sambil berteriak “iya”, “tentu saja”, atau “pasti, Bu”. Saya tinggal sendiri, sambil akhirnya berkata “saya tidak setuju”. Saya mengemukakan alasan kemanusiaan bahwa saya sama sekali tidak setuju akan adanya hukuman mati terhadap kesalahan apapun. Saya menyampaikan bahwa menghukum pembunuh dengan pembunuhan lain adalah bentuk upaya yang konyol, yang malah, menurut saya, mendidik masyarakat bahwa “terkadang, membunuh seseorang itu adalah jalan yang terbaik”.

Saya menyampaikan pendapat saya dengan peluang akan ada satu siswa yang menyampaikan penolakan keras-keras terhadap pendapat saya, atau sekelompok siswa lain yang akan menuduh saya berada di pihak koruptor. Tetapi saya berani. Saya—pihak pertama—berani untuk berdiri dan mengemukakan pendapat saya di depan banyak siswa lain yang tidak sependapat. Pada akhirnya mereka paham dan menghargai apa yang saya coba sampaikan. Dalam kenyatannya, saya tidak sendiri; saya merasa aman dalam menyampaikan pendapat karena ada seorang guru yang siap menjunjung hak saya. Tanpa beliau, mungkin hal-hal yang ada dalam pikiran saya tadi terjadi dan menjatuhkan saya.

Begitu pula Smith dan Milk—dan banyak tokoh-tokoh lain yang pendapatnya bahkan dilindungi oleh dunia—yang juga dipayungi oleh pemerintahan yang menjunjung tinggi asas demokrasi.

Begitu pula kenyataan di negeri ini. Pemuda Indonesia sangat membutuhkan dukungan pemerintah dalam mengemukakan pendapat. Adanya perbedaan signifikan antara pandangan pihak satu dan pihak dua dapat dilunakkan dengan peran aktif pemerintah sendiri. Tapi, bukan berarti kita bisa terus-menerus beralasan bahwa

pemerintah tidak mendukung upaya kita. Karena, melalui tulisan ini saya juga ingin membuktikan bahwa kita bisa didengar, walaupun saya mengakui bahwa dalam kenyataan yang saya lihat saat ini, saya masih takut untuk terang-terangan melakukannya.

Melalui tulisan inilah saya mencoba melaksanakan budaya demokrasi itu sendiri. Dengan esai singkat ini jugalah saya membuktikan betapa pentingnya keberanian dalam menyampaikan pendapat. Bisa diingat ada beberapa ide-ide dan contoh-contoh yang masih tabu yang saya perbincangkan terlebih dahulu dalam tulisan ini (contohnya ketika saya menceritakan perjuangan Harvey Milk). Saya menyadari tulisan ini telah memberi wadah untuk meyalurkan suara saya. Karena itu, saya berharap pemuda-pemuda lain untuk ikut bersuara dengan caranya masing-masing: tulisan, aktivitas di masyarakat, organisasi sekolah, atau dalam bentuk hiburan seperti musik (seperti yang sering dilakukan Iwan Fals) dan teater.

### **Indonesia Baru, Pihak Pertama Baru**

Indonesia sudah mempraktikkan demokrasi yang utuh selama lebih dari limabelas tahun. Memang negara ini masih tergolong muda jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang sudah menerapkannya jauh ratusan tahun sebelumnya. Tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan penghalang untuk bangsa yang agung ini maju dan terus-menerus memperbaiki diri. Terlebih, kehidupan demokrasi Indonesia telah didukung oleh pemilihan umum yang sedang panas di kalangan seluruh lapisan masyarakat.

Sayamakin optimis. Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi, dan akan melanjutkan ke pada tahap yang lebih menentukan di bulan Juli nanti. Muncullah tokoh-tokoh muda “berani” yang telah didengar oleh rakyat. Hal ini adalah bentuk perubahan yang sangat baik, bahwa bentuk “ketakutan” itu perlahan-lahan memudar. Masyarakat pun juga sudah mulai menerima perbedaan yang ada.

Namun, saya tetap realistis. Indonesia masih mengalami masa transisi. Masyarakat masih banyak yang belum melek demokrasi, di antaranya adalah pihak kedua yang semakin ekstrem dalam

melakukan pergerakannya. Namun, Tuhan telah banyak memberkati kita dengan penuh keadilan bahwa seiring munculnya pesaing-pesaing budaya demokrasi, golongan yang mengusahakan terjadinya kehidupan berdemokrasi yang baik—pihak pertama—hadir bagaikan hujan dalam kemarau. Bagaimanapun, negara kita sedang berkembang menuju kebaikan, dan pemuda, terutama pihak pertama, adalah bagian dari perkembangan itu.

# BELAJAR DARI SELOKA ADAT KERINCI

KEARIFAN LOKAL  
MENUJU DEMOKRASI  
INDONESIA YANG BERADAB

Jessica Anzamar Sibarani  
SMAN 3 Kota Jambi

*Sembilan dih mulayu ngato,  
jangan-jangan,  
diasak karang setio,  
kalu diasak karang setio,  
tirantang sikandang bangun,  
tirantang sikandang pampeh,  
mencicak masuk,  
mengkarung masuk,  
hilang mati bubangun,  
hilang luko bupampeh,  
hilang kurik tirandam belang,  
rebahlah tiang tuo yang sebatang,  
kecutkan payung kembang sikaki,  
hanyutkan piagam, dst...*

Pusaka leluhur, warisan masa lalu sebagai identitas bangsa tergilas di negeri sendiri. Barangkali tak banyak yang memahami penggalan salah satu seloka adat Kerinci yang disebut *Larangan Sembilan Pasak*. Artinya adalah sembilan buah pepatah yang di dalamnya terkandung larangan yang wajib diingat. Jika larangan dilakukan maka akan menimbulkan bencana yang bisa menghancurkan bangsa dan negara karena kutukan *Sumpah Setih Karang Setio* atau sumpah kesetiakawanan sebutan para leluhur.

Pada seloka di atas dikatakan mengenai kutukan yang dapat terjadi jika tidak mengikuti sumpah *karang setio* yang tersebut dalam kalimat *terentang sikandang bangun, terentangs ikandang pampeh*, artinya saling membunuh, melukai, dan tidak ada hukuman bagi yang membunuh ataupun yang melukai. *Cicak masuk, mengkarung masuk* artinya terjadi saling menghasut, memfitnah, adu domba, dan masuklah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur karakter bangsa. *Hilang mati bubangun, hilang luka bupampeh* yaitu jika terjadi perang, luka, dan pembunuhan maka tidak ada lagi hukum yang berlaku. *Kurik terendam belang* artinya hilang keanekaragaman, kebersamaan dalam kekeluargaan. Justru yang muncul adalah mempertahankan etnis, golongan, suku, ras, agama dan pandangan masing-masing dalam suasana pertentangan dan persaingan. Jika hal ini terjadi maka *rebahlah tiang tuoyang sebatang* artinya rebahlah Sang Saka Merah Putih yang satu-satunya bendera pusaka bangsa dan negara kita sehingga muncul beribu-ribu bendera dengan membawa atribut dan simbol golongan masing-masing. Akhirnya *kecutkan payung kembang sekaki* yaitu tiada lagi arti dan makna Merah Putih payung Negara Kesatuan Republik Indonesia tempat kita berlindung dan bernaung. *Hanyutkan piagam* dalam arti kias adalah tiada lagi piagam, tiada lagi penghargaan, tiada lagi rasa bangga terhadap nusa dan bangsa Indonesia.

Apakah penggalan seloka adat itu sedang menunjuk keadaan negara kita saat ini? Mari bercermin.

Seloka adat Kerinci sebagai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang menyimpan pelajaran tentang nilai-nilai luhur karakter bangsa, salah satunya budaya demokrasi yang beradab. Di dalamnya

mengandung petuah sebagai pandangan falsafah hidup setiap warga negara. Sayangnya tak lagi terdengar kata-kata bijak itu. Mungkin generasi muda tidak lagi suka berpaling dan bercermin pada pusaka warisan budaya bangsa yang telah usang? Benarkah?

### **Carut Marut Budaya Demokrasi Kita**

Pada pesta demokrasi 2014, sebanyak 250 juta rakyat Indonesia calon pemilih yang sejujurnya sebagian besar bersikap apatis dan skeptis terhadap pemerintahan telah menyuarakan pilihannya pada calon legislatif dan sebentar lagi terhadap presiden meskipun hanya pada calon yang digadang-gadang sendiri oleh Partai Politik. Sikap hilangnya kepercayaan rakyat terhadap berlangsungnya pesta demokrasi dikarenakan kenyataannya memang sebagian besar wakil rakyat yang semula menebar janji surga akhirnya masuk daftar nama tersangka KPK. Semboyan *Holobis Kuntul Baris*, gotong royong untuk kepentingan bersama hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi dan golongan bukan kepentingan rakyat. Duduk manis di kursi DPR/DPRD sambil memainkan *gadget* namun tetap saja kepentingan umum terabaikan. Kemana harapan para tokoh nasional saat sidang *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan melindungi semua rakyatnya dengan adil, mufakat atau demokrasi? Belum lagi trauma rakyat terhadap tragedi Trisakti berdarah Mei 1998 dan tragedi Semanggi November 1998, yang hingga saat ini pelakunya masih berkeliaran, cermin dari demokrasi yang tak beradab. Kita telah melanggar Sumpah Setih Karang Setio. Kemanakah implementasi utuh kata demokrasi itu sendiri? Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fakta terlihat jelas bahwa pemerintahan memang berasal *dari* rakyat dan *oleh* rakyat. Namun setelah terpilih, justru bukan *untuk* menyejahterakan rakyat. Mau dibawa kemanakah budaya demokrasi kita?

Demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang bagaimana? Merata?

Dirasakan seluruh rakyat atau hanya kalangan tertentu? Kadang perlu melawan lupa. Mega Proyek Stadion Hambalang di Sentul Bogor atau Proyek Jalur Pantura, suatu contoh yang jelas bagaimana wakil rakyat menodai budaya demokrasi kita. Kesejahteraan rakyat merupakan cerminan budaya demokrasi dalam suatu negara dan itu bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Bukti lain. Bagaimana kita tahu kondisi demokrasi Indonesia saat ini? IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dalam penyusunan IDI ini, salah satu aspek demokrasi adalah kebijakan pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif, termasuk kebebasan dari ketidakadilan ekonomi, dan kebebasan dari ketidakpedulian pemerintah atau korupsi. Baru-baru ini TVOne pada 21 April 2014 mengabarkan berita mengejutkan. Kado ulang tahun Ketua BPK yang menjabat sejak 2009 adalah ditetapkannya beliau sebagai tersangka kasus korupsi permohonan pajak BCA. Setelah dihitung KPK ternyata harta kekayaan pribadi ketua BPK lebih dari 26 miliar rupiah, di luar logam mulia, benda seni, bangunan, dan tanah siap diusut. Sementara angka pengangguran masih tinggi dan penggusuran tanah warga kerap terjadi di sana-sini. Cukup jelas. Dari sumber *www.news.metrotvnews.com* angka IDI tiap provinsi di Indonesia dinyatakan kian merosot. Sekali lagi apa tindakan kita ketika budaya demokrasi sudah lari dari falsafah bangsa? Mengapa tidak kembali kepada kearifan lokal bangsa kita?

### **Seloka Adat Kerinci sebagai Kearifan Lokal**

Barangkali tak banyak di antara kita yang mengetahui di manakah letak Kerinci. Kerinci merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi ini terkenal dengan sebutan sekepal tanah surga. Secara geografis, Kerinci terletak pada pertemuan tiga provinsi yaitu Sumatera Barat (di sebelah utara dan barat), Jambi (sebelah utara dan timur), dan Bengkulu (sebelah selatan). Walaupun kekayaan sumber

daya alamnya seperti teh, kopi, dan kayu manis terkenal di dunia, kekayaan budayanya hampir pupus ditelan masa. Sebagai bagian dari masyarakat Melayu tua, Kerinci memiliki kearifan lokal yaitu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup, salah satunya adalah bagian dari sastra lisan yang disebut seloka. Seloka adalah pantun lama yang berisi kata-kata bijak yang sudah baku, berupa nasihat, pedoman hidup, dan bisa juga hukum adat yang telah berlaku dari generasi ke generasi dan biasanya tidak tertulis.

Cuplikan seloka tentang budaya demokrasi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara termasuk wakil rakyat kita. Sikap berkorban, yang pernah dimiliki oleh para nenek moyang leluhur kita, meskipun telah merdeka, tetapi sikap dan semangat patriotisme harus ada sebagaimana pepatah adat mengatakan:

*kudarat kuak budeguh,  
meniti batang rapudin,  
kerat-dikerat batang sikai,  
yang berat samo dipikul,  
yang ringan samo dijinjing,  
baru negeri dapat selesai,*

ke darat menguak semak belukar  
meniti batang pohon rapudin  
dipotong-potong batang pohon  
sikai  
yang berat sama dipikul,  
yang ringan sama dijinjing  
baru negeri dapat selesai.

Kehidupan demokrasi harus ditanamkan rasa keberanian, rela berkorban, cinta tanah air, kerja keras pantang menyerah, kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan dalam hal membangun nusa dan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Harusnya inilah sikap yang dikembangkan dalam jiwa setiap warga negara dalam budaya demokrasi kita.

Bagaimana menyikapi budaya demokrasi yang condong mementingkan diri sendiri? Coba kita simak seloka berikut "***bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat***". Seloka tersebut bermakna bahwa dalam suatu musyawarah hendaknya menampung aspirasi dari semua lapisan masyarakat dengan mengedepankan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Sedangkan seloka "***pergi dilepas, pulang ditunggu, rumah bertengganai,***

***kampung bertua, luak berpenghulu, alam beraja***” bermakna utusan masyarakat saat memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara bukan membawa misi pribadi, kelompok, golongan, partai ataupun atribut manapun juga. Sebagaimana seloka adat mengatakan ***“duduk adat tidak berbasa-basi, duduk serak tidak memandang, duduk tidak terpapas, tegak tidak tersundak, menjujung tidak, menggepit tidak, menjinjing juga tidak”***. Artinya wakil rakyat harus suci murni demi bangsa dan negara.

*Ado dih mulayu ngato  
Seperti hukum gandum  
Makin berisi makin bersusun  
Makin bernas makin bersatu  
Inilah hukum yang sebenar hukum  
Di sinilah kita ambil tiru dengan tureh,  
suri dan tauladan,  
Sejak dahulu sampai sekarang*

Seloka tersebut menyiratkan hakikat **hukum** yang harus kita tiru dan dilaksanakan dalam semua bentuk kehidupan demokrasi mulai dari masyarakat hingga ke lembaga tertinggi negara.

Seloka adat Kerinci barangkali hanyalah sebagian kecil saja dari ragam kearifan lokal warisan nenek moyang kita namun di dalamnya sarat dengan petuah, nasihat, petunjuk berupa kata-kata bijak termasuk tatanan budaya demokrasi yang sebenarnya yaitu demokrasi Pancasila yang beradab.

### **Ayo Menuju Demokrasi Indonesia yang Beradab**

Negeri ini bagai musafir yang mengadakan perjalanan panjang di tengah teriknya gurun, mencari sumber oasis yang tersedia melimpah. Mendambakan para wakil rakyat yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak mengutamakan kepentingan golongan. Sebaliknya, mampu mengayomi dan membuat rakyat sejahtera. Rakyat mengharapkan negara yang menunjukkan ciri-ciri demokrasi yang jelas dan bukan setengah-setengah. Kepastian adanya jaminan HAM

sesuai pasal 28 UUD 1945, perlakuan dan kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara dalam hukum sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945, hingga Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kapan sepenuhnya tercapai? Budaya demokrasi untuk memilih wakil rakyat telah dimulai sejak Indonesia merdeka Agustus 1945 dengan lahirnya Demokrasi Pancasila masa orde lama. Dilanjutkan demokrasi Pancasila masa orde baru, sempat nikmat sesaat, swasembada pangan, namun sayang praktik KKN mulai tumbuh, bahkan semakin subur saat demokrasi Pancasila era reformasi.

Cukup sudah penderitaan negeri ini. Bukan bentuk demokrasinya yang menjadi permasalahan namun hendaklah kita kembali kepada budaya masa lalu yaitu kearifan lokal yang merupakan ciri khas bangsa kita. Kembali kepada demokrasi yang beradab. Demokrasi Pancasila sesuai nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa yang tertanam kuat dalam kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia. Memang dalam hal ini penulis mengambil sekelumit contoh dari daerah Kerinci di Provinsi Jambi. Namun tentu masih banyak kearifan lokal dari berbagai daerah lainnya di Indonesia yang mencerminkan budaya demokrasi dengan satu tujuan yaitu menuju demokrasi Indonesia yang beradab.

*“...ado dih melayu ngato, putus tali balik kutambang...”*

Artinya:

*“...ada dih melayu mengatakan, putus tali kembali ke asalnya...”*

Sekali lagi seloka adat mengingatkan kita. Ketika kita kehilangan arah dan tujuan, kehilangan panduan, kehilangan makna atau kita terjebak dalam kebuntuan mengapa tidak kembali saja kepada nilai-nilai kearifan, warisan pusaka bangsa kita. Bukan alasan lagi untuk terlalu tua bagi kaum muda generasi bangsa kembali menyimak dan mempelajari kearifan lokal daerah masing-masing, demi Indonesia tercinta!



# KONSEPSI PASRAMAN *TAT TWAM ASI* VISUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM HIDUP BERASRAMA

I Wayan Juniartawan  
SMA Negeri Bali Mandara

*Hidup berhembus seperti angin, mengalir seperti air, berkobar seperti api. Hidup adalah mampu menegakkan rasa yang sejatinya untuk kepentingan bersama, antara aku, kamu, dan mereka.*

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, adalah sebuah peribahasa yang melekat dalam alur kehidupan masyarakat Indonesia. Peribahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini memiliki arti bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai adat-istiadat yang berbeda-beda. Hal ini, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara multikultural, yang sudah barang tentu memiliki berbagai perbedaan, baik dalam segi bahasa, sikap, tradisi, budaya, maupun ekonominya. Perbedaan ini sangat erat kaitannya dengan karakter masyarakat yang terdapat di dalamnya, salah satunya dapat disimak dalam budaya demokrasi di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang menyatakan sudah lama mengadopsi sistem demokrasi nyatanya belum mampu membudaya di masyarakat. Praktik demokrasi yang diketahui masyarakat Indonesia hanya sebatas pemilihan wakil-wakil di lembaga legislatif, serta pemilihan pemimpin-pemimpin mulai dari kepala desa yang barangkali sifatnya informal hingga pemilihan formal, seperti bupati, gubernur, dan presiden (Nurmayasari, 2014). Setelah itu, demokrasi seakan terkunci rapat dalam kotak tak terjamah, karena praktiknya tidak lagi dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, praktik kehidupan berdemokrasi yang ditunjukkan oleh para politisi dan pejabat publik masih identik dengan wilayah pragmatisme dan oportunisme. Terbukti dari jalannya pesta demokrasi yang masih mengandalkan sistem politik uang (*money politics*) melalui tim-tim sukses.

Dari hasil pantauan Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menyatakan bahwa sebanyak 33 persen TPS di 25 provinsi di Indonesia terjadi kecurangan politik uang. Modus yang digunakan pelaku, di antaranya dengan membagikan uang yang berkisar Rp 10.000 sampai Rp 200.000, barang (sembako, alat ibadah, pulsa, baju), hingga polis asuransi (*Kompas.com*, 2014). Bila dibandingkan dengan Pemilu di tahun sebelumnya, praktik politik uang Pemilu 2014 meningkat tajam. Berdasarkan catatan ICW, praktik politik uang pada Pemilu 2004 sebanyak 113 kasus, Pemilu 2009 sebanyak 150 kasus, dan Pemilu 2014 sebanyak 313 kasus (*Hukumonline.com*, 2014).

Pada dasarnya, suasana demokratis bisa dirasakan jika semua orang mampu mengelola keinginan dan ego masing-masing, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pada akhirnya semua perbedaan bisa dikompromikan dan bertemu di satu titik keputusan yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Tentunya, hal ini tidak mungkin diperoleh secara instan dan mendadak. Perlu proses yang panjang agar demokrasi bisa membudaya dalam masyarakat atau setidaknya dapat menjadi bagian dari nilai yang dipegang oleh masing-masing pribadi.

Di saat seperti ini, kaum mudalah yang seharusnya mampu menjadi garda dalam menegakkan kembali makna demokrasi. Menanamkan sikap demokratis sejak dini dapat dimulai dalam lingkup generasi muda yang akan menjadi penerus pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Untuk itu, penguatan wawasan akan budaya demokrasi bisa dijadikan pijakan awal bagi generasi muda saat ini.

### **Budaya Demokrasi dalam Perspektif Kaum Muda**

Orang yang awam akan politik lebih sering memandang demokrasi sebagai sistem yang menyediakan ruang untuk mengajukan pendapat, memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta memusyawarahkan pendapat-pendapat agar mencapai kesepakatan yang hakiki. Dalam dunia politik, rasanya demokrasi yang seperti itu sangat sulit ditemukan.

Sebagai seorang pelajar memang belum saatnya berbicara tentang politik, karena terfokus pada kancah pendidikan di samping pengetahuan yang dangkal akan dunia politik. Maka dari itu, jika ditelisik lebih dalam lagi budaya demokrasi sejatinya tidak hanya dapat diimplementasikan lima tahun sekali pada pesta demokrasi, namun juga dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.

Di dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan telah menyebutkan bahwa demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratein*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *cratein* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Dalam suatu sistem, organisasi, maupun instansi, pemerintahan tidak hanya dikendalikan oleh kelompok orang yang memiliki jabatan tertinggi, melainkan mampu menerima aspirasi rakyat yang menjalankan pemerintahan.

Pelaksanaan demokrasi itu sendiri akan menjadikannya sebagai salah satu budaya dalam masyarakat. Budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan

sebagai bentuk aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri (Sumedi, 2013).

Dalam perspektif generasi muda, khususnya para pelajar, praktik demokrasi yang kerap kali menjadi bingkai keseharian dapat ditemukan pada kegiatan pendidikan di sekolah. Salah satu contoh praktik budaya demokrasi adalah pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas dilakukan secara musyawarah, yaitu dipilih oleh anggota kelas tersebut. Jika belum mencapai mufakat, dilakukan *voting* yaitu pemungutan suara terbanyak terhadap calon ketua kelas. Selain pemilihan ketua kelas, budaya demokrasi dapat dilihat dari diskusi dalam rapat kelas, biasanya membahas piket kerja, pembentukan kelompok, dan perencanaan kegiatan tertentu.

Dalam realita, demokrasi untuk mencapai tujuan bersama masih belum optimal terjadi di kalangan generasi muda. Dalam pemilihan ketua kelas, sudah menjadi hal yang biasa bahwa beberapa anggota kelas tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon ketua kelas yang sesuai dengan keinginan hati, yang biasa dikenal golput (golongan putih). Di samping itu, dalam sesi diskusi, masing-masing orang memiliki latar belakang, pendapat, keinginan, dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga menyatukan pendapat dalam menemukan benang merah bukanlah perkara mudah, bahkan tidak jarang menuai konflik yang memanas.

Cara berdemokrasi seperti itu tentunya dapat menimbulkan sejumlah persoalan yang kompleks. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan cara-cara bijak untuk mengorganisasikan pemerintahan dan pengalaman praktis mengelola kepentingan publik sesuai tempat, waktu, dan kondisi masyarakat. Cara-cara bijak yang dimaksud biasanya ada dalam nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya demokrasi masyarakat setempat, yang merupakan keseluruhan pengalaman sosial budaya yang membentuk pola ciri kehidupan demokrasi masyarakat (Suacana, 2006).

Sebagian parameter yang menandakan budaya demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat adalah adanya rotasi kekuasaan, keterbukaan sistem perekrutan pimpinan tradisional,

keteraturan pergantian kedudukan pimpinan, penghargaan atas hak-hak krama, toleransi dalam perbedaan pendapat, dan akuntabilitas pemegang kekuasaan. Untuk itu, konsepsi pasraman *tat twam asi* dapat dijadikan cerminan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi.

### **Pasraman *Tat Twam Asi* dan Nilai-Nilai Demokrasi**

Lembaga pendidikan memang tidak luput dari perannya sebagai wadah dalam membentuk karakter generasi muda. Generasi muda merupakan fondasi utama pembangunan bangsa Indonesia yang perlu ditempa menjadi seseorang berjiwa demokratis, sehingga mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Dalam membudayakan demokrasi di lingkup sekolah dapat bercermin pada sekolah-sekolah di Indonesia, salah satunya SMA Negeri Bali Mandara.

SMA Negeri Bali Mandara merupakan salah satu sekolah di Bali yang memiliki keunggulan, seperti memiliki sistem *boarding school* atau sistem kehidupan berasrama dan implementasi kearifan budaya lokal. Implementasi kearifan budaya lokal yang dimaksud di sini adalah kegiatan dan sistem yang diterapkan baik di sekolah maupun asrama tetap berpegang teguh pada konsep-konsep luhur nenek moyang. Perpaduan antara sistem kehidupan berasrama dan implementasi kearifan budaya lokal ini melahirkan sebuah wadah pembentukan karakter, yaitu asrama dengan konsepsi pasraman *tat twam asi*.

Kata pasraman berasal dari kata “asrama” (sering ditulis dan dibaca *ashram*) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan (Yunedi, 2012). Proses belajar yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekadar lingkup teori, namun juga pada praktik langsungnya. Pendidikan pasraman menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, suka bekerja keras, jujur, pengendalian hawa nafsu, dan berjiwa demokratis.

Pasraman sebagai tempat bersosialisasi bagi peserta didik yang dipadukan dengan konsepsi kearifan lokal mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan visi yang dicanangkan. Pasraman *tat twam asi* merupakan konsepsi yang diterapkan di asrama SMA Negeri

Bali Mandara. *Tat twam asi* merupakan konsep kearifan budaya lokal di Bali yang mengandung arti bahwa mampu memposisikan diri pada orang lain. Dalam artian singkat, *tat twam asi* merupakan istilah yang menunjukkan bahwa “Aku adalah Kamu dan Kamu adalah Aku”.

Asrama dengan konsepsi *tat twam asi* mengandung nilai-nilai demokrasi yang sangat membantu siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan jiwa demokratis di sekolah. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung, yaitu pertama, kebebasan yang merupakan pedoman perilaku rakyat berdaulat. Nilai ini tercermin dalam kemampuan menghargai kebebasan orang lain dan memanfaatkan kebebasan diri sendiri secara bertanggung jawab. Kedua, nilai persamaan merupakan pedoman perilaku menghargai harkat dan martabat sesamanya. Ketiga, nilai solidaritas merupakan nilai yang dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi sesama, dan murah hati terhadap sesama umat manusia.

Keempat, nilai toleransi yang dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragaman, sikap saling percaya dan kesediaan untuk bekerja sama antarpihak yang berbeda-beda keyakinan, prinsip, pandangan, dan kepentingannya. Kelima, nilai menghormati kejujuran yang akan menumbuhkan integritas diri, sikap disiplin diri, dan kesetiaan pada aturan-aturan. Keenam, nilai menghormati penalaran yang dapat mendorong tumbuhnya keterbukaan pikiran, termasuk sikap skeptis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat ambiguitas kenyataan sosial dan politik. Ketujuh, nilai keadaban yang akan menjadi pedoman perilaku siswa untuk berdemokrasi yang serba santun, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghindari kekerasan seminimal mungkin dalam menyelesaikan persoalan bersama, dan kepatuhan dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Sikap-sikap ini diperlukan untuk memelihara pemerintah demokratis.

Nilai-nilai ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di asrama. Pertama, kegiatan *general cleaning* (kerja bakti) yang merupakan cerminan nilai solidaritas atau kebersamaan dan nilai kejujuran atas rasa tanggung jawab kepada tugas yang mereka miliki.

Siswa melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah setiap hari Sabtu sore. Kerja bakti ini melatih solidaritas antarsiswa, bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan asrama dan sekolah. Kedua, kegiatan pemilihan *head dorm*. Kegiatan ini melatih siswa untuk berdemokrasi, dan siswa yang terpilih menjadi *head dorm* atau ketua asrama akan terlatih untuk meningkatkan rasa keberanian memimpin.

Dalam memberikan kesempatan memimpin bagi semua siswa, SMA Negeri Bali Mandara juga menerapkan *house-system*. Semua siswa terbagi menjadi sembilan *house*, yang masing-masing *house* dibimbing oleh seorang *house-parent*. Dalam satu *house* tersebut akan mampu melatih anggotanya untuk hidup dalam keanekaragaman budaya dan karakter, karena siswa-siswinya yang berasal dari desa, kabupaten, dan kota yang berbeda-beda di Provinsi Bali.

Masing-masing *house* dipimpin oleh seorang ketua, yang terdiri dari *head boy* dan *head girl*. *Head boy* dan *head girl* ini dipilih secara musyawarah oleh anggota *house*. Kegiatan pemilihan ini mencerminkan nilai kebebasan dan persamaan. Siswa bebas memilih calon *head dorm*, *head boy*, dan *head girl*, serta menggunakan hak memilih dan dipilih karena pergantiannya dilakukan sebulan sekali.

Ketiga, kegiatan *sharing* (berbagi) yang dapat melatih siswa untuk jujur dan terbuka dengan warga asrama. Pada kegiatan ini semua siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan masalah yang mereka alami di asrama, sehingga yang lain dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di samping itu, siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran kepada seluruh warga asrama. Nilai demokrasi yang diperoleh dari kegiatan ini, yaitu persamaan dan kejujuran.

Kemudian kegiatan *movie night* (nonton bersama) yang merupakan cerminan dari nilai solidaritas. Pada kegiatan ini, peserta didik diberikan waktu luang untuk mengadakan acara nonton bersama di asrama pada hari Sabtu malam, namun tetap ada pengawasan dari kepala asrama. Kegiatan-kegiatan yang ada di asrama menunjukkan nilai-nilai luhur, yaitu *tat twam asi*. Nilai-nilai demokrasi tersebut dapat memicu timbulnya budaya baru di setiap kegiatan, yaitu TTM

“Tolong, Terima kasih, Menghargai, dan Maaf”. Budaya ini dapat membantu siswa dalam mengamalkan nilai keadaban dalam beretika.

Nilai-nilai demokrasi tersebut dapat diimplementasikan secara keseluruhan pada saat kegiatan *general assembly*, yaitu kegiatan rapat bulanan yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kegiatan ini biasanya membahas masalah yang terjadi dalam kehidupan siswa di sekolah dan asrama, kebijakan-kebijakan sekolah, serta aturan-aturan asrama dan sekolah yang perlu direvisi. Dalam konteks ini, siswa bebas mengutarakan pendapat, namun dengan etika keadaban. Ada nilai-nilai demokrasi berupa ajaran moral yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan *general assembly* ini, yaitu *de koh ngomong*, yang berarti jangan malas angkat bicara, yang merupakan nilai penguasaan diri dalam berbicara atau bahasa, *de ngaden awak bisa*, yang artinya jangan merasa diri paling bisa, hal ini merupakan nilai kontrol penonjolan diri, dan *de ngulurin indriya*, yang artinya jangan memaksakan kehendak, hal ini merupakan nilai pengendalian ambisi berkuasa.

Dengan adanya budaya demokrasi yang tersebut di atas bagi generasi muda, maka pendapat Abraham Lincoln tentang demokrasi yang kini disebut-sebut sebagai semboyan demokrasi di Indonesia akan tercapai, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, semboyan tersebut dapat berevolusi menjadi pemerintahan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa.

Penerapan konsep-konsep kearifan budaya lokal tidak hanya dapat dilihat dari pasraman *tat twam asi* yang diimplementasikan di asrama SMA Negeri Bali Mandara. Konsep-konsep kearifan budaya lokal juga mulai diadopsi oleh sekolah-sekolah lain, seperti konsepsi *Tri-Hita-Karana* yang diadopsi oleh SMA Negeri 6 Denpasar. Konsep ini merupakan landasan dalam menjalin hubungan secara vertikal dan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Selain itu, SMA Negeri 5 Denpasar juga mengadopsi konsep kearifan budaya lokal dalam menjaga tatanan lingkungan sekolah, yaitu konsepsi *Tri-Mandala*. Dengan konsep itu SMA Negeri 5 Denpasar berhasil mewakili Bali sebagai sekolah model Adi Wiyata di tingkat nasional

pada tahun 2007 (Pemprov Bali, 2007).

Dalam merevitalisasi budaya demokrasi di Indonesia, tentunya konsep-konsep kearifan lokal bisa dijadikan sebuah pedoman dalam berpikir dan bertindak. Sebagai salah satu contoh, konsep *tat twam asi* yang diterapkan di asrama SMA Negeri Bali Mandara dalam mewujudkan generasi muda yang berjiwa demokratis dapat diadopsi bagi khalayak luas. Dengan adanya pasraman *tat twam asi* ini, tentunya dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi bagi insan di dalamnya.

### Daftar Pustaka

- Hukumonline. 2014, "Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53563f475f480/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang>. Diakses 05 Mei 2014
- Prabowo, Dani. 2014, "Politik Uang di Pemilu 2014 Dinilai Lebih Vulgar." <http://www.nasional.kompas.com/read/2014/04/13/1801547/Politik.Uang.di.Pemilu.2014.Dinilai.Lebih.Vulgar>. Diakses tanggal 06 Mei 2014.
- Nurmayasari, Yusi, 2014, "Membangun Budaya Demokrasi." <http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/379/215323/membangun-budaya-demokrasi>. Diakses tanggal 05 Mei 2014.
- Suacana, Wayan Gede. 2006. "Belajar Budaya Demokrasi dari Masyarakat Desa." <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/6/5/o2.htm>. Diakses 06 Mei 2014.
- Sumedi, Pudjo. 2013. "Pengertian Budaya Demokrasi." <http://become-teacher.blogspot.com/2013/08/pengertian-budaya-demokrasi.html>. Diakses 06 Mei 2014.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2007. "SMAN 5 Denpasar Wakil Bali Dalam Adi Wiyata". <http://www.baliprov.go.id/SMAN-5-Denpasar-Wakili-Bali-Dalam-Adi-Wiyata>. Diakses 05 Mei 2014.
- Yunedi, Gusti Arya. 2012. "Aspek-Aspek Pasraman." <http://gustiaryayunedi.blogspot.com/2012/10/pasraman-2.html>. Diakses 05 Mei 2014.



# MENGATASI KONFLIK KOMUNAL MAHASISWA MAKASSAR MELALUI *TUDANG SIPULUNG*

**Rahmat Nur Hidayat**

SMAN 8 Bulukumba, Sulawesi Selatan

**P**ada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya setelah dijajah selama ratusan tahun oleh beberapa negara besar yang ada di dunia. Kemerdekaan ini tidak serta-merta diperoleh karena dibutuhkan perjuangan panjang oleh para pahlawan untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Tidak hanya dengan mengorbankan materi tetapi juga mengorbankan jiwa dan raga mereka. Sekilas jika kita kembali ke belakang untuk melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, maka kita akan menemukan banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Beberapa nilai tersebut antara lain, rasa persaudaraan, rela berkorban, pemberani, pantang menyerah, dan lain-lain. Di sisi lain yaitu saat perumusan dasar negara juga dapat ditemukan banyak nilai-nilai luhur. Perumusan dasar negara ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh banyak orang dengan cara melakukan musyawarah.

Tentunya di dalam musyawarah kita dapat melihat nilai-nilai tersebut, misalnya demokrasi memberikan kebebasan berpendapat kepada seseorang untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian toleransi atau menghargai pendapat orang lain. Serta menjunjung jiwa persatuan. Walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda tetapi mereka tetap menjunjung kebersamaan, yaitu sebagai warga negara yang dirampas haknya.

Beberapa hal tersebut yang sangat sulit ditemukan pada zaman sekarang, utamanya pada generasi muda. Generasi-generasi zaman sekarang sudah tidak lagi memperdulikan nilai-nilai tersebut. Mereka melakukan semua hal semaunya, tanpa berpikir ke depan dan rasional. Jiwa kebersamaan telah dinodai oleh banyaknya konflik-konflik antar-pemuda, utamanya mahasiswa. Pertikaian, perkelahian, cekcok, dan adu mulut telah mencemari nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dulu. Mereka sudah jarang bersama, berkelompok, serta berkumpul untuk bermusyawarah dan membicarakan masalah-masalah yang tengah mereka hadapi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai luhur telah luntur dan hampir punah disebabkan karena kemajuan zaman dan hilangnya kesadaran dari generasi muda untuk memupuk dan memeliharanya.

### **Apakah Demokrasi Itu?**

Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing lagi untuk didengar, banyak negara yang telah menerapkan prinsip ini untuk menyuarakan aspirasi mereka. Banyak definisi mengenai demokrasi dengan sudut pandang dan latar belakang yang berbeda namun dengan maksud dan tujuan yang hampir sama.

Demokrasi melambangkan suatu kebebasan kepada warga masyarakat untuk mengungkapkan, menjelaskan, menyatakan, menguakkan semua aspirasi dan pendapatnya. Di sisi lain, yaitu di ranah politik, demokrasi memiliki arti yaitu kebebasan masyarakat untuk menyuarakan dan memilih wakil-wakil mereka untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan supaya dapat lebih mensejahterakan hidup mereka.

Beberapa ahli juga mengutarakan pendapat mereka mengenai demokrasi. Di antaranya seperti Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Selain itu, ada pula C.F. Strong yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Baik itu secara umum maupun dari rana politik, kita dapat melihat nilai-nilai penting dari demokrasi yaitu kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat disertai dengan pertanggungjawaban terhadap pendapat tersebut.

### **Nilai-Nilai Luhur Telah Luntur**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang cukup besar yang ada di Indonesia. Ibukota dari provinsi ini adalah Makassar. Makassar merupakan daerah dengan jumlah penduduk cukup besar yang disebabkan karena urbanisasi penduduk dan juga menjadi daerah terbesar di Indonesia Timur. Di salah satu kabupaten dari provinsi inilah saya tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari. Bulukumba, itulah nama kabupaten sekaligus tempat kelahiran saya. Saya telah menjalani hidup di tempat ini selama lebih-kurang 16 tahun. Sejak saya telah mengerti seluk-beluk kehidupan, saya lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi saya. Salah satunya seperti memperhatikan berita-berita yang ada di media sosial yang membahas tentang kondisi yang ada di Indonesia khususnya mengenai keadaan di Sulawesi Selatan. Umumnya berita di televisi tentang Sulawesi Selatan bersifat positif, namun tidak jarang ada pula yang bersifat negatif dan cukup memprihatinkan bagi masyarakat Sulsel. Jika kita melihat kondisi Sulsel 6 tahun terakhir, maka akan ditemukan beberapa berita yang cukup memprihatinkan yang datang dari kalangan para

mahasiswa asal Makassar. Pemberitaan-pemberitaan itu menyangkut pertikaian antar-mahasiswa dari satu universitas dengan universitas lainnya. Seingat saya pertikaian itu menimbulkan banyak kerugian, mulai dari kerugian material sampai merusak fisik sang pelaku.

Dari beberapa artikel yang telah saya baca, banyak yang mengatakan bahwa penyebab dari pertikaian itu adalah konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan. Telah disebutkan di atas, bahwa Makassar merupakan salah satu kota dengan jumlah urbanisasi yang cukup tinggi, yang berarti kota ini memiliki banyak penduduk dengan etnis, agama, dan status yang berbeda. Para penduduk pendatang ini ternyata memiliki persentase yang cukup berimbang, yang kemudian meningkatkan gengsi dan sikap fanatisme kedaerahan, sehingga terkadang menjadi faktor penyebab konflik karena masing-masing kelompok merasa ingin menjadi kelompok mayoritas. Ada pula yang mengatakan bahwa penyebab dari pertikaian ini adalah karena adanya paradigma yang salah mengenai solidaritas. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertikaian tersebut awalnya disebabkan karena masalah perseorangan tetapi akhirnya menjadi masalah kelompok, hal semacam inilah yang merupakan imbas dari adanya kesalahan pandangan terhadap solidaritas. Memang sangat memprihatinkan mendengar tentang para mahasiswa yang berperilaku seperti itu. Bertindak dan melakukan sesuatu yang bersifat kriminal tanpa tujuan dan manfaat. Pemuda-pemudi zaman sekarang memang sangat jauh berbeda dengan para pemuda-pemudi yang ada di zaman dahulu. Pemuda-pemudi zaman dahulu sangat mengutamakan toleransi, sering berdemokrasi, menjunjung nasionalisme dan juga patriotisme. Dengan mengutamakan bekal itu, mereka berusaha membawa Indonesia menuju kedamaian dan posisi yang lebih baik.

Sekitar 6 tahun lalu, kejadian ini terjadi di kalangan mahasiswa antar-universitas namun seiring berjalannya waktu, ruang terjadinya konflik semakin menyempit. Pemberitaan 3 tahun terakhir tidak lagi membahas mengenai konflik mahasiswa antar-universitas tetapi berganti topik menjadi pertikaian mahasiswa sesama universitas. Menurut saya, kejadian ini bisa terjadi karena imbas dari globalisasi yang mempengaruhi jiwa dan pikiran generasi muda. Globalisasi telah

melunturkan nilai-nilai budaya yang sejatinya telah tertanam dalam jiwa generasi muda. Rasa persaudaraan, toleransi, dan sifat bekerja sama telah tergeser karena adanya kemajuan teknologi. Kebiasaan mengutak-ngatik komputer telah menumbuhkan jiwa individualisme, teknologi menumbuhkan rasa gengsi dan angkuh karena tidak ingin tersaingi sehingga tidak mau lagi menghargai orang lain sebab menganggap dirinya yang paling benar dan paling hebat, serba-serbi yang bersifat praktis dan instan telah meruntuhkan jiwa bekerja sama sebab semua hal bisa dengan cepat terselesaikan dengan rupiah.

Jika saja para generasi muda, mahasiswa khususnya tetap menanamkan nilai-nilai budaya dari Sulsel, kemungkinan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Banyak pesan-pesan orang terdahulu (*pappaseng to riolo*) yang dapat dijadikan pelajaran untuk kasus-kasus seperti ini. Namun, pesan-pesan itu tidak serta-merta dilontarkan begitu saja. Perlu dilakukan penyesuaian dan pendekatan terhadap para pelaku-pelaku kejahatan seperti ini.

### ***Tudang Sipulung*, Warisan Budaya Bugis-Makassar**

*Tudang Sipulung* jika dietimologikan berarti duduk bersama. Namun jika diistilahkan, *Tudang Sipulung* berarti salah satu wadah untuk mencari solusi di mana penduduk menuangkan aspirasinya dalam menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam konteks ini *Tudang Sipulung* merupakan bentuk demokrasi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Diperkirakan kebiasaan melakukan tradisi *Tudang Sipulung* sudah berada sejak masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-14. *Tudang Sipulung* berguna untuk menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, mulai dari masalah kecil hingga besar, dari masalah keluarga sampai masalah tata negara/kerajaan.

*Tudang Sipulung* memiliki dua sifat utama, yaitu resmi dan tidak resmi. *Tudang Sipulung* yang sifatnya tidak resmi hanya meliputi antar-keluarga saja, dan masalah yang biasanya dibicarakan hanya meliputi masalah-masalah keluarga tanpa melibatkan masalah umum. Topik pembicaraannya seperti acara pernikahan, lamaran, dan lain sebagainya. Sedangkan *Tudang Sipulung* yang sifatnya resmi

menyangkut masalah yang luas yaitu mengenai masyarakat dan daerah yang luas seperti kampung dan negara/kerajaan. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh warga masyarakat dan dipimpin oleh seseorang yang dituakan dalam suatu adat (*matoa*).

### **Peran Penting *Tudang Sipulung***

Seperti yang telah diutarakan bahwa *Tudang Sipulung* merupakan kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi. Sepintas memang hal ini terlihat sepele, namun jika dikaji lebih mendalam, maka akan ditemukan lebih banyak hal-hal penting mengenai hal tersebut. *Tudang Sipulung* tidak hanya memiliki nilai budaya di dalamnya, tetapi juga memiliki banyak nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, *Tudang Sipulung* menumbuhkan jiwa sosial pada masyarakat sebab dapat menjalin keakraban dan lambat laun nantinya tumbuh menjadi rasa persaudaraan. Selain itu, di dalam melaksanakan *Tudang Sipulung*, para peserta diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, unek-unek, dan permasalahan yang sedang dihadapi kemudian peserta yang lain mendengarkan dan menyaksikan aspirasi yang disampaikan tersebut. Dalam hal ini peserta yang mendengar dan menyaksikan hal tersebut bertoleransi dan juga menghargai apa yang disampaikan oleh orang yang berpendapat.

Namun amat disayangkan, karena kebiasaan ini sudah hampir punah termakan oleh waktu. Budaya kedaerahan seperti ini telah tergeser oleh kemajuan zaman, dan berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, untuk melestarikannya diperlukan peran penting dari berbagai pihak untuk kembali menanam dan memupuk kebiasaan dan warisan budaya ini. Mulai dari keluarga sampai ke masyarakat, dan bila perlu pemerintah juga harus turut serta untuk mengembangkannya. Sebab apalah arti pelestarian itu dilakukan jika tidak ada dukungan serta naungan dari pemerintah semuanya bisa saja menjadi nihil. Dalam hal ini pemerintah juga dapat memperbaiki dan membenahi generasi muda yang citra dan reputasinya telah dipandang buruk. Sebab

generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Diibaratkan negara adalah sebuah rumah, generasi muda adalah pondasinya, jika pondasinya tidak kuat niscaya rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh dan kuat.

Oleh karena memiliki banyak manfaat untuk kehidupan, *Tudang Sipulung* diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan pertikaian dan konflik komunal antar mahasiswa di Makassar. Melalui pertemuan dan pendekatan seperti ini semoga rasa persaudaraan dan saling menghargai perbedaan dapat tumbuh menjadi seperti sebuah pohon yang besar dan kuat. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, semoga saja kebiasaan ini dapat diterapkan di seluruh penjuru Nusantara. Sebab tidak hanya melahirkan perdamaian, dan juga persaudaraan, tetapi juga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur.

### **Daftar Pustaka**

- Makassarterkini.com. 2013. "Tudang Sipulung Prinsip Berdemokrasi Suku Bugis Makassar." <http://www.makassarterkini.com/index.php/sosok2-3/item/104-tudang-sipulung-prinsip-berdemokrasi-suku-bugis-makassar>. Diakses pada hari rabu, 13 mei 2014.
- Wikipedia.org. 2014. "Demokrasi." <http://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi>. Diakses 13 mei 2014.



# ***DUDUAK BARAPAK***

## **NILAI DASAR DEMOKRASI KHAS MINANGKABAU YANG TERLUPAKAN**

**Zihaul Abdi**  
SMAN 1 Padang

**D**emokrasi, secara harfiah, berarti pemerintahan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat (*demos*) sebagai pemegang kekuasaan (*kratos*) tertinggi. Dalam arti ini, secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Wattimena, 2012). Tentu saja, pada negara berpenduduk sedikit, demokrasi bisa berjalan secara langsung, di mana rakyat secara langsung menentukan apa yang baik untuk dirinya sendiri melalui mekanisme diskusi publik. Namun, di negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, rakyat diwakili oleh orang-orang yang duduk di dalam perwakilan rakyat, dan mereka inilah yang memastikan, bahwa seluruh kerja pemerintahan mengacu pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, demokrasi mengandaikan nilai-nilai moral tertentu di dalam praktiknya, seperti

nilai kejujuran, keadilan, keterwakilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi, dan bukan pada kepentingan sebagian kecil kelompok ataupun golongan yang ada di masyarakat. Ross Harrison, seorang pakar ketatanegaraan dari Universitas Goergetown pernah menuliskan dalam bukunya berjudul *democracy* bahwa setidaknya ada tiga nilai dasar demokrasi. Sebagaimana yang dikutip Reza A.A. Wattimena, pengajar Filsafat Politik Unika Widya Mandala Surabaya dalam laman pribadinya, yang menjadi nilai pertama adalah nilai pengetahuan. Semua kebijakan di dalam masyarakat demokratis haruslah berpijak pada pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan diterapkan juga dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang konteks yang ada. Artinya, tidak hanya data yang cocok dengan realitas, tetapi penerapan kebijakan-kebijakan publik di dalam masyarakat demokratis harus juga dengan cara-cara yang tepat. Untuk itu, pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan amatlah dibutuhkan. Nilai kedua adalah otonomi. Dalam bukunya tersebut, Harrison mendefinisikan otonomi sebagai nilai yang bersifat universal baik. Dalam arti, manusia, apapun latar belakangnya, adalah manusia yang utuh, jika ia mampu menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dengan demikian, otonomi adalah nilai yang baik, karena membiarkan manusia mengatur dirinya sendiri. Harrison juga menegaskan, bahwa di dalam masyarakat demokratis, nilai otonomi, yakni kemampuan manusia untuk mengatur dirinya sendiri, amatlah penting. Otonomi adalah salah satu nilai dasar dari demokrasi. Tanpa otonomi, tidak akan ada demokrasi. Nilai ketiga yang menurut Harrison, menjadi fondasi demokrasi adalah kesetaraan. Menurutnya, di masa Yunani Kuno dulu, kebebasan dan kesetaraan adalah ciri utama dari demokrasi. Dengan kata lain, semakin besar kebebasan dan kesetaraan di dalam suatu masyarakat, maka semakin demokratislah masyarakat tersebut. Di dalam sejarah perkembangan masyarakat manusia, dorongan untuk menciptakan masyarakat demokratis amatlah kuat, dan ini terlihat dari semakin besarnya tuntutan atas kesetaraan di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang politik. Bersama dengan status pengetahuan yang sah dan nilai otonomi, kesetaraan adalah fondasi ketiga dari demokrasi.

Di sisi lain, menurut Harrison, kesetaraan adalah suatu nilai politis. Sama seperti nilai politis lainnya, makna dari kata kesetaraan pun terus berubah, dan terus menjadi bagian dari perdebatan politik di masyarakat. Ada beragam tafsiran tentang apa makna sesungguhnya dari kesetaraan. Semua tafsiran tersebut mengklaim, bahwa mereka adalah fondasi yang terpenting dari demokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Harrison, kesetaraan memungkinkan terciptanya demokrasi, dan demokrasi, pada akhirnya, juga memperbesar atmosfer kesetaraan di masyarakat.

### **Memahami Kesetaraan dalam Demokrasi**

Secara konseptual, kita bisa langsung menerima, bahwa kesetaraan adalah ide dasar dari demokrasi, bahkan sudah melekat di dalam konsep demokrasi itu sendiri. Namun, di level penerapan, demokrasi pada akhirnya menjelma menjadi *voting*, dan suara terbanyaklah yang menentukan keputusan tertinggi. Dengan kata lain, demokrasi berakhir pada dominasi suara mayoritas atas suara minoritas. Hal ini tidak terelakkan, karena prosedur demokrasi niscaya akan mengantarkan seluruh proses pembuatan keputusan pada situasi semacam itu (Wattimena, 2012). Jika suara mayoritas selalu memenangkan perundingan secara mutlak, lalu di manakah kesetaraannya? Pengalaman sejarah menunjukkan, bahwa penerapan demokrasi dengan model seperti itu layak tawar menawar di pasar, tak sebaiknya menghasilkan kemenangan mutlak ataupun kekalahan mutlak. Jika suatu pihak kalah total dan pihak lain menang total, yang terjadi adalah suatu suasana berbahaya. Ada yang akan merasa ditipu dan diancam kelanjutan hidupnya. Sebaliknya ada yang bisa kehilangan batas. Permusuhan akan selalu disiapkan. Demokrasi akan kehilangan arti, hidup bersahaja dalam bingkai demokrasi hanya akan menjadi omong kosong belaka (Mohamad, 1982). Tidak berlebihan apabila Yudi Latief (2013) menyebutkan demokrasi yang tengah dikembangkan di tanah air dinilai belum melahirkan kesetaraan dan kesejahteraan. Demokrasi harusnya diletakkan sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bukan malah melahirkan kesenjangan. Jika demokrasi terus menerus diterapkan dalam tataran

prosedural semata, maka kesejahteraan yang terlahir dari kesetaraan dalam berdemokrasi belum akan terwujud secara nyata. Demokrasi harus diterapkan dalam tataran substansial yang selama ini hanya menjadi ekspektasi rakyat belaka.

### ***Duduak Barapak dan Demokrasi***

Salah satu produk budaya Minangkabau yang menonjol ialah sikap demokratis pada masyarakatnya. Sikap demokratis pada masyarakat Minang disebabkan karena sistem pemerintahan Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom, di mana pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Hal ini terdapat dalam pernyataan adat yang mengatakan bahwa *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*.<sup>1</sup> Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid pernah mengafirmasi adanya demokrasi Minang dalam budaya politik Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, ditengarai berasal dari semangat demokrasi Minangkabau, yang mana rakyat atau masyarakatnya hidup di tengah-tengah permusyawaratan yang terwakilkan (Anonim dalam Wikipedia, 2011). Membaca Minangkabau dalam perspektif keberagaman (plural) budaya pada saat ini dipandang sangat penting. Masyarakat Minangkabau dalam perspektif kultural dan historistiknya dengan pelbagai elemen dan institusi sosial yang dimilikinya, telah mampu menyelaraskan sekaligus mengembangkan prinsip demokrasi budaya. Kultur Minangkabau dan masyarakat pendukungnya yang terbuka menerima keberagaman, berkontribusi besar pada perjalanan bangsa ini. Tapi itu dulu. Kini, meruyak dan menyubur gagasan dan wacana di tengah masyarakat Minang yang justru kontraproduktif dengan semangat prinsip demokrasi budaya dan penghormatan pada keberagaman (Azwar, 2014).

Dalam tatanan kultural Minangkabau, ada yang disebut *duduak barapak*. *Duduak barapak* dalam kehidupan sosial Minangkabau merupakan salah satu pola dalam pengambilan keputusan dengan

---

1 Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat

cara *lamak di awak katuju di urang*.<sup>2</sup> Dalam *duduak barapak* ini, semua pihak dihadirkan dalam posisi setara. *Duduak barapak* merupakan suatu kebiasaan masyarakat Minangkabau yang kini berangsur-angsur pudar. *Duduak barapak* adalah tradisi duduk bersama dalam sebuah ruangan atau tempat yang telah ditentukan. *Duduak barapak* biasanya dilakukan untuk berunding, bermusyawarah, dan memutuskan sebuah perkara dalam kehidupan bermasyarakat. Duduk dalam *duduak barapak* untuk laki-laki adalah bersila (*baselo*) dan bersimpuh (*basimpuah*) bagi perempuan serta membentuk lingkaran. *Duduak barapak* kerap dihadiri setiap golongan yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat di daerah tertentu (Azwar, 2014). Dalam *duduak barapak* semua golongan diposisikan setara. Dialektika perkembangan dinamis dalam *duduak barapak* ini adalah *duduak samo randah, tagak samo tinggi*.<sup>3</sup> Artinya, tidak ada golongan yang diistimewakan atau ditinggikan. Tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Memang terdengar sederhana, namun jelas *duduak barapak* tidak sesempit itu.

Dalam *duduak barapak*, semua golongan memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama. Pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin semua memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta menyampaikan kegendahannya dalam sebuah permasalahan. *Duduak barapak* adalah implementasi nyata dari musyawarah yang dipelajari pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) semasa Sekolah Dasar dahulu. *Duduak barapak* mengedepankan semangat saling menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, serta berlapang dada.

*Duduak barapak* tidak mengenal *voting* atau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Karena pada dasarnya, sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak berarti memaksakan kehendak kaum mayoritas pada kaum minoritas yang jelas-jelas bukan merupakan prinsip dari musyawarah itu

2 Yang enak menurut kita, harus juga enak menurut orang lain. Konsep *lamak di awak katuju di urang* yang dianut masyarakat Minangkabau mengandung filosofi yang sangat dalam, penuh toleransi, solidaritas, dan mengikuti aturan yang berlaku.

3 Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

sendiri. Pengambilan keputusan ala *duduak barapak* berkiblat pada pertimbangan yang matang dan pengalaman yang sudah-sudah. Hal ini tertuang pada kalimat *mancaliak tuah ka nan manang, manauladan ka nan baiak, alua samo di turuik, jalan samo di tampuah, adat samo diisi, limbago samo di tuang, nan batiru batauladan, kalau maniru ka nan elok, kalau kamancontoh kanan bana*, yang maknanya, apabila ingin mengambil sebuah keputusan, maka teladanilah pada pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Oleh karena itu, dengan model pengambilan keputusan seperti ini, siapapun bisa menerima keputusan yang diambil tanpa perlu memaksakan kehendak ataupun terpaksa mengikuti keputusan yang didasarkan pada suara kaum mayoritas. *Duduak barapak* sebagai tradisi yang egaliter jelas dapat menyatukan pemerintah dan rakyatnya. Demokrasi yang didasarkan pada suara rakyat akan lebih mudah terwujud dikarenakan kegundahan, kegelisahan, serta keluhan rakyat bisa langsung didengarkan oleh pemerintah. Namun, implementasinya dalam negara demokrasi yang memiliki jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas seperti Indonesia, tatap muka antara rakyat dan pemerintah akan sulit terwujud. Oleh karena itulah, Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung dengan menggunakan lembaga perwakilan sebagai penyambung lidah rakyat. Meskipun demikian, untuk tingkat kota atau kabupaten, *duduak barapak* akan sangat mungkin dilaksanakan mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang tak terlalu besar. Kegunaan/keberhasilan *duduak barapak* dalam menyalurkan suara rakyat pada pemerintah tak perlu dipertanyakan lagi. Di kota Padang, tempat di mana istilah *duduak barapak* itu dilahirkan, *duduak barapak* kembali menampakkan eksistensinya. Baru-baru ini, pemuka adat Minangkabau menyatakan siap memfasilitasi *duduak barapak* antara warga yang menolak pembangunan Superblok Lippo Group di Padang dengan jajaran pemerintah kota (*Padang Eskpres*, 14 Januari 2014). Padang, yang tak lagi menganut sistem kenagarian layaknya kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat membuktikan bahwa *duduak barapak* tidak hanya bisa diterapkan di wilayah yang kecil seperti desa dan *nagari*<sup>4</sup> saja.

---

4 Sebutan daerah setingkat kecamatan di Minangkabau

Namun, *duduak barapak* juga bisa dipraktikkan dalam cakupan yang lebih luas. Tradisi yang terkesan sudah ditinggalkan ini, sesungguhnya mengandung seluruh elemen dan nilai dasar demokrasi yang dikemukakan oleh Ros Harrison. Dalam *duduak barapak*, keputusan diambil berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah serta spekulasi di masa datang merupakan implementasi dari nilai dasar pertama, yakni pengetahuan. *Duduak barapak* yang lebih mungkin diwujudkan dalam cakupan wilayah yang kecil membuktikan bahwa demokrasi membutuhkan otonomi yang merupakan nilai dasar demokrasi yang kedua. Kesetaraan, nilai dasar demokrasi ketiga yang dianggap sebagai fondasinya demokrasi ini sungguh telah tertuang dalam kebiasaan *duduak barapak*. Menyetarakan setiap golongan dalam pengambilan keputusan serta tidak mengutamakan suara mayoritas merupakan langkah mangkus untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi.

### **Mengembalikan *Duduak Barapak* yang Terlupakan**

Dibalik kegagalan pemerintah dalam mengelola demokrasi di nusantara, masih tersisa sebangkah harapan dari *duduak barapak* yang selama ini masih terus menggeliat di nagari-nagari Minangkabau. *Duduak barapak*, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, memang mangkus untuk membina demokrasi secara bijak. *Duduak barapak* berikut nilai-nilanya harus dibumikan secara masif serta diwujudkan ke dalam skala yang lebih besar, yakni skala berbangsa dan bernegara. Untuk mengembalikan dan membumikan nilai-nilai demokrasi yang ada di balik *duduak barapak* ini dapat ditempuh dengan (1) membiasakan pelajar di seluruh penjuru negeri untuk bermusyawarah dengan cara *duduak barapak*. Dengan cara ini, semangat bermusyawarah ala *duduak barapak* yang mengedepankan prinsip menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak akan semakin melekat pada tiap-tiap sanubari generasi muda bangsa ini. Cara ini juga dapat diartikan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan demokrasi tanah air. Dengan dibiasakannya *duduak barapak* dalam bermusyawarah pada kalangan pelajar, maka diharapkan akan menimbulkan kesadaran kolektif untuk dapat membina demokrasi

dengan lebih bijak. Atau dengan (2) mengamalkan nilai-nilai yang ada dibalik *duduak barapak* pada taraf berbangsa dan negara. Tidak perlu membayangkan suasana *duduak barapak* dengan duduk melingkar di lantai sebuah ruangan, namun selama musyawarah dilandasi nilai dasar demokrasi yang terkandung dalam *duduak barapak*, maka mimpi bangsa ini untuk mencapai demokrasi dalam tataran substansial akan terwujud. *Duduak barapak* hendaknya bukan hanya menjadi wacana mati yang makin dilupakan, namun *duduak barapak* harus diwujudkan dengan langkah-langkah pasti. Bangsa ini jelas belum terlambat untuk melakukan semua itu. Jika *duduak barapak* bisa mewujudkan demokrasi yang baik di nagari-nagari di Minangkabau, maka mewujudkan demokrasi yang baik bersama *duduak barapak* pada taraf nasional merupakan sebuah keniscayaan. *Duduak barapak*, sekali lagi harus dibumikan secara masif, semangat musyawarah khas *duduak barapak* harus mulai ditularkan pada setiap daerah di bumi pertiwi demi terciptanya demokrasi yang melahirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

### Daftar Pustaka

- Wikipedia.org. 2011. "*Budaya Minangkabau*". [http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya\\_Minangkabau](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Minangkabau). Diakses 16 Mei. Azwar,
- Nasrul. 2014. "Melipat Dua Minangkabau". <http://www.mantagibaru.blogspot.com/2014-01-melipat-dua-minangkabau.html>. Diakses 16 Mei 2014.
- Harrison, Ros. 1993. *Democracy*. London: Routledge.
- Mohamad, Goenawan. 1982. *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wattimena, Reza A.A. 2012. *Filsafat Politik untuk Indonesia*. Surabaya: Pustakamas.
- Wattimena, Reza A.A. 2012. "Nilai-nilai Dasar Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis", <http://www.rumahfilsafat.com/2012/07/21/nilai-nilai-dasar-demokrasi-sebuah-telaah-filosofis/>. Diakses 16 Mei 2013.

# ELEGI BUDAYA *SIRI' NA PACCE*

## DALAM RANAH DEMOKRASI DI *BUTTA PANRITA LOPI*

Rifaldy Fajar  
SMA Negeri 1 Bulukumba

*"Nakko de' siri'mu engka mussa pessemu"*

(Jika tak punya malu, paling tidak punya rasa solidaritas sosial)

- Pepatah Bugis

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya, dengan iringan khazanah budaya, keragaman adat istiadat, ragam bahasa, dan keindahan alam yang terbentang di seluruh pelosok negeri. Sebagai orang Indonesia yang lahir, besar, dan bersekolah di Indonesia, tentunya saya sangat mencintai negeri ini. Banyak alasan mengapa cinta saya begitu besar untuk Indonesia. Pertama, di negeri ini saya dilahirkan, dibesarkan dengan kasih sayang, mendapatkan ilmu dan didikan hingga dewasa seperti saat ini. Kedua, Indonesia kaya akan seni dan budaya yang menandakan kekayaan budaya bangsa yang

bernilai dan menjadi identitas tersendiri. Alasan-alasan tersebut adalah beberapa hal yang membuat saya, kita bangsa Indonesia, dan bahkan bangsa lain pun mengakui kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Saya dan juga bangsa Indonesia lainnya patutlah berbangga dengan segala hal yang ada di negeri ini, Indonesia.

### **Dilema Demokrasi**

Rasa cinta itu tidaklah menutupi sisi lain, seperti beragam masalah yang masih menggeluti Indonesia. Pada kondisi yang berbeda, ada hal yang membuat saya kecewa dan masalah ini senantiasa berkecamuk dalam pikiran dan sanubari. Salah satunya adalah potret sistem demokrasi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia saat ini telah menjelma sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekaligus negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 1999, 2004, 2009 serta tahun 2014 yang baru saja berlangsung (pemilu legislatif), secara demokratis menjadi bentuk penegasan sikap bangsa Indonesia untuk memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Meski begitu, harus pula diakui setelah lebih dari 14 tahun berpaling dari rezim otoritarianisme, eksistensi demokrasi di Indonesia ternyata belum banyak memberi arti. Demokrasi seakan hanya menjadi konsumsi sekelompok elite politik. Apa yang ada di benak sebagian besar elite politik kita bukanlah tentang bagaimana cara menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan justru kapan dan bagaimana cara merebut, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan.

Indonesia sebagai *negara kepulauan* terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, bahkan menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Indonesia memiliki 1.128 suku yang tersebar di Indonesia, turut memberi ruang terhadap dinamika pelaksanaan demokrasi di seluruh wilayah negeri yang tidaklah mudah. Kondisi geografis di setiap wilayah yang berbeda, tentu disertai dengan budaya masyarakat yang berbeda pula. Menyikapi pelaksanaan demokrasi dalam kaitannya dengan budaya, tentu kita tidak akan menemukan hal yang begitu sinkron. Namun, dalam prinsip pelaksanaan demokrasi itu sendiri, budaya telah menjadi darah dalam dasar pelaksanaannya. Dalam

artian tersebut, budaya sebagai dasar dalam pelaksanaan demokrasi bukanlah tentang budaya daerah masing-masing seperti tarian, alat musik, baju adat, makanan khas, hingga rumah adat daerah, namun, yang menjadi landasan kuat dan utama adalah budaya moral atau yang biasa disebut sebagai kearifan lokal dalam setiap daerah yang berada di Indonesia.

Bercermin pada realita hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia merasa prihatin bahkan malu dengan kenyataan pelaksanaan sistem demokrasi yang semakin carut marut. Budaya dan nilai kearifan lokal yang hampir menaungi seluruh wilayah Indonesia, terasa jauh dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pelaksanaan demokrasi yang ada sekarang ini. Sistem demokrasi yang berlangsung secara nasional tentunya tidak akan lepas dari cara daerah tertentu untuk menunjukkan betapa pentingnya kekuatan nilai moral atau nilai kearifan lokal untuk ikut membangun pelaksanaan sistem dan tata kehidupan yang lebih beradab, selaras, dan bermanfaat.

Sebagai contoh, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi wakil perjuangan setiap rakyat seakan-akan tidak memiliki harga diri dan rasa malu dalam menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan sebagai bagian dari tanggung jawab dan sikap amanah. *Money politic, corruption, violence* adalah segelintir sapaan yang kerap menghiasi jagad para pemangku kuasa. Keadaan demikian juga menjadi penanda krisis moral yang terus menjalar dan tertanam. Inkonsistensi terhadap penerapan integritas diri, karakter, hingga budaya malu tentu akan berdampak negatif terhadap pola interaksi seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi lainnya adalah terbangunnya sikap kewajaran (menganggap bisa saja) setiap hal yang salah, keliru, bahkan menyimpang, sebagai bagian dari proses kehidupan yang alami dan dianggap benar menurut pandangan subjektivitas tertentu, walau pada kenyataannya, sangatlah bertentangan dan melanggar aturan, hukum, dan norma yang berlaku secara umum.

### *Siri' Na Pacce*

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah kearifan lokal yang telah dipegang teguh selama ratusan tahun silam hingga sekarang ini atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan yaitu *Siri' Na Pacce*. *Siri' Na Pacce* merupakan prinsip hidup bagi suku Makassar. *Siri'* dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau memperkosa harga dirinya atau biasa juga disebut dengan rasa malu, sedangkan *Pacce* dipakai untuk membantu sesama anggota masyarakat yang berada dalam penderitaan. Sering kita dengar ungkapan suku Makassar yang berbunyi "*Punna tena siriknu, paccenu seng paknia*" (kalau tidak ada *Siri'*-mu, *Pacce*-lah yang kau pegang teguh). Apabila *Siri' Na Pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial, dan hanya mau menang sendiri.

Hidup di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan tentunya menjadi hal yang sangat patut saya syukuri karena terdapat begitu banyak kearifan lokal yang sangat saya kagumi. Bahkan saat saya *searching* di situs pencarian terbesar *google* dengan kata kunci "budaya malu diikuti nama provinsi lain", maka sama sekali tidak menjelaskan secara detail kearifan lokal budaya daerah yang saya cari. Bukan maksud untuk mendiskriminasikan daerah lain, namun ketika saya menuliskan kata kunci "Budaya Malu Sulawesi Selatan", maka begitu banyak sumber yang menjelaskan budaya kearifan lokal *Siri' Na Pacce*. Hal inilah yang membuat saya semakin terkesima dengan tingginya penghargaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap budaya *Siri' Na Pacce*. Salah satu kabupaten yang hingga saat ini masih berpegang teguh pada budaya *Siri' Na Pacce* adalah Kabupaten Bulukumba atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Butta Panrita Lopi*" yang artinya tanah asal para pelaut ulung. Kabupaten di mana saya dibesarkan yang hingga kini dan selamanya menjadi tempat yang paling saya cintai.

Kabupaten Bulukumba atau *Butta Panrita Lopi* adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi Budaya *Siri'* (malu) yang merupakan unsur prinsipil dalam diri mereka. *Siri'* adalah pandangan hidup yang

mengandung etik perbedaan antara manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri dan kehormatan yang melekat pada manusia dan mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga manusia dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut.

Bagi seorang pemimpin, semua perbuatan dan tugas yang dilaksanakan akan ada akhirnya. Untuk itu, selama menjadi pejabat jangan pernah melupakan yang namanya harga diri. Karenanya, di dalam menempatkan pejabat di Kabupaten Bulukumba seharusnya didasari atas pertimbangan keahlian dan kompetensi, bukan nepotisme. Bulukumba yang kental dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, menjadikan seorang pemimpin harus ekstra hati-hati. Sebab tidak jarang pejabat sering mengambil kebijakan yang tak sejalan dengan aturan karena kepentingan keluarga. Hal ini berpotensi mengantarkan pejabat bersangkutan pada hal-hal yang tidak benar. Idealnya, pejabat haruslah mempunyai prinsip dan tidak boleh disakiti, karena di Kabupaten Bulukumba, budaya malu masih begitu kental dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Kuatnya hubungan sesama warga secara nyata menunjukkan tingginya apresiasi dan penerapan budaya *Siri' Na Pacce* yang masih sangat kental. Senantiasa menjaga nama baik, saling memberi dan membantu satu sama lain adalah bentuk-bentuk dalam mempertahankan nilai *Siri' Na Pacce*.

Semakin sulitnya menjaga eksistensi nilai kearifan lokal seperti *Siri' Na Pacce* tentu bukanlah pekerjaan mudah. Selain masih adanya kepercayaan masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai tersebut, juga tidaklah menjadi jaminan bahwa masyarakat akan sepenuhnya patuh terhadap nilai yang berlaku. Misalnya saja, tempat saya menjadi pemilih pemula rata-rata yang menjadi panitianya adalah keluarga dari sang pembagi kertas pemilih tersebut. Dalam hati, saya pun ingin turut serta menjadi saksi, namun saya menyadari bahwa orang tersebut bebas menentukan siapa yang berhak mengambil bagian dalam pemilihan umum tersebut. Saya pun menyadari bahwa saya masih berstatus sebagai pemilih pemula dan sebaiknya menjalankan

tugas saya sebagai pemilih saja. Tetapi, kekesalan saya jatuh pada tidak adanya rasa malu dari mereka dengan melakukan nepotisme terhadap kegiatan akbar lima tahunan ini.

### ***Siri' Na Pacce* di Kancah Demokrasi**

Demokrasi di Kabupaten Bulukumba pada kenyataannya menyisakan satu sisi kegelisahan tentang pudar bahkan hilangnya nilai *Siri' Na Pacce*, baik pemerintah maupun masyarakat setiap perhelatan demokrasi itu berlangsung. Kita bisa melihat bahwa begitu tingginya apresiasi atas nilai-nilai yang terkandung dalam *Siri' Na Pacce*, namun, seketika terlihat surut kala pesta demokrasi yang menjadi kompetisi untuk memilih dengan baik para calon pemimpin, seolah diabaikan begitu saja. Hal ini dapat ditengarai dari banyak faktor. Bukan rahasia umum lagi, jika demokrasi dalam hal ini adalah pemilu, identik dengan politik uang, nepotisme, bahkan kecurangan. Jauh dari makna proses demokrasi itu sendiri.

Aktualisasi penerapan nilai *Siri' Na Pacce* dalam ranah demokrasi perlahan luntur bahkan hilang seiring dengan banyaknya pelanggaran, kecurangan, kebohongan dibalik pelaksanaan demokrasi seperti politik uang, nepotisme, sampai pada praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan makna dari nilai *Siri' Na Pacce* itu sendiri. Fenomena ini adalah bukti nyata krisis moral yang salah satunya adalah pudarnya sifat malu atau harga diri sehingga tidak adanya rasa kasihan terhadap rakyat yang banyak menghinggapi para pemimpin maupun calon pemimpin saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh siswa di salah satu sekolah di Kabupaten Bulukumba, Sri Septy Arista Yufeny, pada tahun 2011 menggambarkan bahwa 93,18 persen atau 41 orang responden mengetahui dengan jelas arti dan hakikat Budaya *Siri'*, 6,82 persen atau 3 orang responden ragu-ragu akan pengetahuannya mengenai arti dan hakikat Budaya *Siri'*. Artinya, tingkat pengetahuan aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif termasuk tinggi. Pengetahuan teoritis responden yang tinggi tersebut seharusnya berimbas pada pengaplikasian nilai-nilai

*Siri'* dalam kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain teori sudah seharusnya berbanding lurus dengan praktik. Namun realitanya, ini sama sekali jauh berbanding terbalik dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Kita harus menyadari bahwa sebuah ilmu tidak akan ada gunanya tanpa sebuah praktik dari ilmu itu sendiri.

*Siri' Na Pacce* adalah sesuatu yang sangat diagung-agungkan dalam masyarakat Bugis-Makassar dan masyarakat lainnya di Sulawesi Selatan. Sebuah pepatah Bugis mengatakan bahwa *Siri'mi Narituo* yang maknanya adalah bahwa “kita dapat bertahan hidup karena adanya perasaan malu”. Oleh karena itu, budaya ini telah menjadi inti dari kebudayaan di Sulawesi Selatan. Budaya ini juga telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam menempuh kehidupan mereka saat ini seakan-akan terkikis secara perlahan-lahan karena demokrasi itu sendiri. Demokrasi pula yang telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan trauma terhadap setiap wakil rakyat yang seharusnya mampu meningkatkan potensi kebahagiaan dalam setiap kehidupan masyarakat.

Fakta lain akibat melunturnya *Siri' Na Pacce* adalah banyaknya terdapat anggota legislatif dan eksekutif yang terbukti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai contoh, kasus korupsi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang dikenai pidana penjara selama 1 tahun. Kasus korupsi Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang dikenai pidana penjara 3 tahun. Kasus lainnya adalah kasus korupsi PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Bulukumba menyeret anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Partai Demokrat dan Pengadilan Negeri Bulukumba sudah memastikan kasus korupsi senilai Rp 300 juta ini dikenai pidana penjara selama 1 tahun. Sangat disayangkan, budaya *Siri'* (malu) yang dipegang erat oleh masyarakat Bugis-Makassar (Bulukumba) terindikasi merosot akibat banyaknya kasus korupsi di Kabupaten Bulukumba. Para koruptor yang juga adalah pejabat pemerintahan, diasumsikan tidak lagi memegang teguh budaya *Siri'* karena terbukti menyelewengkan uang rakyat, namun masih berkeinginan untuk menjabat. Salah satu contoh yang terjadi yaitu mantan ketua DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2004-2009 yang terbukti korupsi

mencalonkan diri sebagai Bupati Bulukumba dan memperoleh suara sebanyak 3,37%.

Sisi lain dari dampak demokrasi di *Butta Panrita Lopi* yang sangat tidak sesuai dengan *Siri' Na Pacce* adalah menjelang pemilihan umum di mana sang calon legislatif yang akan duduk menjadi wakil rakyat senantiasa melakukan serangan fajar di kala pemilihan umum berlangsung beberapa hari lagi. Mereka gencar melakukan hal itu tanpa diketahui oleh pengawas pemilu. Kita seharusnya mampu melihat sebuah kenyataan dan menganalisis secara mendalam bahwa calon legislatif yang seperti itu adalah bibit-bibit untuk melakukan tindakan yang buruk dalam masa kepemimpinannya nanti. Ketika mereka belum menjabat, kecurangan untuk mencapai apa yang mereka mau begitu saja tanpa memandang cara yang mereka lakukan adalah halal atau bahkan haram dan lebih buruknya lagi, masyarakat serta komponen yang menindaklanjuti hal itu seakan tidur dan menganggap itu adalah hal yang lumrah, karena begitulah cara yang patut ditempuh untuk mampu mencapai kursi sebagai anggota legislatif. Yang lebih menyakitkan lagi, ada calon legislatif yang gagal kemudian menarik kembali apa yang diberikannya kepada masyarakat dan membuat masyarakat sendiri stres bagaimana cara mereka mengembalikan apa saja yang telah diberikan oleh calon legislatif yang gagal tersebut.

Di Indonesia, khususnya di *Butta Panrita Lopi*, fakta berkata bahwa demokrasi memang tidak akan pernah bisa mati. Setiap hal yang tidak disukai oleh masyarakat Bulukumba akan selalu menuai aksi protes yang hanya merugikan berbagai pihak. Contoh nyatanya adalah mengenai pemuda Bulukumba dari Aliansi Pemuda Bulukumba Bersatu (APBB) menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Bulukumba di mana unjuk rasa ini berlangsung cukup anarkis tanpa penjagaan ketat dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjaga kantor bupati. Unjuk rasa ini mengusung sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp15 miliar di Dinas Kesehatan Bulukumba. Pemuda-pemuda ini meminta Pemkab Bulukumba bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dana alat kesehatan tersebut.

Fakta gambaran di atas semakin jelas mempertanyakan di

manakah penerapan sikap *Siri' Na Pacce* yang merupakan landasan masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkehidupan. Kita sebagai bangsa yang dikenal beradab, harus mengetahui bahwa aksi demo secara anarkis tentu saja akan menciptakan kepribadian yang lebih buruk lagi dan senantiasanya akan berontak. Namun, kita harus mengingat akar timbulnya demokrasi itu adalah dari setiap masalah yang diciptakan oleh pemerintah yang tidak lagi menerapkan *Siri' Na Pacce* dalam sistem pemerintahannya.

### **Membumikan *Siri' Na Pacce***

Dari gambaran di atas jelas bahwa penerapan Budaya *Siri' Na Pacce* yang begitu kental pada masyarakat Sulawesi Selatan, tampak semakin terkikis dengan demokrasi yang dijalankan saat ini. Budaya *Siri' Na Pacce* seakan menjadi sebuah kearifan lokal pendukung kekayaan budaya saja karena dalam penerapannya sama sekali pemerintah tidak mencerminkan *Siri' Na Pacce* tersebut. Hal inilah yang tentunya menimbulkan berbagai dampak negatif dari kurangnya atau bahkan tidak adanya aplikasi dari *Siri' Na Pacce* yang dimulai dengan membentuk kepribadian yang tidak berkualitas dan berlandaskan iman hingga pada pendangkalan nilai-nilai demokrasi.

Kita tentunya menyadari bahwa Tuhan menciptakan sebuah masalah dengan sebuah penyelesaian. Sistem demokrasi yang ada saat ini memang begitulah adanya. Sangat sulit untuk memperbaiki tatanan sistem yang telah ada. Namun, mengingat kembali sebuah peribahasa yang berbunyi “akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba” yang artinya setiap usaha tak ada yang langsung berhasil dan sempurna, karena pasti akan melalui berbagai rintangan.

Calon legislatif dan calon presiden harus *Siri'* jika saja ia terpilih lantas perlakuannya memalukan masyarakat Indonesia pada umumnya dan terlebih pada keluarga dan dirinya sendiri. Juga ia harus berprinsip *Pacce* terhadap apa yang menjadi kekurangan dan masalah dalam masyarakat. Jika seorang legislator dan presiden nanti memiliki dan menanamkan budaya *Pacce* ini, maka dapat dipastikan demokrasi substansial yang menjadi kekurangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dapat terwujud.

Antara *Siri' Na Pacce* ini keduanya harus saling mendukung satu sama lain, terlebih dalam konteks demokrasi sekarang ini. Seorang calon legislatif dan calon presiden yang berkampanye dan mengumbar program kerja dan janji buat masyarakat harus menanamkan falsafah *Siri' Na Pacce* sebagai budaya Makassar yang harus dijaga dan ditanamkan dalam dirinya. Jika ia memegang teguh falsafah ini maka sudah sepatutnya ia mengimplementasikan janjinya dan bukan janji palsu demi kebutuhan suara baginya. Apabila budaya seperti itu tertanam dan menjadi pengawasan melekat bagi pegawai dan pejabat, korupsi dan bentuk tindakan negatif lainnya pasti tidak akan pernah terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bulukumba. Sebab di daerah yang masyarakatnya kuat dasar imannya, di situ ada kedamaian dan kemajuan.

Dalam sebuah tulisannya, Maula Nusantara mengatakan bahwa “Falsafah keberanian orang Bugis-Makassar bukan seperti, ‘Ini dadaku, mana dadamu’ tidak sesombong dan searogan itu, falsafah keberanian orang Bugis-Makassar itu bijak, seperti pelaut yang berkata “*kualleangngangi tallangan na toalia*” artinya, aku memilih tenggelam daripada kapal kembali surut ke pantai. Jangan langsung ditafsirkan aku memilih mati daripada mundur. Bukan seperti itu! Ketika seorang pelaut mengucapkan itu sebelum berlayar, dia berangkat dengan niat dan tujuan yang jelas, benar dan terang.”

Watak yang keras tidak harus menjadikan diri kasar dan semaunya dalam bertindak. Kita berani karena kita berada dalam posisi yang benar, dan memang harus diperjuangkan. Dalam bertindak pun tidak mesti diselesaikan dengan ujung badik karena kita berada dalam ruang Indonesia. Ada hukum yang mengatur dan norma norma yang berlaku. Jika setiap manusia memiliki *Siri'*, maka ia akan berusaha untuk memperbaiki itu semua disertai dengan kerja keras yang tidak bertentangan dengan norma norma yang ada. Bangkitlah demokrasi Indonesia!

### Daftar Pustaka

- Anriani, Fitri Lidya Nor. 2014. "Indonesia Negara Agrowisata". <http://writingcontest.bisnis.com/artikel/read/20140401/380/214991/indonesia-negara-agrowisata>. Diakses 8 Mei 2014.
- Muhammad, Jusuf. 2000. *Korupsi, Konspirasi dan Budaya Siri Bugis-Makassar*. Makassar: Lembaga Studi Media Massa (Elsim).
- Kumoro, Bawono. 2014. "Masa Depan Demokrasi Kita". <http://habibiecenter.or.id/detilurl/id/182/news/Masa.Depan.Demokrasi.Kita>. Diakses 7 Mei 2014.
- Salahuddin. "Protes Alkes, Pemuda Bulukumba Demo di Kantor Bupati". (Online, <http://rakyatSulsel.com/protes-alkes-pemuda-bulukumba-dema-di-kantor-bupati.html>). Diakses 8 Mei 2014.
- Yufeny, Sri Septy Arista. 2011. *Analisis Eksistensi Budaya Siri' (Malu) untuk Mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan*. (Dalam ajang LKIR 43 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)



# KAUM MUDA DAN BUDAYA DEMOKRASI PILIHAN POLITIK ANTARA IDEALISME DAN PRAGMATISME

**Citra Anggia Fathia**

SMA Negeri 5 Kota Bekasi

**P**esta demokrasi untuk memilih anggota legislatif sebagai bagian dari budaya demokrasi telah berlangsung. Berbeda dari pesta lain, pesta ini hanya menitikberatkan hari pestanya sebagai hasil, sementara perayaan dan euforianya lebih terasa di masa-masa kampanye.

Bagaimana tidak, masa-masa kampanye di negeri kita tercinta ini bak hajatan rakyat. Dentuman genderang dan lantunan syair-syair khas musik dangdut terdengar di hampir setiap pelosok tanah air. Digelar oleh partai-partai calon legislatif demi menarik perhatian rakyat. Sebenarnya, apakah korelasi antara musik dangdut dengan demokrasi? Bahkan para pedangdut tersohor sampai maju untuk mewakili rakyat dalam demokrasi. Menarik rakyat untuk datang ke kampanye? Ya. Menarik rakyat untuk memilih partai yang menyelenggarakan kampanye? Belum tentu. Jadi apakah kampanye

sejenis ini efektif dan efisien? Atau malah hanya menyalakan uang sekaligus merusak moral dengan gaya dan goyang sensual di panggung dangdut?

Tidak berhenti di situ. Hal lain yang menjadi tradisi di masa kampanye Indonesia adalah pelibatan massa dalam kampanye. Bukan hanya massa simpatisan yang bergabung, tak jarang golongan massa yang sering saya sebut GOLPUT+KG alias 'Golongan Penerima Uang Tunai plus Kaus Gratis' pun dikerahkan. Menurut pengakuan salah seorang teman yang berpartisipasi sebagai GOLPUT+KG, ia menerima uang Rp 80.000,00 plus kaus gratis untuk memutar satu kota dari tiap-tiap partai. Kurang lebih ia mengikuti empat kampanye dari empat partai berbeda. Lain pula dengan pedagang sayur keliling, pengayuh becak, dan jasa *ojek* di sekitar rumah saya yang mengaku diberi Rp 20.000,00 untuk menempelkan stiker partai atau calon legislatif tertentu di gerobak sayur, becak, atau motornya, tak ketinggalan kaus partai tersebut. Dari sisi masyarakat umum, mereka melihat fenomena kampanye keliling kota sebagai sesuatu yang negatif. Bagi masyarakat kota besar dan padat, kampanye semacam ini dinilai merepotkan karena menimbulkan kemacetan. Menurut pandangan saya sendiri, kampanye ini memang tidak persuasif sama sekali. Mungkin dengan tujuan sekadar pengenalan partai politik terhadap masyarakat hal ini cukup efektif. Tetapi tidak untuk mendorong masyarakat memilih partai politik terkait. Yang mengejutkan, ketika ditanya apakah massa yang terlibat dalam kampanye keliling ini akan memilih partai atau calon tersebut, hampir semua menjawab tidak. Menurut kebanyakan dari mereka, yang penting adalah uangnya, sebagian juga menginginkan kaus gratisnya. Sungguh tak sepadan pasak dengan tiang bagi partai politik yang menempuh jalur ini. Sejujurnya, massa tak ingin memilih calon yang sedari awal sudah bermain uang. Bahkan, di antaranya menganggap bahwa menerima uang tersebut tanpa memberi kesempatan pada si pemberi untuk maju ke Senayan adalah balas dendam yang bahkan tak sepadan dengan apa yang didapatkan oleh koruptor terdahulu. Ironis, fenomena ini layaknya lingkaran setan yang saling memanipulasi demi uang.

Berbeda dengan dua kampanye di atas yang membidik kaum

menengah ke bawah, kampanye yang dilakukan oleh kaum menengah ke atas justru lebih kepada *black campaign* yang menjurus pada fitnah, iri, dan benci pada tokoh-tokoh yang sudah memiliki nama besar. Misalnya saja salah satu pemilik perusahaan media besar yang terjun ke politik, mempublikasikan iklan televisi berkaitan dengan seorang tokoh dari rival partai politiknya yang masih berhutang janji pada rakyat, kental dengan kritik yang secara halus menjatuhkan.

Pernah pula, saya melihat baliho yang cukup menarik perhatian mata. Dalam konten baliho tersebut, sebuah partai politik membuat diagram tingkat korupsi seluruh partai politik di Indonesia dan menyusunnya dari persentase tertinggi ke terendah. Partai itu sendiri menempatkan logonya di posisi terendah, 0%. Saya tersenyum kecil saat itu, menyadari bahwa partai tersebut terbilang baru dan belum cukup berkecimpung dalam ranah politik. Tentu ia belum pernah mendapat proyek apapun. Agaknya hal ini adalah pembodohan publik. Data tersebut pun belum dapat dibuktikan kebenarannya. Terlepas dari siapa yang melakukan kampanye dan siapa pihak yang dijatuhkan, menurut saya, menjatuhkan nama lawan dengan kebohongan sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, justru pendukung pihak yang memfitnah bisa beralih ke pihak yang difitnah, mengingat masyarakat Indonesia lebih simpati kepada pihak yang menjadi 'korban' atau 'teraniaya'. Selain itu, saya yakin tiada pula yang menyukai pribadi yang dapat melihat debu di ujung dunia tapi tak dapat melihat gajah di pelupuk mata.

Selain kampanye hitam, banyak pula kampanye yang tidak realistis ataupun logis. Contohnya saja menjadikan penghasilan rakyat minimal Rp 10.000.000,00 per bulannya. Bagaimana merealisasikan hal ini dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun? Tentu tidak mudah. Terlalu banyak yang perlu dibenahi, terlalu sedikit waktu yang dimiliki. Bila ditelaah secara realistis, hal tercepat mungkin menjadikan nilai tersebut sebagai UMR. Hal itu pun masih tidak mungkin. Memaksakan para pengusaha untuk menaikkan gaji karyawannya, maka sama dengan memaksakan mereka menaikkan harga jual produk. Akhirnya percuma saja, kenaikan gaji berbanding lurus dengan kenaikan harga kebutuhan rumah tangga.

Beralih ke kampanye lain yang lebih menggelitik. Kampanye identik dengan pemasangan spanduk dan baliho berisi slogan atau visi misi beserta foto calon legislatif yang terlihat formal dengan setelan jas rapi. Tetapi nampaknya para calon legislatif menganggap hal itu sudah membosankan. Dengan nama inovasi dan kreativitas, poster *nyeleneh* pun diterbitkan. Mengangkat tema yang lebih trendi, sebagian calon legislatif menggunakan *photo-editor* dan mengubah fotonya menjadi *super hero* seperti *Superman*, *Iron Man*, atau *Spiderman*. Mungkin hal sejenis ini masih dapat diterima dengan akal sehat, anggaplah mereka ingin memperkenalkan diri sebagai calon pahlawan rakyat. Namun, bagaimana dengan mereka yang berfoto bersama hewan buas atau hewan peliharaan kesayangannya? Atau mengganti foto mereka dengan foto tokoh animasi terkini seperti *Doraemon*, *Spongebob*, atau *Naruto*? Saya rasa ini tak lebih dari sensasi belaka. Padahal inovasi yang dituntut rakyat adalah inovasi dalam membenahi negara, bukan inovasi *nyeleneh* penarik perhatian sesaat.

Lalu bagaimana kampanye ini mempengaruhi pemilih muda? Bukan pemuda namanya bila tidak memiliki rasa ketertarikan dan penasaran dengan peristiwa dan hal-hal yang dianggap baru, aktual, dan trendi seperti pesta demokrasi ini. Seperti yang selalu kita dengar, "Darah muda, darahnya para remaja". Kaum muda atau para remaja, identik dengan masa pencarian, pengembangan, dan pembentukan karakter. Karakter kaum muda yang idealis, peka, dan visioner tentu lebih menimbang yang berkampanye secara jelas tapi tidak berlebihan. Sementara kaum muda dengan karakter pragmatis, lebih menginginkan timbal balik secara langsung, acuh tak acuh atau bahkan memilih untuk masuk ke dalam kategori GOLPUT, Golongan Putih.

Padahal, jangan menyepelekan suara pemilih muda karena total suara pemilih muda (17-30 tahun) ada sekitar 55.000.000 suara atau setara dengan kurang lebih 250 kursi DPR RI. Pendidikan politik di mata para pemuda tentu terasa kurang. Yang mereka kenal hanyalah praktik-praktik di masa lalu yang tertuang dalam buku pelajaran sekolah. Meski praktik demokrasi di Indonesia seperti pembentukan organisasi yang pengurusnya dipilih melalui pemungutan suara di

dalam sekolah cukup digencarkan, hal ini masih meresahkan sebagian pihak. Mereka tergugah untuk mengurangi angka golongan putih dengan berbagai cara di berbagai media. Yang cukup menunjukkan hasil adalah dari media *Twitter*. Di dalam media yang paling digandrungi oleh kaum muda ini terdapat banyak variasi metode. Misalnya saja akun *@ayovote* atau *ayovote.com* yang berkampanye untuk tidak menjadi golongan putih sekaligus memberikan sarana bagi kaum muda untuk menemukan rekam jejak calon legislatif sesuai daerah pilihnya. Untuk menambah daya tarik, akun ini bekerja sama dengan *@IndonesianYouth* dan *@ProvocActive* juga menyelenggarakan acara bertajuk 'Sotoy Politik' yaitu sebuah forum terbuka untuk edukasi politik bagi kaum muda di bilangan Jakarta Selatan yang notabene tempat berkumpulnya kaum muda 'gaul'. Belum lagi, pembicaraanya adalah *selebtwit* yang jumlah pengikutnya besar. Tentu program ini akan tepat guna dan tepat sasaran.

Masih di lini masa kicau namun dari pihak lain seperti industri *online shop*, restoran, dan tempat-tempat lain yang menjadi favorit kaum muda menawarkan potongan harga atau promo lainnya apabila dapat menunjukkan jari kelingking yang telah tertinta sebagai bukti telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Adapula beberapa pihak yang menyelenggarakan kuis di media sosial seperti 'Selfie Kelingking' atau 'Unjuk Kelingking' dengan tawaran hadiah yang tidak bisa dibilang bernilai sedikit. Tanpa bermaksud untuk menilai secara negatif, hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kepala saya. Apakah hal ini murni atas dasar nasionalisme atau 'aji mumpung' mempromosikan produk dengan mengikuti arus tren?

Dari sini terlihat satu lagi fenomena tak terelakkan, di mana gaya hidup trendi para pemuda berinteraksi dengan budaya demokrasi. Simbiosis mutualismekah? Bisa jadi, sebab ini menimbulkan kesadaran baru bagi kaum muda. Sebelumnya, budaya demokrasi hanya salah satu bab membosankan dalam pelajaran PKn. Positifnya, hal ini tentu menarik perhatian kaum muda dan dapat menekan angka golongan putih. Namun serupa halnya dengan pertanyaan yang telah saya lontarkan di paragraf sebelumnya, apakah nantinya pemilih muda akan memilih atas dasar kesadaran nasionalisme atau

hanya ingin mendapat potongan harga? Secara karakteristik, kaum muda dengan karakter idealis hanya akan menganggap promo dari industri sebagai keuntungan lain dari sebuah kewajiban. Sementara, sinyal bahaya muncul dari kaum muda karakter pragmatis yang justru mengesampingkan tujuan dari pemilihan umum dan mengutamakan potongan harga. Ada kemungkinan besar kaum muda yang pragmatis ini akan asal memilih, menggunakan metode *tang ting tung* demi imbalan potongan harga yang tidak seberharga suaranya.

Terkait faktor utama seperti kampanye politik, maupun faktor pendukung media sosial dan industri seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, perbedaan pola pikir antara kaum muda idealis dan pragmatis menghasilkan pilihan politik yang berbeda. Padahal sesungguhnya, idealisme ataupun pragmatisme hanyalah sebuah prinsip. Karena seseorang pasti memiliki sisi idealis dan pragmatis dalam dirinya. Yang idealis tidak sepenuhnya idealis dan yang pragmatis tidak selalu pragmatis, yang pasti keduanya mengharapkan Indonesia dengan kenyamanan dan keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga seharusnya masalah prinsip ini bukan menjadi masalah bila kedua faktor mumpuni untuk mendorong dan mengusung politik yang sehat. Disimpulkan dari paragraf-paragraf sebelumnya, kampanye dari pihak 'samping' lebih menunjukkan *effort* ketimbang kampanye-kampanye yang umumnya digunakan oleh partai politik. Masih sedikit kampanye partai politik yang memberikan edukasi politik bahkan belum ada yang dapat menyentuh hati para pemuda. Kampanye idaman adalah yang sehat, santun, dan efektif. Kampanye yang mencatatkan rekam jejak yang baik dari calon legislatif. Kampanye sendiri perlu didasari sifat dan sikap *SMART: Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat diraih), *Realistic* (realistis), dan *Time Bomb* (dapat diwujudkan tepat waktu) agar tepat guna dan tepat sasaran.

Ibarat pendakian gunung, kampanye adalah jalan setapak untuk mencapai kaki gunung, yaitu pemilihan umum. Selanjutnya masih ada pendakian terjal seperti tekanan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan menguji komitmen para legislatif menuju puncak Indonesia jaya. Biar bagaimanapun, kampanye menentukan pilihan politik. Bila

dari awal saja telah tercium gelagat menjijikkan, sebaiknya tinggalkan. Sebagai pemilik hak suara yang besar serta sebagai generasi yang memiliki masa depan, maka langkah terbaik bagi kaum muda adalah dengan memilih, dan menjadi pemilih yang cerdas, bagaimanapun karakter atau prinsipnya.



# JANGAN SALAHKAN PEMUDA INDONESIA!

**Hendra Sugianto**  
SMA Negeri 4 Berau

*"Beri aku 1.000 orang tua,  
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.  
Beri aku 10 pemuda,  
niscaya akan kuguncangkan dunia."  
-Soekarno-*

Pemuda adalah golongan remaja menuju dewasa yang katanya memiliki darah muda. Katanya juga, darah muda mereka merupakan salah satu aset potensial bangsa untuk melahirkan cikal bakal seorang pemimpin penyelamat kesejahteraan bangsa di tengah krisis moral, sosial, dan ekonomi yang tiada henti-hentinya mewarnai corak kehidupan di negeri ini. Jika kita menengok kembali masa lampau sebelum berjayanya Indonesia, tidak dipungkiri berbagai ragam dan corak tentang peranan generasi muda dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan bahkan sampai diperhadapkan dengan reformasi di Indonesia di mana peran generasi muda atau pemuda dalam konteks perjuangan dan pembangunan dalam kancah sejarah kebangsaan Indonesia sangatlah dominan dan memegang

peranan sentral, baik perjuangan yang dilakukan secara fisik maupun diplomasi, perjuangan melalui organisasi sosial dan politik serta melalui kegiatan-kegiatan intelektual.

Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia sudah terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Menurut periodisasinya dapat dibagi menjadi enam periode. Dimulai dari periode “Kebangkitan Nasional” tahun 1908, “Sumpah Pemuda” tahun 1928, “Proklamasi” tahun 1945, “Aksi Tritura” tahun 1966, hingga periode “Orde Baru” sejak tahun 1967-1998. Melihat sejarah peranan pemuda dahulu sangatlah pantas jika pemuda sekarang selalu menjadi topik pembicaraan hangat yang tidak akan habis diperdebatkan oleh banyak orang yang mengharap perubahan dalam negeri ini. Pada era globalisasi juga pemuda dirasa sangat perlu karena mereka dapat dijadikan mobilisasi dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kaum muda dianggap memiliki komitmen moral yang tidak dapat diracuni oleh kepentingan sesaat.

Apalagi menjelang pesta demokrasi Indonesia 2014 kali ini kaum muda kembali menjadi sorotan karena partisipasi aktif kaum muda sebagai pemilih pemula menempati skala prioritas. Salah satu fakta menarik dari pemilu 2014 adalah karakter pemilih pemula, yang merupakan generasi baru demokrasi Indonesia. Mereka lahir pada selang waktu 1993-1997, tumbuh pada era baru reformasi. Generasi ini tidak mengenal masa represif dan otoriter Orde Baru dan ketika mereka mengenal dunia, mereka sudah menemukan Indonesia menjalani demokrasi penuh dengan segala bentuk fiturnya, seperti pemilihan langsung, apresiasi gagasan, keterbukaan, dan kebebasan menyampaikan kritik. Bagaimana tidak, kaum muda lahir di era keterbukaan, di mana aspirasi dan kritik bisa disampaikan dengan modal *gadget* dan jempol saja. Generasi baru ini adalah wajah baru Indonesia, dan untuk pertama kalinya di tahun 2014 mereka akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam menentukan masa depan Indonesia. Jumlah mereka tidak sedikit. BPS menyatakan pemilih pemula di Pemilu 2014 mencapai 21,8 juta jiwa atau 11,7% dari total pemilih keseluruhan.

Angka yang tidak sedikit tentunya. Partisipasi mereka merupakan

aset potensial bagi para calon anggota legislatif yang ingin maju untuk mengisi kursi anggota dewan yang diperebutkan. Apabila mayoritas dari mereka menggunakan hak pilih secara cerdas, maka kualitas demokrasi ke depan tampak menjanjikan, sehingga perlu adanya kebijaksanaan dari para pelaku demokrasi untuk mampu mendorong pemilih pemuda ini untuk berpartisipasi penuh dalam pesta politik yang sudah di depan mata. Selain partisipasi mereka, kaum muda juga disebut-sebut sebagai salah satu penentu pergerakan dan perkembangan politik di tanah air. Mengapa demikian? Hal ini tentu saja sangat penting, karena dengan adanya momentum pesta demokrasi ini pemuda pemudi Indonesia diharapkan dapat menjadi pribadi yang demokratis, kritis, dan tidak apatis. Namun sayang, mewujudkan kaum muda Indonesia yang lebih maju tidaklah mudah seperti menapakkan kaki di daratan.

Bagaimana tidak, jika kita membandingkan karakter pemuda terdahulu dengan karakter pemuda sekarang sangatlah jauh berbeda. Mereka hidup di era yang berbeda. Mereka tinggal dalam situasi berbeda. Dan mereka memiliki kemampuan pola pikir yang berbeda. Sepintas, tentu saja perbedaan karakter di antara dua generasi ini sangat mencolok. Pemuda dulu adalah pemuda yang kuno dibanding dengan pemuda sekarang yang lebih modern dan lebih mementingkan gaya hidup mereka dibanding mempertahankan nilai-nilai moral yang lebih dipegang erat oleh pemuda dulu. Secara kritis perbedaan di antara keduanya yaitu pemuda atau generasi muda yang hidup dalam nuansa dan suasana pergolakan kemerdekaan dan perjuangan mengusir para penjajah dari Indonesia akan cenderung memiliki kreativitas tinggi dan keunggulan untuk melakukan perubahan atas berbagai kerumitan dan masalah yang dihadapi, akan tetapi bagi para pemuda atau generasi muda yang hidup dalam nuansa nyaman, aman dan tenteram seperti kondisi sekarang, cenderung apatis, tidak banyak berbuat dan hanya berusaha mempertahankan situasi yang ada tanpa usaha dan kerja keras melakukan perubahan yang lebih baik dan produktif atau bahkan cenderung tidak kreatif sama sekali.

Mengapa kondisi ini bisa terjadi di tengah menjelang pesta demokrasi yang selayaknya sebagai momentum untuk merajut

perubahan di Indonesia? Banyak hal yang membuat karakter pemuda kita sekarang jauh tertinggal dibandingkan karakter bangsa terdahulu. Bermula dari paradigma pemuda tentang partai politik di Indonesia sangatlah minim. Kebanyakan dari pemilih pemula tidak tahu siapa-siapa saja bakal calon anggota legislatif dari berbagai partai politik. Sebagian dari mereka hanya mengetahui sebagian kecil calon wakil rakyat dari daerahnya sendiri, namun ketika dihadapkan dengan calon anggota legislatif provinsi dan nasional, mereka hanya bisa tercengang dan bingung dengan selebaran kertas berisi nama-nama calon anggota legislatif yang asing bahkan mereka tidak tahu visi dan misi apa yang akan diusung para calon itu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Berbagai survei menunjukkan sekitar 40% calon pemilih belum menentukan pilihan dikarenakan beberapa sebab, antara lain kecewa terhadap partai politik, ketidaktahuan terhadap tokoh dan visi yang dibawa, serta sikap *cuek* karena kurang peka terhadap politik. Dari sinilah, muncul alasan pemilih pemula untuk lebih memilih bergabung dalam anggota golongan putih ketimbang memilih bergabung dengan partisipasi aktif dalam pemilu.

Selain alasan tersebut penyebab munculnya golput dikalangan pemuda Indonesia, yakni pertama, *political disaffection* dipicu oleh semakin meningkatnya perilaku buruk para politisi yang dapat mereka saksikan setiap hari melalui media masa. Pemilihan langsung yang telah banyak mengorbankan waktu, dana, dan tenaga ternyata hanya melahirkan kaum pemuja harta yang tamak. Mereka berharap banyak pada kaum muda yang cerdas, rupawan dan santun tapi faktanya mengecewakan. Puncaknya lebih menyakitkan lagi, dugaan kasus korupsi oleh pimpinan tertinggi partai yang digadang-gadang akan membawa perubahan karena kebersihannya, kesalahannya, dan keadilannya. Kedua, hilangnya kepercayaan terhadap pembangunan yang dijalankan. Ketiga, kejenuhan terhadap janji kampanye. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pejabat yang hanya mengumbar banyak janji yang setelah terpilih janji-janji tersebut tidak seluruhnya mereka penuhi yang akhirnya membuat masyarakat malas untuk memilih. Golput di Indonesia secara signifikan terjadi sejak pemilu pertama pascareformasi. Pemilu 1999, partisipasi

pemilih sekitar 93%, kemudian menurun pada pemilu 2004 menjadi 85%, penurunan drastis terjadi pada pemilu tahun 2009 menjadi 71%. Sedangkan pada pilpres 2004 putaran pertama partisipasinya sebesar 80%, lalu menurun menjadi 77% pada putaran kedua. Angka ini menurun lagi pada pilpres 2009 menjadi 72,5%.

Hal tersebut juga yang menyebabkan sikap apatisisme masyarakat terdahulu menular ke generasi muda era modern ini. Sikap apatis ini sudah menjamur dalam paradigma kalangan pemilih pemula. Sebagian dari sikap apatis tersebut muncul karena citra partai politik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak sekali citra partai politik yang rusak karena banyak dari kader-kadernya yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tentu saja merugikan rakyat Indonesia. Presepsi pemuda Indonesia tentang hal tersebut tidak dapat dipungkiri masih menghantui paradigma mereka yang tergolong masih labil. Inilah yang menyebabkan partisipasi aktif kalangan pemilih pemula terus menurun setiap kali pesta demokrasi diadakan.

Menanti pesta demokrasi Indonesia 2014, semua partai berduyun-duyun mendekati rakyat untuk berkampanye dan berorasi tentang visi, misi, serta program yang akan mereka jalankan jikalau partai mereka menang. Tidak lupa janji-janji dilantunkan berbagai partai seperti alunan lagu yang membius para pendengarnya. Semua partai menobatkan, partai merekalah yang prorakyat, paling profesional sehingga layak dipilih. Ibarat label suatu produk makanan kemasan. Tidak ada yang ingin menjadi nomor dua. Semua menginginkan produknya menjadi yang terdepan dan nomor satu.

Sebenarnya hal tersebut sah dan benar adanya. Namun, kita tentunya mengharapkan di balik kampanye partai politik tersebut tersirat sebuah kampanye cerdas. Kampanye yang di samping memaparkan visi, misi, dan programnya, juga sekaligus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula karena mereka adalah pemilih potensial dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Bukan kampanye yang isinya hanya hiburan dangdut erotis, hura-hura, arak-arakan, dan konvoi kendaraan yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Tapi kenyataannya, kampanye

yang dilakukan masih jauh dari harapan. Kebiasaan partai politik yang kebanyakan melakukan kampanye terbuka hanya bertujuan untuk mencari *pamor* saja. Padahal yang sesungguhnya diharapkan masyarakatnya bukanlah itu. Mereka hanya menginginkan wakil rakyat yang bersih, berintegritas, cerdas, dan prorakyat.

Untuk mengubah paradigma tersebut, setidaknya terdapat lima pendekatan yang bisa dilakukan oleh para pelaku demokrasi untuk menyambut generasi baru ini. *Pertama*, memberikan keteladanan bagaimana politik beretika dan berintegritas dengan menghindari upaya transaksional untuk mendapatkan suara dan perilaku koruptif. *Kedua*, memberikan sentuhan kampanye dengan cara menyenangkan dan mengedepankan gagasan. *Ketiga*, memunculkan pemimpin atau tokoh yang dekat dengan generasi baru ini dalam konteks usia dan pemikiran. Sudah saatnya partai politik berani memotong generasi kepemimpinan Indonesia yang masih diisi oleh generasi usia 50-an dan 60-an menjadi usia 40-an dan 50-an awal. *Keempat*, melibatkan generasi muda ini dalam proses menghimpun aspirasi dan penyusunan strategi pembangunan, generasi muda ini senang dengan segala bentuk upaya kolaboratif yang membuat mereka bisa berkontribusi nyata kepada Indonesia. Dan *kelima*, pendekatan digital sangat diminati oleh generasi muda ini. Mereka suka tampilan visual dengan desain menarik serta pendekatan media sosial, yang dinilai seru dan anak muda *banget*.

Contohnya melalui *stand up comedy*. Cara ini terbilang lumayan ampuh untuk mengenalkan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Karena dalam *stand up comedy* berisi anekdot-anekdot yang di dalamnya tersirat kritik pemuda terhadap bobroknya pemerintahan di Indonesia. Dan pada saat itulah, penonton yang mayoritas anak muda terpancing untuk berpikir kritis untuk menanggulangi permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Melalui *stand up comedy* ini pula pemuda akan diajak mengenal apa itu pendidikan politik dengan suasana santai dan menghibur. Letupan-letupan humor dari narasumber yang berbobot akan lebih mudah dicerna pemuda daripada mendengar ocehan narasumber dalam sebuah seminar yang tegang, terkesan formal dan mudah menimbulkan rasa jenuh bagi

sebagian pendengarnya.

Jika mengerti begini keadaannya, apakah kita masih ingin menyalahkan pemuda Indonesia di tengah menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia ini? Jangan lagi kita terus menerus menyalahkan pemuda Indonesia! Sesungguhnya pemuda Indonesia tidak sepenuhnya berada di jalan yang salah, yang salah adalah sebuah sistem terdahulu yang terus berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Sudah saatnya partai politik dan calon legislatif sadar, apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang ini. Jawabannya sungguh mudah. Para pemilih hanya ingin perubahan dalam sistem berkampanye mereka. Partai politik dan calon legislatif harus terjun langsung ke masyarakat mensosialisasikan budaya demokrasi yang tertib dan berusaha untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat terdahulu yang tentunya jauh lebih tertinggal dengan pemikiran masa kini. Tidak hanya itu, pemilih juga berharap banyak pada caleg berkampanye dengan mengandalkan idealisme, *blusukan* ke kampung-kampung menemui konstituen, mengadakan acara bakti sosial, pengobatan gratis, pasar murah, menanam pohon, jalan sehat, dan sebagainya. Hal-hal tersebut jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan acara pengerahan massa yang bersifat hura-hura. Kampanye melalui pengerahan massa sangat berpotensi melahirkan politik uang karena yang massa yang datang belum tentu pendukung partai tetapi bisa saja massa bayaran. Mereka ikut kampanye karena senang diberi kaos, uang bensin, dan nasi bungkus.

Jika semua itu telah diperbaiki, tidak akan ada lagi pemilih pemula yang golput. Tidak akan ada lagi citra politik Indonesia yang selalu negatif. Begitu pun dengan demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih maju dan setara dengan negara-negara adikuasa di dunia ini. Kalau semua itu terlaksana, tidak mustahil mimpi untuk mewujudkan “Indonesia maju” akan segera tercapai.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Ridwansyah Yusuf. 2014. "Menyambut Generasi Baru, Ungguli Pemilu". <http://news.detik.com/read/2014/03/09/192100/2520346/103/menyambut-generasi-baru-ungguli-pemilu?nd772205103>.
- Kartika, Illa. 2014. "Pemilih Pemula Cenderung Golput." <http://formatnews.com/v1/view.php?newsid=51595>.
- Rewah, Donald Audi. 2013. "Peran dan Eksistensi Kepemudaan dalam Demokrasi." <http://beritakawanua.com/opini/peran-dan-eksistensi-kepemudaan-dalam-pembangunan-demokrasi>
- Supartiwi, Fitri. 2014. "Stand Up Comedy untuk Pendidikan Politik." <http://www.antarane.ws.com/pemilu/berita/426981/stand-up-comedy-untuk-pendidikan-politik>
- Utami, Mustika. 2014. "Pengaruh Golput dalam Demokrasi." <http://politik.kompasiana.com/2014/05/05/pengaruh-golput-dalam-demokrasi-653775.html>

# ETNIS TIONGHOA DAN HAK DEMOKRASI DI INDONESIA

Cicilia Yeo

SMA Djuwita Tanjungpinang

## Pendahuluan

**D**i Indonesia orang-orang yang berasal dari Cina banyak yang hidup menetap serta menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka tinggal secara turun temurun dan diberi julukan sebagai Orang Tionghoa. Kata Tionghoa sendiri merujuk pada Tiongkok, dalam ranah bahasa muncul dari kata “Cung Hwa”. Apabila ditinjau dari segi sejarah, orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia Belanda yang ketika itu dinamakan “Orang Cina”, diduga panggilan ini berasal dari kosa kata “Ching” yaitu nama dari Dinasti. Orang asal Tiongkok ini yang anak-anaknya lahir di Hindia Belanda merasa perlu mempelajari kebudayaannya, termasuk bahasanya, maka oleh sekelompok orang Cina di Hindia Belanda (1900) didirikanlah suatu sarana sekolah di bawah naungan suatu badan yang dinamakan Â Tjung Hwa Hwei Kwan, yang kalau dilafal-Indonesiakan menjadi Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja

memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok tapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Cina di Hindia Belanda, seiring dengan perubahan istilah Cina menjadi Tionghoa (di Hindia Belanda).

Pada masa Hindia Belanda, orang-orang dari Cina yang merantau di Indonesia pada umumnya adalah orang-orang yang berkeinginan untuk mengubah nasibnya untuk menjadi lebih baik, maka kecenderungan mereka adalah memiliki tipikal ulet, sehingga orang-orang dari Cina yang merantau ke Indonesia cenderung sukses secara finansial. Hal ini ternyata menjadi kecemburuan tersendiri bagi masyarakat pribumi, ditambah lagi kecenderungan orang-orang Tionghoa pada saat itu lebih bersikap kooperatif terhadap Belanda. Mereka lebih bertindak kooperatif karena etnis Cina telah jera dan trauma, terhadap peristiwa tahun 1740 di mana pemerintah kolonial Belanda membunuh sekitar 10.000 orang keturunan Cina karena mereka dianggap sebagai pesaing dagang VOC pada masa itu. Dari kejadian itu, akhirnya kebanyakan dari orang-orang Tionghoa kemudian beralih menjadi orang yang dipercaya untuk mengatur keuangan dan pembukuan pengusaha-pengusaha Belanda dan menjadi penyalur distribusi rempah-rempah perusahaan-perusahaan dagang Belanda pada masa itu. Hal ini menambah rasa antipati dalam hati kaum pribumi terhadap orang-orang Tionghoa, perasaan yang dipendam ini lambat laun bagaikan api dalam sekam yang sewaktu-waktu pasti akan terbakar.

Pasca-Indonesia merdeka, kaum pribumi yang duduk menjadi elite bangsa di negeri ini perlahan-lahan mulai melancarkan gerakan-gerakan sentimen anti-Cina. Di balik sentimen ini terdapat prasangka-prasangka yang terus menerus hidup dan bahkan sengaja dihidupkan dengan tujuan tertentu yang banyak dikaitkan dengan masalah politik. Meskipun pada Orde Lama hubungan Soekarno dengan Republik Rakyat Cina begitu mesra, namun pembatasan hak terhadap orang-orang Tionghoa keturunan Cina di Indonesia juga diberlakukan. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang diskriminatif di bidang ekonomi

yaitu dimunculkannya PP no. 10/November 1959 yang melarang orang Cina berdagang di wilayah perdesaan, yang pada perjalanannya melahirkan sejumlah insiden di berbagai daerah. Pada masa Orde Baru, bentuk diskriminasi terhadap orang Tionghoa semakin menjadi-jadi, sebagai contoh dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

Indonesia adalah negara yang memiliki moto “Bhinneka Tunggal Ika” yang dapat diartikan sebagai “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat ini dikutip dari kitab *Sutasoma* karangan Mpu Tantular. Masyarakat keturunan Cina termasuk dalam kekayaan perbedaan tersebut, sebab mereka telah beranak-pinak di Indonesia dan menjadi bagian dari keberagaman itu sendiri. Budaya Cina yang berakulturasi dengan budaya pribumi membentuk budaya baru yang khas yang memperkaya khazanah budaya bangsa Indonesia. Munculnya diskriminasi berkaitan dengan etnis Tionghoa hingga saat ini masih terus terjadi, seolah kita sebagai bangsa Indonesia telah lupa, di balik rentetan sejarah dan jalannya perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan muncul nama-nama seperti Kwee Tiam Hong, Tony Wen, Tan Eng Hoa, Oei Tiong Ham, Cong A Fie, Drs. Yap Tjwan Bing dan masih banyak lagi.

Perlu kita ingat kembali bahwa diskriminasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang menganggap golongan pelaku diskriminasi tersebut merupakan golongan mayoritas yang bertindak sebagai sosok paling unggul. Diskriminasi dapat berbentuk kekerasan, penggunaan bahasa, dan bahkan perundang-undangan yang merupakan bentuk pembatasan terhadap paham Demokrasi Pancasila yang diunggulkan oleh kita bangsa Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kasus-kasus diskriminasi etnis yang terjadi hingga saat ini telah mencederai falsafah Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Jika diskriminasi masih “hidup” dalam Indonesia, ke manakah moto yang diagung-agungkan itu selama ini?

## **Dari Diskriminasi Menuju Demokrasi**

Demokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dari mulai pasca-kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Sistem demokrasi sejatinya sangat tepat diterapkan di negara Indonesia yang multikultur dan didiami oleh berbagai ras, etnis, agama dan suku bangsa. Namun dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, sampai dengan saat ini masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang memicu terjadinya diskriminasi dan perbedaan hak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak khususnya pelanggaran hak etnis kaum Tionghoa (keturunan Cina).

Perlu kita ingat kembali, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, proses pembelajaran tentang bagaimana cara membentuk sebuah kelembagaan negara yang benar telah dilakukan oleh pendiri bangsa kita Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta jajaran kabinetnya. Bangsa kita telah menyepakati bahwa demokrasi dipakai sebagai sistem penyelenggaraan negara. Sebagai contoh, selama tahun 1959-1960 terjadi kampanye pengusiran yang berlangsung dengan dukungan pihak TNI-AD. Sekitar 136.000 orang Cina meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Tionghoa. Hal ini masih terus berlanjut hingga mengarah ke kerusuhan rasial di Bandung pada tanggal 10 Mei 1963. Kerusuhan ini merupakan, kerusuhan rasial anti-suku peranakan Tionghoa terbesar di Jawa Barat yang bermula dari keributan di kampus Institut Teknologi Bandung antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi. Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar ke mana-mana, bahkan ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan. Hingga pada bulan Desember tahun 1966, sekolah-sekolah dan koran-koran berbahasa Cina di Indonesia ditutup.

Pasca-lengsernya Presiden Soekarno, Soeharto menggantikan tampuk kepresidenan, diskriminasi etnis Tionghoa pada

tercatat banyak tokoh keturunan Tionghoa yang mengharumkan nama Indonesia, membangun reputasinya lewat prestasi yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Susi Susanti, Rudi Hartono, Agnes Monica, Ane Avantie dan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia warga etnis Tionghoa juga memiliki peran cukup besar dalam berbagai aspek. Diskriminasi sudah seharusnya dikeluarkan dari pikiran semua orang. Tanpa adanya diskriminasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih maju karena seluruh masyarakat bersatu padu dan bersama-sama membangun bangsa ini tanpa memandang batas perbedaan. Janganlah kita membiarkan “ras” menjadi sebuah dasar yang membeda-bedakan manusia. Ingat selalu moto “Bhinneka Tunggal Ika” yang selalu dibawa oleh “Si Garuda”. Marilah kita mewujudkan Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan (*equality*).

## Penutup

Demokrasi telah dipakai bangsa Indonesia sejak lama, bahkan sistem ini dipakai sejak Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Pencetus Demokrasi yakni Abraham Lincoln menitik-beratkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama di mata hukum seperti telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Maka dalam hal ini, segala hal yang menyangkut tentang pelanggaran hak yang bersifat asasi dan perbedaan warga dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Indonesia yang multikultur, rawan terhadap segala pelanggaran yang berbentuk SARA. Mengenai diskriminasi yang telah dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia, hingga saat ini belum mendapat tindakan nyata dan tegas. Meskipun semakin hari, kebebasan berdemokrasi masyarakat semakin menunjukkan kemajuan, namun sejarah telah mencatat bahwa

tindakan kekerasan dan sentimen-sentimen negatif yang terjadi dan dilakukan terhadap etnis Tionghoa ibarat api dalam sekam yang dapat terbakar setiap saat.

Tercatat di setiap pergantian kekuasaan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi selalu muncul peristiwa rasialisme yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Aspek yang telah dipaparkan oleh penulis di atas merupakan rangkaian perjalanan demokrasi di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah khususnya perlakuan rasialis kaum mayoritas terhadap kaum minoritas Tionghoa di Indonesia. Demokrasi yang sebenarnya baik untuk dijalankan di Indonesia telah ternodai oleh kejadian-kejadian yang bersifat rasial di mana yang diangkat sebagai contoh adalah tindakan rasialis terhadap kaum Tionghoa. Keberagaman bangsa ini sudah ada sejak lama, budaya yang telah berasimilasi dan berakulturasi membentuk sebuah ciri yang khas bagi bangsa Indonesia. Semoga melalui paparan yang dituliskan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia mau berkaca bahwa ke-Bhinnekaan itu perlu dijaga secara bersama-sama tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya.

### Daftar Pustaka

- Darini, Ririn. 2009. *Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina: Perspektif Historis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lan, Njo Nio. 2013. *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latifiarni, Irma. 2013. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia." <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/>
- Pattiradjawane, L. Rene. 2001. *Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

tercatat banyak tokoh keturunan Tionghoa yang mengharumkan nama Indonesia, membangun reputasinya lewat prestasi yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Susi Susanti, Rudi Hartono, Agnes Monica, Ane Avantie dan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia warga etnis Tionghoa juga memiliki peran cukup besar dalam berbagai aspek. Diskriminasi sudah seharusnya dikeluarkan dari pikiran semua orang. Tanpa adanya diskriminasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih maju karena seluruh masyarakat bersatu padu dan bersama-sama membangun bangsa ini tanpa memandang batas perbedaan. Janganlah kita membiarkan “ras” menjadi sebuah dasar yang membedakan manusia. Ingat selalu moto “Bhinneka Tunggal Ika” yang selalu dibawa oleh “Si Garuda”. Marilah kita mewujudkan Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan (*equality*).

## Penutup

Demokrasi telah dipakai bangsa Indonesia sejak lama, bahkan sistem ini dipakai sejak Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Pencetus Demokrasi yakni Abraham Lincoln menitik-beratkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama di mata hukum seperti telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Maka dalam hal ini, segala hal yang menyangkut tentang pelanggaran hak yang bersifat asasi dan perbedaan warga dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Indonesia yang multikultur, rawan terhadap segala pelanggaran yang berbentuk SARA. Mengenai diskriminasi yang telah dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia, hingga saat ini belum mendapat tindakan nyata dan tegas. Meskipun semakin hari, kebebasan berdemokrasi masyarakat semakin menunjukkan kemajuan, namun sejarah telah mencatat bahwa

tindakan kekerasan dan sentimen-sentimen negatif yang terjadi dan dilakukan terhadap etnis Tionghoa ibarat api dalam sekam yang dapat terbakar setiap saat.

Tercatat di setiap pergantian kekuasaan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi selalu muncul peristiwa rasialisme yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Aspek yang telah dipaparkan oleh penulis di atas merupakan rangkaian perjalanan demokrasi di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah khususnya perlakuan rasialis kaum mayoritas terhadap kaum minoritas Tionghoa di Indonesia. Demokrasi yang sebenarnya baik untuk dijalankan di Indonesia telah ternodai oleh kejadian-kejadian yang bersifat rasial di mana yang diangkat sebagai contoh adalah tindakan rasialis terhadap kaum Tionghoa. Keberagaman bangsa ini sudah ada sejak lama, budaya yang telah berasimilasi dan berakulturasi membentuk sebuah ciri yang khas bagi bangsa Indonesia. Semoga melalui paparan yang dituliskan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia mau berkaca bahwa ke-Bhinnekaan itu perlu dijaga secara bersama-sama tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya.

### Daftar Pustaka

- Darini, Ririn. 2009. *Kebijakan Negara dan Sentimen Anti-Cina: Perspektif Historis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lan, Njo Nio. 2013. *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latifiarni, Irma. 2013. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia." <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/>
- Pattiradjawane, L. Rene. 2001. *Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Utama, Petra Wahyu. "Anarkisme dan Gerakan Anti Cina yang Terjadi di Wilayah Semarang, Solo, dan Sekitarnya Seputar Tahun 1965 dan tahun 1998". <http://petrawahyuutama.blogspot.com/2012/01/anarkisme-dan-gerakan-anti-cina-yang.html>

Wikipedia.com. "*Reformasi dan Kekerasan Rasialis Etnis Tionghoa.*" <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>



# MANIFESTO GERAKAN PEMUDA SANTRI DALAM PENDIDIKAN BUDAYA DEMOKRASI

REFLEKSI PEMILU 1999 DAN PEMILU  
2014 DI WILAYAH JEPARA

Ani Triana

MA. Safinatul Huda Jepara

## Pengantar Wacana

**R**ealitas sejarah membuktikan bahwa kepentingan politik dan kepentingan agama adalah dua hal yang jauh berbeda. Sehingga tidak perlu dicampuradukkan dalam sebuah kepentingan. Masyarakat Jepara paham betul dengan pernyataan tersebut. Sejarah kelam pernah menyelimuti kota yang terkenal dengan hasil kerajinan ukirnya ini. Tahun 1999 adalah tahun yang menimbulkan trauma yang amat mendalam bagi sebagian masyarakat di wilayah Jepara, khususnya di Dongos Kecamatan Kedung.

Pada saat itu, di tingkat pusat, tahun itu adalah tahun kemenangan para aktivis yang mengatasnamakan Gerakan Reformasi. Dominasi era Orde Baru, di bawah pimpinan otoriter Presiden Soeharto yang terlalu lama berkuasa (32 tahun) akhirnya tumbang. Euforia pun terjadi dengan konsekuensi-konsekuensinya.

Salah satu yang paling mudah diingat adalah munculnya banyak partai politik baru (multipartai). Saat itu ada 48 partai politik yang ikut kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagaimana yang sudah diketahui, sebelumnya hanya ada 3 partai politik (Golkar, PPP, dan PDI).

Sebagai kota yang masih berbasis tradisi keagamaan yang kuat khas Nahdlatul Ulama (NU), wilayah Jepara didominasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketika suara warga *Nahdliyyin* (sebutan warga NU) pecah, implikasi dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendirikan partai politik baru yang dinamakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PPP seperti kebakaran jenggot. Suara warga *Nahdliyyin* yang selalu menjadi basis pendukung utama partai tiba-tiba harus pecah menjadi dua. Bagi warga *Nahdliyyin* yang sudah terlanjur betah dan fanatik dengan PPP, mereka tetap memilih PPP. Namun, sebagian warga *Nahdliyyin* yang menjadi santrinya Gus Dur dan pro Gus Dur, mereka memilih PKB. Akibatnya, konflik pun tidak dapat dihindari.

Ironisnya, kebanyakan konflik melibatkan dua partai yang memiliki basis massa NU cukup besar: PPP dan PKB. Konflik di Dongos Jepara terjadi akibat massa beratribut PPP berusaha menggagalkan deklarasi PKB Ranting Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Jepara, 30 April 1999. Akibat dari konflik berdarah itu tercatat 6 orang tewas dan puluhan luka-luka. Data yang dirilis oleh *Suara Merdeka* (10/03/2004) bahkan menyebutkan belasan orang tewas dan luka-luka.

Mereka yang terlibat tidak peduli lagi bila yang diserang itu adalah tetangga atau bahkan kerabatnya sendiri. Karena sudah terlalu fanatik mengikuti partainya “kiai”, mereka lalu mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan tidak beradab.

Sebagian tokoh berpendapat bahwa penyebab konflik tersebut

adalah fanatisme yang keterlaluan dari massa pendukung partai itu sendiri. Sebagian lagi menyanggah pendapat tersebut. Dengan alasan: massa pendukung partai tidak dapat dikambing-hitamkan karena secara kondisi sosial mereka (terutama pendidikan dan ekonomi) saat itu mayoritas masih rendah. Artinya, wajar saja mereka mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang semestinya dimintai pertanggungjawaban adalah para elite politik, yang dianggap sebagai “kiai” partai yang telah menyalahgunakan wewenangnyanya untuk menghasut massa.

Dari peristiwa tersebut semakin jelas bahwa seharusnya agama tidak boleh dimasuki hal-hal politik praktis, karena jika kekuatan agama dijadikan politik praktis sangatlah berbahaya. Lantas, bagaimana dengan masa sekarang? Apakah masyarakat kita sudah mulai sadar dan benar-benar memahami akan hal itu? Tulisan ini selanjutnya akan membahas lebih lanjut.

### **Masalah Kekinian tentang Pemilu 2014 di Jepara**

Dalam kehidupan bernegara pasti ada pemimpin dan yang dipimpin. Begitu juga dalam agama, salah satunya agama Islam pasti juga ada pemimpin (kiai) dan yang dipimpin (santri/jama'ahnya). Sepatutnya dunia pesantren atau keagamaan harus bebas dari hal-hal perpolitikan (netral). Karena ruang lingkup pesantren tidak bisa dijadikan politik praktis. Ketika dunia politik masuk ke dalam dunia agama yang menjadi sasaran utamanya pasti kiai atau pemimpinnya, karena bagaimanapun juga seorang pemimpin pasti akan diikuti oleh santri atau pengikutnya.

Jika masih ada kefanatikan kiai dengan berkata bahwa, “Jika tidak masuk dan memilih partai ini, berarti kafir, murtad, dan darahnya boleh dibunuh”. Berarti sudah dapat dikatakan itu sangat berbahaya dan terancam tindak pidana.

Sungguh sangat miris pernyataan tersebut. Apabila konteksnya adalah berada di sebuah wilayah yang notabene kondisi sosial masyarakatnya atau pengetahuan masyarakatnya masih rendah dan hanya ikut dan taat pada pemimpinnya, maka tindakan tersebut harus benar-benar dihindari.

Bisa dibayangkan akibat dari konflik tersebut, yaitu rusaknya fasilitas umum, beberapa rumah warga hancur bahkan terbakar, banyaknya korban jiwa dan luka-luka. Dari pertengkaran tersebut bisa didapatkan suatu pelajaran yaitu pentingnya memupuk rasa toleransi, tidak fanatik akan suatu bidang politik, dan dunia yang berbasis Islam (dalam hal ini pesantren) harus netral terhadap berbagai politik praktis.

Pesantren (berbasis Islam) haruslah menjadi penengah (tidak memihak). Karena pesantren menjadi salah satu tempat yang seharusnya bebas dari politik praktis. Pesantren tidak boleh terjun atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu. Pesantren dapat dijadikan sebagai tolok ukur kekuatan Islam, jika pesantren sudah tidak sesuai dengan prinsipnya, maka kekuatan Islam pun akan semakin terpuruk.

Akhir-akhir ini, pada pemilu legislatif (pileg) 2014 yang terjadi adalah temuan adanya yayasan pendidikan Islam (sekolah-sekolah keagamaan) dan pesantren yang terindikasi kuat adanya politik praktis di wilayah Jepara.

Di yayasan pendidikan Islam, para caleg memanfaatkan hubungan kekerabatan mereka dengan pengurus yayasan untuk meminta dukungan penuh dari para guru beserta karyawan-karyawan lainnya. Bingkisan sembako dan amplop pun disebar. Tidak tanggung-tanggung, para caleg juga siap menyumbangkan dana yang relatif besar untuk pembangunan gedung sekolah beserta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Di pesantren, politik praktis masuk melalui calon legislatif (caleg) yang dulunya pernah *nyantri* atau mondok di pesantren. Karena masih punya ikatan kiai-santri atau bahkan ada yang punya ikatan keluarga, inilah yang dimanfaatkan oleh caleg untuk meminta dukungan penuh dari pesantren.

Dalam pemilu, caleg paham betul bahwa kaum santri adalah kekuatan sosial dan politik yang selalu diperhitungkan. Pertautan elite santri akan membekali legitimasi bagi caleg. Di sinilah caleg tidak mau kehilangan kesempatan meraih simpati dan suara dari kaum santri dan konvergensi kepentingan pun terjadi.

adalah fanatisme yang keterlaluan dari massa pendukung partai itu sendiri. Sebagian lagi menyanggah pendapat tersebut. Dengan alasan: massa pendukung partai tidak dapat dikambang-hitamkan karena secara kondisi sosial mereka (terutama pendidikan dan ekonomi) saat itu mayoritas masih rendah. Artinya, wajar saja mereka mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang semestinya dimintai pertanggungjawaban adalah para elite politik, yang dianggap sebagai “kiai” partai yang telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menghasut massa.

Dari peristiwa tersebut semakin jelas bahwa seharusnya agama tidak boleh dimasuki hal-hal politik praktis, karena jika kekuatan agama dijadikan politik praktis sangatlah berbahaya. Lantas, bagaimana dengan masa sekarang? Apakah masyarakat kita sudah mulai sadar dan benar-benar memahami akan hal itu? Tulisan ini selanjutnya akan membahas lebih lanjut.

### **Masalah Kekinian tentang Pemilu 2014 di Jepara**

Dalam kehidupan bernegara pasti ada pemimpin dan yang dipimpin. Begitu juga dalam agama, salah satunya agama Islam pasti juga ada pemimpin (kiai) dan yang dipimpin (santri/jama'ahnya). Sepatutnya dunia pesantren atau keagamaan harus bebas dari hal-hal perpolitikan (netral). Karena ruang lingkup pesantren tidak bisa dijadikan politik praktis. Ketika dunia politik masuk ke dalam dunia agama yang menjadi sasaran utamanya pasti kiai atau pemimpinnya, karena bagaimanapun juga seorang pemimpin pasti akan diikuti oleh santri atau pengikutnya.

Jika masih ada kefanatikan kiai dengan berkata bahwa, “Jika tidak masuk dan memilih partai ini, berarti kafir, murtad, dan darahnya boleh dibunuh”. Berarti sudah dapat dikatakan itu sangat berbahaya dan terancam tindak pidana.

Sungguh sangat miris pernyataan tersebut. Apabila konteksnya adalah berada di sebuah wilayah yang notabene kondisi sosial masyarakatnya atau pengetahuan masyarakatnya masih rendah dan hanya ikut dan taat pada pemimpinnya, maka tindakan tersebut harus benar-benar dihindari.

Bisa dibayangkan akibat dari konflik tersebut, yaitu rusaknya fasilitas umum, beberapa rumah warga hancur bahkan terbakar, banyaknya korban jiwa dan luka-luka. Dari pertengkaran tersebut bisa didapatkan suatu pelajaran yaitu pentingnya memupuk rasa toleransi, tidak fanatik akan suatu bidang politik, dan dunia yang berbasis Islam (dalam hal ini pesantren) harus netral terhadap berbagai politik praktis.

Pesantren (berbasis Islam) haruslah menjadi penengah (tidak memihak). Karena pesantren menjadi salah satu tempat yang seharusnya bebas dari politik praktis. Pesantren tidak boleh terjun atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu. Pesantren dapat dijadikan sebagai tolok ukur kekuatan Islam, jika pesantren sudah tidak sesuai dengan prinsipnya, maka kekuatan Islam pun akan semakin terpuruk.

Akhir-akhir ini, pada pemilu legislatif (pileg) 2014 yang terjadi adalah temuan adanya yayasan pendidikan Islam (sekolah-sekolah keagamaan) dan pesantren yang terindikasi kuat adanya politik praktis di wilayah Jepara.

Di yayasan pendidikan Islam, para caleg memanfaatkan hubungan kekerabatan mereka dengan pengurus yayasan untuk meminta dukungan penuh dari para guru beserta karyawan-karyawan lainnya. Bingkisan sembako dan amplop pun disebar. Tidak tanggung-tanggung, para caleg juga siap menyumbangkan dana yang relatif besar untuk pembangunan gedung sekolah beserta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Di pesantren, politik praktis masuk melalui calon legislatif (caleg) yang dulunya pernah *nyantri* atau mondok di pesantren. Karena masih punya ikatan kiai-santri atau bahkan ada yang punya ikatan keluarga, inilah yang dimanfaatkan oleh caleg untuk meminta dukungan penuh dari pesantren.

Dalam pemilu, caleg paham betul bahwa kaum santri adalah kekuatan sosial dan politik yang selalu diperhitungkan. Pertautan elite santri akan membekali legitimasi bagi caleg. Di sinilah caleg tidak mau kehilangan kesempatan meraih simpati dan suara dari kaum santri dan konvergensi kepentingan pun terjadi.

adalah fanatisme yang keterlaluan dari massa pendukung partai itu sendiri. Sebagian lagi menyanggah pendapat tersebut. Dengan alasan: massa pendukung partai tidak dapat dikambing-hitamkan karena secara kondisi sosial mereka (terutama pendidikan dan ekonomi) saat itu mayoritas masih rendah. Artinya, wajar saja mereka mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang semestinya dimintai pertanggungjawaban adalah para elite politik, yang dianggap sebagai “kiai” partai yang telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menghasut massa.

Dari peristiwa tersebut semakin jelas bahwa seharusnya agama tidak boleh dimasuki hal-hal politik praktis, karena jika kekuatan agama dijadikan politik praktis sangatlah berbahaya. Lantas, bagaimana dengan masa sekarang? Apakah masyarakat kita sudah mulai sadar dan benar-benar memahami akan hal itu? Tulisan ini selanjutnya akan membahas lebih lanjut.

### **Masalah Kekinian tentang Pemilu 2014 di Jepara**

Dalam kehidupan bernegara pasti ada pemimpin dan yang dipimpin. Begitu juga dalam agama, salah satunya agama Islam pasti juga ada pemimpin (kiai) dan yang dipimpin (santri/jama'ahnya). Sepatutnya dunia pesantren atau keagamaan harus bebas dari hal-hal perpolitikan (netral). Karena ruang lingkup pesantren tidak bisa dijadikan politik praktis. Ketika dunia politik masuk ke dalam dunia agama yang menjadi sasaran utamanya pasti kiai atau pemimpinnya, karena bagaimanapun juga seorang pemimpin pasti akan diikuti oleh santri atau pengikutnya.

Jika masih ada kefanatikan kiai dengan berkata bahwa, “Jika tidak masuk dan memilih partai ini, berarti kafir, murtad, dan darahnya boleh dibunuh”. Berarti sudah dapat dikatakan itu sangat berbahaya dan terancam tindak pidana.

Sungguh sangat miris pernyataan tersebut. Apabila konteksnya adalah berada di sebuah wilayah yang notabene kondisi sosial masyarakatnya atau pengetahuan masyarakatnya masih rendah dan hanya ikut dan taat pada pemimpinnya, maka tindakan tersebut harus benar-benar dihindari.

Bisa dibayangkan akibat dari konflik tersebut, yaitu rusaknya fasilitas umum, beberapa rumah warga hancur bahkan terbakar, banyaknya korban jiwa dan luka-luka. Dari pertengkaran tersebut bisa didapatkan suatu pelajaran yaitu pentingnya memupuk rasa toleransi, tidak fanatik akan suatu bidang politik, dan dunia yang berbasis Islam (dalam hal ini pesantren) harus netral terhadap berbagai politik praktis.

Pesantren (berbasis Islam) haruslah menjadi penengah (tidak memihak). Karena pesantren menjadi salah satu tempat yang seharusnya bebas dari politik praktis. Pesantren tidak boleh terjun atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu. Pesantren dapat dijadikan sebagai tolok ukur kekuatan Islam, jika pesantren sudah tidak sesuai dengan prinsipnya, maka kekuatan Islam pun akan semakin terpuruk.

Akhir-akhir ini, pada pemilu legislatif (pileg) 2014 yang terjadi adalah temuan adanya yayasan pendidikan Islam (sekolah-sekolah keagamaan) dan pesantren yang terindikasi kuat adanya politik praktis di wilayah Jepara.

Di yayasan pendidikan Islam, para caleg memanfaatkan hubungan kekerabatan mereka dengan pengurus yayasan untuk meminta dukungan penuh dari para guru beserta karyawan-karyawan lainnya. Bingkisan sembako dan amplop pun disebar. Tidak tanggung-tanggung, para caleg juga siap menyumbangkan dana yang relatif besar untuk pembangunan gedung sekolah beserta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Di pesantren, politik praktis masuk melalui calon legislatif (caleg) yang dulunya pernah *nyantri* atau mondok di pesantren. Karena masih punya ikatan kiai-santri atau bahkan ada yang punya ikatan keluarga, inilah yang dimanfaatkan oleh caleg untuk meminta dukungan penuh dari pesantren.

Dalam pemilu, caleg paham betul bahwa kaum santri adalah kekuatan sosial dan politik yang selalu diperhitungkan. Pertautan elite santri akan membekali legitimasi bagi caleg. Di sinilah caleg tidak mau kehilangan kesempatan meraih simpati dan suara dari kaum santri dan konvergensi kepentingan pun terjadi.

Peran pemuda santri yaitu aktif dalam pemilu, tanpa adanya memihak antara partai satu dengan yang lain. Para pemuda harus bebas dari *money politic*. Karena mereka telah memiliki pengalaman dan bekal dari pesantren. Semestinya mereka dapat konsisten dengan pilihan mereka tanpa ada paksaan dari orang lain.

Dalam dunia politik peranan pemuda santri dalam membangun budaya demokrasi di Indonesia yaitu para pemuda santri dapat terjun langsung dalam membangun Indonesia dengan ikut aktif dalam dunia politik, membebaskan dunia politik dari politik uang, meminimalkan KKN yang terus merajalela dalam dunia politik yang ada di Indonesia, meningkatkan keadaban publik (kesantunan dalam demokrasi), dan mencegah buruknya perilaku calon wakil rakyat (sebelum dan sesudah menjabat).

Ada semacam pendidikan budaya demokrasi di pesantren dari pemilihan lurah santri. Sikap santun, sportif, dan antipolitik uang harus dapat diterapkan dalam pemilihan lurah santri. Hal tersebut dapat dijadikan cara untuk memaksimalkan pendidikan budaya demokrasi yang dapat membekali para santri tentang berpolitik dan berdemokrasi yang benar demi kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam pemilihan lurah santri yang boleh menjadi calon biasanya yang dianggap senior atau yang dianggap mampu untuk menjadi lurah santri yang diseleksi melalui berbagai tes, salah satunya melalui pemahaman kitab-kitab kuning.

Pemilihan lurah santri mempunyai sistem atau aturan main yang cukup baik, yaitu tidak menggunakan uang sebagai sogokan atau sebagai jembatan agar para santri mau memilihnya, karena pendidikan budaya demokrasi di pesantren tidak boleh berbau uang (*money politic*). Sistem atau cara kampanye pemilihan lurah santri yaitu dapat melalui sosialisasi antarcalon dengan para santri, ataupun melalui kunjungan ke tempat-tempat para santri agar para santri dapat mengenal lebih jauh calon yang akan dipilihnya.

Adapun program yang dapat mendidik tentang pendidikan budaya demokrasi yaitu seperti program pemilihan lurah santri yang santun, sportif, dan antipolitik uang atau melalui program P4I (Pemikiran

Pembaharuan Pemuda Pesantren Indonesia), yang bertujuan agar para pemuda pesantren dapat bersifat netral dari berbagai ancaman dunia politik yang akan masuk dalam dunia pesantren yang bertujuan untuk meminimalkan kebiasaan politik uang, dan meminimalkan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Cara mensosialisasikan program tersebut dengan cara mengajak pemuda santri untuk dapat mengikuti dan mengembalikan budaya demokrasi yang bersih dari politik uang dan rasa memihak serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Adapun manfaat yang dapat diterima para santri ketika lulus dari pesantren lalu terjun ke masyarakat yaitu tidak mudah tergiur dengan *money politic*, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang lebih baik, tidak mudah fanatik terhadap partai tertentu, tidak mudah terpengaruh terhadap berbagai macam politik, dan yang paling penting adalah dapat menerapkan budaya demokrasi yang benar dan bisa ditiru oleh masyarakat.

## **Penutup**

Akhirnya, perlu ditegaskan kembali kepentingan politik dan kepentingan agama semestinya tidak dicampuradukkan. Sejarah telah mengajarkannya pada kita. Kita adalah pemuda masa kini. Untuk dapat menata dan merencanakan masa depan yang lebih baik, kita butuh sejarah. Kita perlu mempelajari pengalaman-pengalaman masa lalu untuk mengambil hikmahnya.

Pemuda santri tetap diharapkan bersifat netral terhadap berbagai jenis politik praktis. Hal tersebut merupakan manifesto yang paling nyata dari pemuda santri dalam mempelajari pendidikan budaya demokrasi. Ketika mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka akan bermental baja, serta tahan terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam berbudaya demokrasi.

# MENINJAU PERAN "KAUM GADGET"

DALAM KEMATANGAN DEMOKRASI KITA  
MENGHADAPI GENERASI KRITIS,  
REFORMIS, DAN DINAMIS

**Mochammad Arief Wicaksono**

SMAN 10 Malang

**D**igitalisasi demokrasi mengakibatkan pemerintah harus lebih teliti lagi dalam mendengarkan dan mengelola aspirasi dari warganya. Sebab, pada masa yang lebih mendatang, era masyarakat yang diunggulkan dalam mematkan demokrasi kita adalah masyarakat informasi, yaitu yang cerdas dan mapan dalam beropini. Mereka bisa leluasa mencipta, menyebarluaskan, dan berkomentar atas ide kebijakan tanpa harus menjadi anggota partai atau praktisi elite politik lainnya. Mereka hanya perlu menuliskan aspirasi, kritikan, saran, dan pujian melalui berbagai media sosial di jagat maya yang mereka gandrungi. Hal ini tentu menciptakan era sekaligus budaya baru bagi perjalanan demokrasi kita yang semakin hari semakin progresif untuk proses pematangan.

Proses ini tentu saja tidak *autopilot*, melainkan didalangi oleh

kaum muda sebagai pemegang dunia *gadget* yang selanjutnya menjadi penguasa di dunia maya. Data sensus penduduk terakhir, yakni pada tahun 2010 menyajikan bahwa warga kita saat ini mencapai angka 237. 641. 326 jiwa dengan komposisi warga produktif yang lebih besar dibandingkan dengan yang nonproduktif. Sebanyak 77 juta jiwa dari jumlah itu adalah kaum muda dengan rentang usia 17-31 tahun. Kalau ada yang mengatakan bahwa negara kita akan kebanjiran bonus demografi sebagai kekuatan ekonomi dan politik, maka penulis melalui esai sederhana ini berpendapat bahwa bonus demografi itu masih berupa peluang. Apakah itu akan kita ambil dan kelola dengan apik, atau kita abaikan sia-sia. Kembali ke topik awal, peran digitalisasi demokrasi ini turut berperan penting dalam membukakan mata batin sekaligus mendidik masyarakat kita akan pentingnya diri mereka dalam upaya gotong royong membangun negeri. Sehingga, bonus demografi menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini, era digitalisasi demokrasi menjadi alternatif untuk menyadarkan.

Munculnya jaringan komunikasi elektronik berlingkup dunia tanpa batas yang menghubungkan hati dan pikiran miliaran orang telah menautkan mereka dengan volume data yang semakin hari semakin membesar. Ini tidak saja mengakibatkan apa yang kita sebut sebagai “globalisasi”, tetapi juga “glokalisasi”, yaitu proses yang pada awalnya mengglobal pada tahap selanjutnya terdomestikasi kembali ke dalam negara sendiri (glokalisasi) menjadi sebuah isu yang turut mempengaruhi lika-liku kehidupan kita dalam bernegara. Kalau pemerintah tidak lebih tanggap dan lekas dalam mengelola berbagai isu yang muncul baik karena proses globalisasi maupun glokalisasi, sekali lagi, generasi muda yang kritislah menjadi pemenangnya.

### **Masyarakat Informasi dan *Concerned Citizen***

Sebagai salah satu dari 77 juta jiwa di atas, geli hati penulis setiap menyaksikan budaya berdebat antar-kontestan setiap akan diselenggarakannya kontestasi pemilihan umum. Masing-masing calon cukup percaya diri ketika berdiri di belakang mimbar debat hanya karena mereka telah membawa banyak data. Calon petahana

percaya diri karena telah membawa data keberhasilannya, sedangkan calon nonpetahana percaya diri dengan data kegagalan program dari si calon petahana. Kejadian-kejadian, program-program, dan sejumlah birokrasi yang telah ditata pada akhirnya secara sistematis menjadi sebuah rangkaian datum. Rangkaian datum tersebut ujung-ujungnya menjadi data. Namun, data-data itu belum menjadi sebuah informasi, karena belum dikelola bersama ilmu pengetahuan. Budayawan Sujiwo Tedjo dalam *Dalang Galau Ngetweet* menerangkan, maka jangan bangga dengan predikat bahwa kita adalah masyarakat informasi. Jangan-jangan kita masih menjadi masyarakat data.

Setiap hari kita dimanjakan oleh miliaran data dari industri telematika tanpa kita dapat melahirkan keputusan dan pendapat apapun atas dasar timbunan data itu. Hanya pemimpin yang bijak dapat mengubah rangkaian data menjadi sebuah informasi karena ia telah mengelolanya bersama pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tentu kemampuan mengelola ini tak hanya pemimpin saja yang harus memiliki, rakyat pun harus memiliki. Maka, agenda demokrasi kita salah satunya adalah membangun sebuah masyarakat informasi yang intelek.

Masyarakat yang mampu menerjemahkan data menjadi informasi, pada ujungnya akan melahirkan sebuah *concerned citizen*, yaitu masyarakat yang peduli. Masyarakat yang peduli bukan dalam artian untuk mereka yang rajin mengkritik sembarangan, mencemooh dan menjelek-jelekkkan pemerintah, tetapi *concerned citizen* di sini adalah mereka yang secara proaktif mengingatkan rezim yang *keblinger* dengan pendekatan sosial-budaya-politik yang santun tapi kritis dan memuliakan pemimpin yang memang patut dipuji.

Singkatnya, semua itu demi sebuah kesadaran bersama bahwa berdemokrasi dan berpolitik itu sejatinya adalah dalam rangka berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, setiap orang tak peduli ia raja, menteri, gubernur, jenderal, buruh tani, pedagang, atau tukang sayur secara kompak dan gotong royong turut berkontribusi untuk meletakkan unsur-unsur peradaban bangsa. Masyarakat yang dicerdaskan oleh era digital demokrasi ini didominasi oleh kalangan muda yang cenderung reformis dan linier. Tugas mereka sejatinya

bukan hanya aktif mengkritisi kebijakan saja, tetapi sebenarnya mereka juga punya kewajiban untuk turut mendidik masyarakat lainnya yang cenderung sinis, apatis, dan buta informasi terhadap warna-warni perpolitikan.

Orang-orang yang apatis ini sebenarnya adalah juga pemegang era *gadget*, pun masuk dalam dunia sosial-politik yang sarat akan hiruk pikuk. Mereka bukan termarjinalkan karena sosial-budaya-politiknya tidak diakui oleh negara, tetapi mereka lebih memilih tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut soal itu semua. Parahnya, jika tidak dibukakan mata batinnya oleh era digitalisasi demokrasi ini, mereka juga akan tutup tangan untuk turut membantu menyukseskan kematangan demokrasi kita. Pada akhirnya, agenda untuk memajukan bangsa dan negara juga menjadi terhambat.

Dari generasi yang apatis itu, terbukti dari jumlah angka golongan putih (*golput*) atau tidak memilih dari pemilu ke pemilu yang semakin meningkat. Angka *golput* ini didominasi oleh kaum muda. Secara kualitatif, *golput* yang merebak adalah karena alasan apatis, bukan apolitis maupun administratif. *Golput* karena apatis ini cukup membahayakan bagi kematangan demokrasi kita. Melihat angka *golput* pada pemilu 2004 (23,34%) dan pemilu 2009 (39,10%), kurang pas rasanya mengatakan bahwa Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu pada 2004 dan 2009 tersebut.

### **Mengejar Generasi Dinamis**

Salah satu usaha meningkatkan angka partisipasi politik adalah dengan mendekati kaum muda melalui dunia mereka. Direktur Riset Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan, anak-anak muda sekarang masih bisa diberi pemahaman mengenai politik yang baru. Pola pikir mereka lebih terbuka. Pendekatan kepada mereka harus menggunakan pendekatan yang komunikatif, menggunakan gaya bahasa mereka, dan harus dua arah. Penetrasi nilai-nilai pada mereka harus melalui komunitas di mana mereka berada, tidak bisa per individu.

Dalam konteks budaya berdemokrasi di negeri ini, mereka, generasi

pemegang *gadget*, adalah para pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 80 juta jiwa (Sensus Penduduk 2010) dari total pemilih yang mencapai angka 180 juta jiwa. Sebagai penguasa *tlatah* maya, mereka mengisi ruang publik di media sosial dengan berbagai komentar pedas dan lekas. Apa yang mencuri perhatian di masyarakat, akan menjadi perhatian mereka segera. Selanjutnya, berbagai tanggapan dan kritik mereka salurkan dengan bergegas, tanpa beban dan ringan. Secara biologis, mereka adalah anak dari orang tuanya masing-masing. Tetapi secara ideologis, mereka adalah anak kandung media sosial. Sebagai anak kandung media sosial, mereka siap merespon apa saja yang terjadi. Segala hal yang menciptakan kekaguman, kegembiraan, dan euforia mereka akrabi dengan riang. Tak terkecuali isu politik yang dilakoni oleh generasi sebelumnya. Secara ideologis, mereka ini tidak memiliki beban psikologis untuk mengkritisi. Lahir setelah rezim Orde Baru tumbang adalah salah satu penyebabnya.

Di balik sekadar julukan generasi "juru sorak" di dunia sosial-politik, generasi ini bisa dengan tajam mem-*bully* politikus tak becus. Sebaliknya, menjunjung tinggi-tinggi pemimpin yang mereka anggap baik. Kritikan dan pujian mereka sejatinya tidak memiliki tekanan politik apapun. Karena itu, mereka sangat dinamis, mudah berpindah sari satu isu ke isu lainnya tanpa mengingat lagi apa yang telah mereka lontarkan pada isu sebelumnya.

Pemikir sosial dan kebudayaan Yasraf Amir Piliang mengatakan, perlu strategi mencuri perhatian atau seduksi tanpa jeda berupa aneka bentuk penampakan luar dan permainan tanda untuk memikat generasi ini. Karena generasi ini sangat dinamis, yaitu: sangat cair, labil, mudah berpindah, dan bergerak cepat. Pergerakan mereka, cenderung linier dan reformis ke arah yang lebih baik dan mapan. Yang paling penting bagi penyelenggara negara untuk mematangkan demokrasi kita atas fenomena generasi demokrasi digital ini, adalah masuk ke dunia mereka, memahami mereka secara utuh, dan menjaga perasaan serta kesetiaan mereka.

Masuk ke dalam dunia mereka bukan hanya berarti ikut-ikutan membuat akun di sosial media, tetapi lebih kepada esensinya, yaitu ungkapan-ungkapan dan aspirasi yang disampaikan oleh generasi

muda mampu diambil dan diendapkan dengan baik oleh para pembuat kebijakan. Pemerintah juga secara proaktif memberikan respon balik dengan bahasa yang penuh wibawa dan sarat akan pengertian yang baik pula. Ketika interaksi ini terjadi secara berulang-ulang, maka pemerintah akan mampu memikat hati sang generasi muda karena mereka telah dipahami secara utuh. Bukan dari segi tata bahasa yang digunakan, melainkan lebih kepada inti pesan yang disampaikan. Ketika “jatuh hati” antara generasi muda dan sang penyelenggara negara telah terpaut, maka tugas dari pemerintah adalah menjaga kesetiaan dan perasaan mereka.

Tengok saja aksi empati yang digelar di dunia maya melalui media sosial tentang *Save KPK* (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada awalnya, dukungan untuk mendukung KPK dalam edisi “Cicak vs Buaya” itu hanya gencar di dunia maya. Pada akhirnya, kekuatan itu muncul sebagai kekuatan nyata di dunia riil untuk menyelamatkan KPK. Ingatlah kita juga pada keberhasilan Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam meraih DKI 1 dan 2. Mereka secara cerdas mampu mengorganisir kekuatan di media sosial yang pada akhirnya juga mengantarkan mereka pada keunggulan di pertarungan nyata.

Untuk tetap mendapat dukungan dari generasi yang jumlahnya menggoda ini, yang diperlukan pemerintah adalah pendekatan yang bijak. Bukan malah menggunakan pendekatan yang cenderung represif dan dimusuhi. Selanjutnya, segala kepentingan demokrasi yang berinti pada terbukanya akses aspirasi warga negara dapat menjadi salah satu pintu untuk membentuk masyarakat informasi yang cerdas, karena mereka telah dididik secara tak langsung oleh masyarakat sendiri. Nantinya, Anggota legislatif, praktisi eksekutif, dan aparat yudikatif akan terseleksi secara bijak. Mereka yang terpilih adalah mereka yang memang layak karena pemilih yang bijak pula melalui digitalisasi demokrasi ini.

Pada akhirnya, upaya menegakkan dan mematangkan budaya dalam berdemokrasi kita akan menemui optimisme. Melalui digitalisasi demokrasi yang dijalankan penuh oleh kaum *gadget* dan direspon secara apik oleh generasi senior, demokrasi kita akan

terbantu untuk lebih matang dan penuh kesantunan karena berbagai aspirasi dari bawah dan apapun bentuknya aspirasi tersebut akan dapat terakomodasi dengan baik (*bottom-up democracy*). Sehingga mengendap sempurna di meja-meja pemangku pengambil kebijakan untuk kebaikan bangsa dan negara ini.

### **Daftar Pustaka**

- BPS Indonesia. 2014. "Jumlah Penduduk Indonesia tahun 1971-2010". [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1). Diakses Mei 2014.
- Leksono, Ninok. 2014. *Mengintip Menu Presiden Mendatang, Menatap Indonesia 2014*. Jakarta: Kompas.
- Sadikin, Amir dan Nina Susilo. 2014. *Merawat Benih Pendorong Perubahan. Menatap Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Wijaya, Yunarto dan Ramlan Subakti. 2014. "Mengejar dengan Lemas dan Bergagas", dalam *Menatap Indonesia 2014*. Jakarta: Kompas.



# RESTORASI BUDAYA DEMOKRASI BANGSA

## MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER KAUM MUDA

**Denise Weldy Hellen Sahulata**  
SMA Kristen Kalam Kudus Ambon

**D**emokrasi saat ini menjadi topik yang penting bagi masyarakat Indonesia. Apalagi di tahun 2014 ini, bangsa Indonesia memasuki suatu momentum demokrasi secara nasional yaitu pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden serta wakilnya. Melalui pesta demokrasi ini, setiap warga negara yang telah cukup umur dapat memberikan haknya untuk memilih dan juga dipilih. Ini merupakan salah satu peristiwa budaya yang telah mencatatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun di sisi lain, praktik demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai hal yang seharusnya tak boleh terjadi. Banyak peristiwa kecurangan yang sering muncul menjelang pesta demokrasi, mulai dari kampanye berunsur penyogokan, kampanye hitam, serta penggunaan anggaran negara untuk keperluan politik tertentu, bahkan penggunaan kekerasan dan tindak kriminalitas dalam demokrasi pun masih sering terjadi. Demokrasi dengan unsur

kekerasan serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti ini telah mencoreng citra, harkat, dan martabat bangsa Indonesia yang menyandang status sebagai negara demokrasi.

Jika pada zaman penjajahan, bangsa Indonesia dididik untuk mengabdikan bagi penjajah di negeri sendiri, tak jauh beda halnya dengan ironi yang dihadapi bangsa Indonesia kini, di mana ada segelintir orang dalam praktik berdemokrasi dengan sadar menjajah bangsanya sendiri. Banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam diri masyarakat Indonesia yang memandang kedudukan dalam pemerintahan sebagai hal yang mendatangkan *income* sebesar-besarnya. Tidak heran kalau di Indonesia sering terjadi fenomena di mana orang tanpa latar belakang politik yang jelas terjun ke dunia politik dengan menyogok sana-sini demi mendapatkan kursi dalam pemerintahan dan menuai keuntungan sebesar-besarnya serta mengganti modal awal tadi. Tak hanya itu, bisnis jual beli “kursi” yang mendatangkan *income* besar ternyata marak terjadi di mana-mana. Perilaku politik kotor seperti ini seakan menjadi hal yang biasa dalam dunia demokrasi Indonesia, bahkan telah menjadi budaya yang terus dipraktikkan. Hasil dari berbagai kecurangan ini adalah amburadulnya demokrasi di Indonesia, yang ada hanyalah demokrasi berorientasi uang atau materi belaka. Akhirnya, citra demokrasi Indonesia menjadi ternoda. Harapan untuk memperbaiki citra dan budaya demokrasi Indonesia akhirnya menjadi sebuah agenda besar yang harus diperjuangkan sehingga tercipta budaya demokrasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Bertolak dari kondisi dan konteks demokrasi saat ini, maka Indonesia sangat membutuhkan sebuah proses pemulihan (restorasi) budaya demokrasi, khususnya di kalangan kaum muda karena merekalah generasi penerus bangsa dan pelaku-pelaku demokrasi Indonesia masa depan. Restorasi budaya di kalangan kaum muda hanya dapat terjadi jika para kaum muda mengalami suatu proses revolusi mental dan karakter. Karakter yang kuat akan menentukan sikap, cara pandang, pola pikir dan perilaku para kaum muda dalam berdemokrasi, yang pada gilirannya akan melahirkan budaya demokrasi yang baik.

Restorasi berasal dari kata *to restore*, menurut *Webster's Third New International Dictionary*, diberi arti *to bring back or to put back into the former or original state*, atau *to bring back from a state of changed condition*. Jadi menurut kamus *Webster*, restorasi bermakna mengembalikan pada keadaan aslinya, atau mengembalikan dari perubahan yang terjadi. Dalam kaitan dengan proses demokrasi di Indonesia saat ini, restorasi berarti pemulihan kembali kondisi demokrasi pada keadaan yang lebih baik. Mengapa perlu sebuah proses restorasi? Hal yang paling mendasar adalah karena catatan sejarah kita yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dirancang oleh para *founding fathers* yang tergabung dalam suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal-hal yang sangat mendasar dirumuskan secara cermat baik dalam teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia maupun dalam Undang-Undang Dasar 1945, utamanya Pembukaannya, yang berisi konsep, prinsip dan nilai-nilai yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep, prinsip, nilai tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelembagaan negara serta dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Semuanya ini harus menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam hal membangun karakter, cara berpikir dan berperilaku. Para pendiri negara ini telah mempunyai visi yang jauh ke depan bahwa hanya dengan karakter yang kuat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka Indonesia akan menjadi negara kuat, maju dan tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Karakter warga negara Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Jika ditarik ke belakang para pelaku demokrasi dalam konteks saat ini, dulunya mereka merupakan kaum muda yang hanya dididik secara akademis namun bobrok dalam hal mental dan karakter. Dalam hal ini pembangunan mental dan karakter di kalangan kaum muda menjadi penting untuk ditanamkan sejak dini sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang punya integritas diri yang kuat.

Masa remaja merupakan saat-saat transisi ke masa dewasa di mana dia sudah dapat memberikan suaranya dalam pemilihan

umum. Sifat remaja yang masih mencari jati diri, serta umumnya masih labil menjadikan remaja usia sekolah atau kaum muda sebagai sasaran empuk praktik kotor demokrasi. Banyak kaum muda yang disogok untuk memenangkan oknum tertentu dalam pemilihan umum, ada yang dibayar untuk memprovokasi dua kubu masyarakat demi kepentingan suatu golongan, banyak juga yang dibayar untuk melakukan aksi demonstrasi bagi kepentingan seseorang. Semua hal ini membuat masyarakat luar menilai kaum muda belum layak dan cukup dewasa untuk turut dalam kegiatan demokrasi tanah air. Namun sebenarnya, kaum muda dapat tegas menolak segala praktik hitam demokrasi tersebut jika sedini mungkin karakter serta *mindset* mereka ditata dan dididik untuk mengerti arti penting demokrasi bagi masa depan bangsa.

Pendidikan demokrasi harus menjadi dasar yang kokoh dalam diri tiap kaum muda Indonesia sehingga dengan sendirinya terbentuk integritas diri yang membentengi mereka dari praktik hitam demokrasi. Sedari kecil, mereka harus dibiasakan dan membiasakan dirinya untuk terlibat dalam usaha membantu memecahkan masalah-masalah tertentu dalam keluarga dan sekolah yang mana menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri serta menuntun ke arah kedewasaan. Pembiasaan ini perlu dilakukan dan merupakan tanggung jawab orang tua serta guru di sekolah. Pendidikan demokrasi atau pola asuh demokratis dapat membantu mengubah *mindset* dan pembentukan karakter kaum muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pola asuh demokratis pada dasarnya adalah suatu model pengasuhan dengan menggunakan penjelasan, diskusi, penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Pola asuh ini memperhatikan keinginan anak, sepanjang keinginan tersebut sesuai dengan nilai-nilai standar yang ada. Jika ada keinginan dan perilaku anak yang kurang disetujui, maka akan ada komunikasi timbal balik antara orang tua dan anak (Hurlock, 1993). Lebih jauh dijelaskan oleh Steinberg & Belksy (1991) menyebut pola asuh demokratis sebagai pola asuh autoritatif yang memberikan kebebasan dan kontrol seimbang. Ada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak serta terdapat kehangatan orang tua di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak dengan pengenalan akan batasan-batasan yang menjadi aturan tertentu. Diperlukan relasi dan komunikasi timbal balik yang hangat antara orang tua dengan anak, sehingga dengan demikian orang tua dapat menanamkan nilai dan pemikiran-pemikiran yang baik kepada si anak yang pada gilirannya mereka tumbuh menjadi kaum muda yang bertanggung jawab dengan moral dan jati diri yang kuat.

Pola asuh demokratis memiliki karakteristik utama yakni mengutamakan pendekatan berdasarkan pada nilai-nilai demokratis, yaitu kebebasan berpendapat serta hubungan yang bersifat terbuka dalam perilaku saling menghargai. Pola asuh demokratis akan membentuk karakter dan perilaku demokrasi yang pada gilirannya akan melahirkan sebuah budaya berdemokrasi.

Pola asuh demokratis akan menanamkan prinsip-prinsip budaya demokrasi bagi kaum muda, meliputi: *Hak Asasi Manusia*. HAM adalah dasar terbentuknya negara demokrasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebebasan tiap orang. Kesamaan hak yang diberikan orang tua maupun guru di sekolah kepada tiap anak dapat mengembangkan rasa persamaan hak dalam diri tiap anak.

*Transparansi*, merupakan hak konstitusional warga negara. Transparansi dalam sebuah negara menentukan pertumbuhan demokrasi negara tersebut. Transparansi dapat diperoleh dari dalam keluarga yaitu melalui sikap saling terbuka antara anak dan orangtua. Hal ini diharapkan dapat menjadikan sang anak menjadi pribadi yang nantinya bersih dalam berdemokrasi.

*Partisipasi*. Partisipasi masyarakat sangat menonjol dalam dunia demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat dituntut untuk saling mengoreksi satu sama lain. Seorang anak pun dapat melatih diri untuk nantinya berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi lewat kehidupan sehari-hari dalam keluarga di mana masing-masing anggota keluarga dapat saling memberikan saran dan masukan satu sama lain.

*Pluralitas*. Demokrasi tidak diikat oleh satu persamaan, tetapi oleh

ragam perbedaan. Demokrasi tumbuh subur dalam alam multietnis, suku, dan agama. Negara demokrasi tidak memberikan perhatian lebih pada satu etnis, suku, dan agama tertentu. Dalam hal ini seorang anak harus membiasakan dirinya untuk berada dalam suatu lingkungan majemuk dan belajar untuk bersikap netral.

*Egaliter.* Demokrasi menghargai semangat egaliter (sederajat). Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Konstitusi tidak pilih kasih. Egaliter juga bermakna kesederajatan dalam berbangsa dan bernegara. Egaliter atau kesederajatan penting ditanamkan dalam diri anak bangsa agar figur seorang pemimpin masa depan yang nantinya diperoleh adalah sosok yang tidak diktator.

Semua hal di atas sangat dibutuhkan oleh seorang remaja dan kaum muda untuk proses perkembangannya, sehingga mereka merasa lebih diakui, mandiri dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dialami. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemampuan seorang remaja dan kaum muda dalam menghadapi masalah menjadi lebih baik dan rasional. Produk yang dapat dihasilkan dari penerapan nilai-nilai demokrasi bagi anak usia sekolah (remaja) ini adalah mereka akan tumbuh menjadi kaum muda dengan kematangan dalam menghadapi dan mengalami secara nyata bagaimana proses berjalannya demokrasi di Indonesia baik dalam peran untuk memberikan suara lewat pemilihan umum ataupun juga dalam kesiapan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota legislatif maupun sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Kaum Muda Indonesia perlu memiliki gambaran bagaimana sosok pemimpin masa depan. Ciri pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju adalah memiliki integritas diri yang tinggi, netral dan profesional, transparan, orientasi demokrasi tidak pada uang dan materi semata, mencintai rakyat dan tidak diktator.

Komponen yang tak kalah penting dalam pembentukan karakter kaum muda dalam berdemokrasi adalah peran pers dan media. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan mengenai fungsi pers antara lain: sebagai wahana komunikasi massa, sebagai

penyebar informasi, sebagai pembentuk opini dan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi. Dalam kehidupan berdemokrasi, masyarakat sangat membutuhkan pers sebagai pengawas dalam menopang jalannya demokrasi di Indonesia. Jika ada hal yang dirasa tidak benar dalam praktik demokrasi, oleh pers bisa diantisipasi dengan melakukan cek dan ricek untuk memperoleh suatu kebenaran. Masyarakat demokratis juga membutuhkan media untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Begitu juga untuk mendapatkan semua informasi penting terkait dengan jalannya demokrasi di Indonesia, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Dengan kata lain, pers merupakan mata rantai yang sangat penting dalam masyarakat demokratis dalam membidik jalannya sebuah proses demokrasi. Dalam kaitan dengan upaya restorasi budaya demokrasi di Indonesia saat ini, pers mempunyai peran strategis sebagai media propaganda bagi kaum muda agar melakukan sebuah perubahan. Propaganda yang dimaksud disini, bukanlah upaya adu domba, melainkan lebih kepada upaya memberikan ruang diskusi yang sehat dan rasional bagi kaum muda sehingga membangun opini dan membentuk *image*, yang pada gilirannya mendorong kaum muda untuk tampil menjadi agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi.

Bangsa Indonesia kini mempunyai tugas rumah yang tidak mudah yaitu menyiapkan kaum muda yang berkarakter kuat dan bermoral baik untuk membangun dan memulihkan kembali budaya demokrasi Indonesia. Di tangan kaum mudalah masa depan demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Kaum muda Indonesia pun kini memiliki beban yang tak ringan yaitu menjadi agen demokrasi dan bertanggung jawab atas jalannya demokrasi Indonesia di masa depan dengan mewujudkan figur-figur pemimpin bangsa Indonesia yang berintegritas, netral, profesional, bijaksana, cinta rakyat, dan anti-diktator. Semuanya itu dapat diwujudkan dan lahir dari kaum muda Indonesia masa kini yang punya karakter dan jati diri yang kuat. *S e m o g a\**

**Daftar Pustaka**

- Affandi, Dani. 2011. "Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi." <http://www.articlefandi.blogspot.com/2011/10/makalah-pengertian-demokrasi-dan.html?m=1>.
- SkripsiPsikologi.com. 2010. "Pola Asuh Orang Tua dan Tipenya." <http://www.skripsipsikologie.wordpress.com/2010/01/09/pola-asuh-orangtua-dan-tipenya/>

# PESONA ITU BERNAMA MINIATUR DEMOKRASI INDONESIA

**Putri Demes Dharmesty**  
SMA Santa Maria Surabaya

**A**da pemandangan yang berbeda di sekolah kami hari ini. Seluruh siswa dan guru berbaris rapi sambil membawa secarik kertas kecil yang dilipat sama rapinya dengan barisan itu. Tampaknya ada sesuatu yang penting di kertas itu yang dibawa tangan-tangan penuh antusias dan penuh keyakinan. Satu per satu memasukkan kertas ke dalam kotak-kotak suara yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 4.

Ya, rupanya hari ini adalah hari “Pemilihan Umum” (Pemilu) Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolah kami. Bagi kami, inilah pesta demokrasi dalam lingkup kecil yang sederhana nan indah. Kami harus memilih calon yang tepat. Mereka yang terpilih harus menjadi pekerja keras, memiliki karakter kuat, jujur, dan bisa menjadi teladan bagi siapa saja. Kami memerlukan implementasi program-program kegiatan sekolah yang kreatif dan inovatif yang menjadi landasan dan visi-misi dari bakal ketua OSIS di sekolah kami.

Prinsipnya, kami tidak boleh memilih sembarang orang. Kami

harus mengesampingkan pandangan “dia itu sahabat atau teman akrab saya” atau bahkan “dia teman sebangku saya”. Apalagi, untuk menjadi golongan putih alias golput. Pastinya seratus persen itu tidak boleh. Oleh karena kami memahami bahwa satu suara dari kami sangat berharga demi tegaknya sebuah kata demokrasi.

Inilah pesta demokrasi dalam lingkup kecil yang sederhana nan indah. Bisa jadi, sempat hilang di benak kita bahwa pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah adalah salah satu bentuk miniatur demokrasi yang sungguh nyata. Para siswa yang memiliki kelebihan dalam berorganisasi akan melaju menjadi pengurus OSIS sejati dan terus ditempa untuk saling bekerja sama agar terbentuk organisasi yang kompak dan solid. Mereka yang terpilih menjadi pengurus OSIS tentunya harus memiliki gagasan, ide, dan pikiran cemerlang yang disertai dengan keberanian untuk memajukan nama baik sekolah.

Sementara, guru dan siswa lain yang tidak tergabung dalam kepengurusan OSIS, bukan berarti mereka menjadi suatu golongan apatis dan tidak turut membangun keberhasilan demokrasi di suatu sekolah. Pemilihan pengurus OSIS merupakan suatu ajang saat setiap warga sekolah menyuarakan pendapat untuk memilih ketua OSIS-nya yang tepat. Oleh karena itu, inilah prinsip hakiki sebuah demokrasi. Setiap warga sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun. Siapapun bebas memilih sesuka hatinya.

Merupakan suatu keberuntungan bagi generasi kita saat ini yang sudah bisa dikatakan enak menikmati “fitur-fitur” demokrasi yang lengkap seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, transparansi atau keterbukaan demokrasi dan lain-lain. Perlu disyukuri pula itu semua karena jasa para pejuang kemerdekaan yang membuat kita dapat duduk dengan nyaman menikmati kecanggihan alat-alat teknologi dan dapat mengenyam pendidikan setinggi langit.

Pada dasarnya, ditilik dari sejarahnya kata demokrasi pertama kali muncul di Athena (507-508 SM). Pada zaman itu, Athena menganut demokrasi langsung saat seluruh warga memiliki hak untuk

menyuarakan pendapat di majelis legislatif. Sementara, asal muasal kata “demokrasi” itu sendiri adalah dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Benang sarinya adalah demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat atau di tangan warganya.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem demokrasi langsung berkembang pula menjadi demokrasi perwakilan. Seperti yang dianut di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Artinya, dari sekian banyak jumlah penduduk di suatu negara, dipilihlah beberapa orang yang dipercaya agar dapat menjalankan roda pemerintahan sebagai seorang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara, untuk warga negara lain, tidak menutup kemungkinan dapat menyuarakan pendapat untuk mengawasi pemerintahan yang telah dijalankan dengan cara memberi kritikan atau usulan.

Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi sebagai hak asasi warga negara. Sebuah gagasan atau ide harus dihargai dan tidak memandang miskin, kaya, bangsawan, cendekiawan, tokoh keagamaan, atau siapapun. Pendeknya, demokrasi dikenal dengan slogan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (demokrasi menurut Abraham Lincoln) karena melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakatnya.

Bukti yang paling nyata bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemilu inilah, partisipasi rakyat paling minimal berupa hak suara yang diberikan.

Jika melihat hakikat suatu negara demokrasi yang amat menghargai pendapat dan keterbukaan, sudah selayaknya muncul kehidupan bangsa yang teratur, aman, dan tenteram pula. Artinya, dengan adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan rakyat serta sebaliknya, diharapkan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan baru yang dapat muncul ke permukaan.

Misalnya saja, kita bisa mengambil contoh sederhana mengenai

penarikan pajak negara. Pemerintah menarik pajak kepada warganya untuk pembangunan dengan perhitungan biaya yang telah disesuaikan. Kemudian, pemerintah melakukan pembenahan diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana umum. Setelah itu, pemerintah juga mensosialisasikan rincian penggunaan pajak tersebut kepada seluruh warganya. Bila ini telah dilakukan dengan baik, tidak akan timbul kecurigaan penyalahgunaan wewenang dari warga kepada pemerintah karena adanya pembangunan nyata dan laporan yang telah disosialisasikan secara transparan.

Berdasar fenomena itu, bukankah sistem di negara demokrasi seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dibanding sistem monarki atau oligarki yang sangat tertutup dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja? Namun, menjadi tanda tanya bagi kita semua, mengapa negara kita Republik Indonesia yang secara jelas menganut pemerintahan yang demokratis masih terjebak dalam berbagai masalah? Tingkat kemiskinan yang tak kunjung membaik, ledakan penduduk, kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih buruk, angka kriminalitas yang tinggi, dan berbagai masalah sosial lainnya yang terus muncul ke permukaan.

Bukankah seharusnya, bila demokrasi benar-benar telah dilaksanakan dengan baik, negara kita dapat terus naik level menjadi negara maju? Keinginan ini bukan menjadi sebuah mimpi yang kosong mengingat bangsa Indonesia telah hampir enam puluh sembilan tahun merdeka dan terlepas dari belenggu penjajahan. Namun, faktanya kemajuan pembangunan bangsa Indonesia masih “jalan di tempat”. Lalu, apa yang salah di negara kita? Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara maju dengan beragam kekayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

### **Pemuda Aset Bangsa**

Seringkali, sebagai warga negara kita sering kali berteriak menuntut pemerintah membuktikan janji-janji manis semasa kampanye. Namun, kenyataannya, janji-janji manis itu masih banyak

yang diingkari, bukan? Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri seberapa jauh keterlibatan dan kepedulian kita sebagai warga negara yang baik?

Harus diakui, perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan rakyat dan juga sebaliknya. Permasalahan yang mencuat di tanah air tidaklah semata-mata kelalaian para petinggi negara saja. Sebagai warga negara, partisipasi kita yang aktif merupakan sumbangsih berarti bagi kemajuan negara. Contoh kecilnya dengan menyumbangkan dan menyuarakan hak suara kita dalam kegiatan pemilu.

Faktanya, untuk hal yang paling kecil saja, warga Indonesia cenderung acuh dan abai serta lebih memilih menjadi golongan putih (golput). Menurut Menteri dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah terjadi penurunan partisipasi rakyat dalam memberikan hak suara pada setiap penyelenggaraan pemilu sejak 1999. Dilansir dari tempo.com, di 1999, tingkat partisipasi rakyat sebesar 92%. Di 2004 menurun menjadi 84% dan semakin jatuh di angka 72% pada pemilu 2009. Bahkan berdasarkan hasil survei Lembaga Riset dan Polling Indonesia jumlah golput pada 2014 ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 50%.

Bila untuk partisipasi yang paling kecil saja masyarakat masih kurang peduli, apalagi untuk partisipasi yang lainnya seperti menulis surat pembaca atau beropini, maupun tergabung sebagai anggota partai politik atau untuk partisipasi yang lebih besar? Padahal, peran warga dalam memberikan hak suara sangat menentukan masa depan bangsa.

Namun, secara historis dari sepuluh pemilu yang telah terlaksana, di 2014 ini, Indonesia boleh sedikit bernapas lega karena adanya wajah-wajah baru dari para pemilih pemula. Berdasarkan data yang dirilis KPU (Komisi Pemilihan Umum), jumlah total pemilih 2014 adalah 186.612.255 orang dan 30% di antaranya adalah anak-anak muda usia 17-22 tahun. Ini artinya ada sekitar 34-37 juta jiwa pemilih pemula.

Fenomena ini merupakan kabar yang menggembirakan karena pemilih pemula dipersepsi cenderung kritis, mandiri, independen, dan

pro-perubahan sehingga akan memberikan pengaruh baik terhadap hasil Pemilu 2014 nanti. Terutama untuk para generasi pemilih yang lahir di kisaran 1993-1997. Mereka adalah anak-anak muda yang tidak ikut merasakan pahitnya masa Orde Baru yang keras. Apalagi di zaman yang serba *modern*, arus politik mudah diawasi dengan kecanggihan *gadget-gadget* dalam genggam tangan. Perspektif ini akan mempengaruhi alasan anak muda dalam menentukan pilihannya. Misalnya, dengan selalu mempertimbangkan integritas tokoh dari partai politik tertentu, *track record*-nya, atau program kerja yang telah dijanjikan sehingga lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Namun, besarnya jumlah persentase pemilih pemula belum tentu memberikan hasil yang demokratis seperti yang diharapkan. Sebab, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para pemilih pemula ini akan menggunakan haknya secara maksimal pula? Seberapa jauh mereka mengenal calon-calon wakil rakyat di 2014 ini?

Berdasarkan survei yang digelar *Transparency International Indonesia* (TII) terhadap 1000 anak muda di Jakarta, sebanyak 69% akan menggunakan hak suaranya dalam pemilu, 29% belum memutuskan, dan 8% menyatakan tidak akan menggunakan hak suaranya. Meskipun sebagian besar anak muda akan menggunakan hak pilih mereka, data juga mengungkap bahwa 3 dari 4 responden masih belum mempunyai pilihan baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Melihat faktanya, masih banyak anak muda yang belum dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Terbukti, untuk 2014 ini saja, banyak anak muda yang masih buta terhadap parpol (partai politik). Berdasarkan riset yang dilakukan *YouSure* Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebanyak 65% mengaku masih belum mengetahui jumlah peserta parpol dalam pemilu 2014. Sungguh memprihatinkan.

Selain kurangnya sosialisasi KPU kepada para pemilih pemula, hal ini disebabkan wawasan terhadap kata “demokrasi” yang terlalu sempit. Demokrasi selama ini hanya dipahami sebatas pada frase “kebebasan

berpendapat,” bukan dari suatu partisipasi aktif masyarakatnya. Tentu saja ini sebuah pemahaman yang salah. Kebebasan berpendapat ini biasanya akan berujung pada aksi demo anarkis dan tawuran pelajar karena tidak dibarengi dengan tanggung jawab yang benar.

Dilansir dari *tempo.com*, 12 Februari 2014 yang lalu, seorang pelajar SMK Wiyata Kharisma, Ade Sudrajat (16) harus mengorbankan nyawanya karena celurit yang tertancap di kepalanya dalam peristiwa tawuran pelajar di Jalan Raya Kemang, Bogor. Selain itu, nyawa lain dari seorang pemuda Mojokerto harus melayang ketika sekumpulan remaja, kira-kira 20 orang menghadang laju sepeda motornya dan memukulinya dengan batu dan kayu (*Jawa Pos*, 7 Mei 2014).

Hal lain seputar tawuran pelajar juga ditemukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri, Jawa Timur. Sejumlah mahasiswa melakukan protes dan orasi menuntut pemecatan seorang dosen karena melakukan tindak kekerasan. Peristiwa ini berakhir dengan baku hantam dengan mahasiswa lain yang tidak setuju dengan aksi tersebut.

Kasus-kasus penyalahgunaan “kebebasan berpendapat” di Indonesia masih banyak terjadi, terutama di dunia pendidikan. Sungguh ironis, jika dunia pendidikan yang seharusnya dapat melahirkan generasi penerus harapan bangsa malah justru banyak ditemukan bibit-bibit yang menghancurkan dan memecahkan.

Kasus korupsi yang mencuat ke tanah air juga contoh lainnya. Fenomena ini pula ada di dunia pendidikan. Maraknya kasus mencontek adalah salah satu bukti nyata bibit-bibit anak muda yang simpang siur. Di tahun 2014 ini saja, Ujian Nasional yang telah berjalan juga diindikasikan terjadi kebocoran kunci jawaban. Dari kota Kediri, misalnya, kepolisian menemukan adanya siswa yang membawa kunci jawaban UN soal Matematika tingkat SMP (*Jawa Pos*, 7 Mei 2014). Sungguh memprihatinkan.

### **Demokrasi yang Bertanggung Jawab**

Pemahaman mengenai demokrasi sebagai bagian dari suatu “kebebasan berpendapat” bila tidak dibarengi dengan tanggung jawab,

maka hasilnya akan kacau balau. Lalu, apa gunanya apabila di 2014 ini banyak pemilih pemula yang dianggap cerdas dan kritis, tapi mereka tidak punya pemahaman yang benar mengenai makna demokrasi yang sesungguhnya?

Memberi pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu peran dari dunia pendidikan. Dalam hal ini untuk konteks pembentukan karakternya. Mengingat anak muda banyak menghabiskan waktu sehari-hari di lingkungan sekolah, sekolah harus memiliki strategi memasukkan pembelajaran demokrasi ke dalam *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi lewat nilai-nilai budaya dan kebiasaan sehari-hari. Sebab, pembelajaran kemampuan *soft skill* berdemokrasi ternyata tidak sama seperti membuat mie instan. Pembelajaran nilai-nilai demokrasi memerlukan sebuah proses yang tentunya tidak mudah dan perlu diperjuangkan.

Sebut saja, pemilihan ketua OSIS seperti yang telah penulis gambarkan di awal paragraf adalah salah satu contoh konkret bagaimana dunia pendidikan dapat mengajarkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Nilai-nilai demokrasi yang diajarkan sejak dini diharapkan dapat melahirkan para pemilih pemula yang tidak apatis. Syukur-syukur, ke depannya, anak-anak muda ini akan memiliki ketertarikan di bidang politik dan terjun langsung di dalamnya.

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari, mengatakan sudah waktunya bagi anak muda secara aktif masuk ke dalam sistem politik di Indonesia. Menurutnya, anak muda dengan pemikiran kritis dapat bermanfaat besar bagi pembangunan bangsa. Beliau menyebutkan, kalau sampai para pemuda tidak ada yang tertarik masuk ke dunia politik, itu adalah “lonceng kematian” bagi demokrasi Indonesia. Sebab, perpolitikan Indonesia akan terus menerus diisi oleh orang-orang yang tidak layak, jika tidak ada pengganti dengan visi misi membangun bangsa yang kuat.

### **Akses Menuju Bangsa Besar**

Dalam usaha memperbaiki nilai-nilai demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik, tentu diperlukan gerakan bersama. Bangsa Indonesia

harus kembali menghidupkan citra dirinya sebagai bangsa demokrasi yang besar. Nilai-nilai demokrasi ini hendaknya harus dipahami dan dimiliki oleh masing-masing warga negara. Khususnya, untuk para kaum muda yang berpengaruh besar bagi masa depan pembangunan negeri ini.

Demokrasi memiliki berbagai jalur yang harus ditempuh agar dapat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa. Menurut hemat penulis, berikut ini adalah beberapa langkah yang sekiranya bisa membawa bangsa kita lebih mewarnai dan membangun miniatur nilai-nilai demokrasi Indonesia ke depannya.

*Pertama*, pembelajaran dan pendidikan demokrasi dapat dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas-kelas. Misalnya, dengan kerja kelompok. Dengan begitu, tanpa disadari, para siswa telah belajar bagaimana bekerja sama dalam kelompok, memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan tugas tersebut, sekaligus untuk berani menyatakan pendapatnya kepada siswa lainnya secara bertanggung jawab. Jika kerja kelompok diterapkan dengan kreatif sebagai model pembelajaran di sekolah-sekolah, bagi penulis anak-anak muda ini akan semakin mengerti dan memahami betapa berharganya sebuah ide, pendapat, atau gagasan dari masing-masing orang untuk kemajuan bersama.

*Kedua*, bagaimana guru dan komunitas sekolah memberikan suatu keteladanan demokrasi bagi anak-anak didiknya. Bagaimana pun juga, seorang anak akan belajar dari sebuah teladan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, guru dan komunitas sekolah harus dapat menjunjung transparansi nilai-nilai demokrasi yang baik. Seperti, misalnya guru yang terbuka kepada siswanya mengenai kriteria penilaian dalam tugas dan ulangan-ulangan di kelas. Perlunya komunikasi yang baik antara guru dan siswa terkait hasil belajar. Jangan hanya sekedar siswa mengetahui nilai, tetapi tidak mengetahui di mana letak kesalahannya dalam memberikan jawaban di ulangan setiap harinya.

Sekolah juga perlu memberikan informasi keterbukaan, misalnya mengenai anggaran kegiatan sekolah. Termasuk uang gedung, uang kegiatan, uang ujian, dan lain-lain yang harus selalu disosialisasikan.

Selain anggaran, keterbukaan sosialisasi peraturan dan fasilitas sekolah lainnya juga harus dilakukan. Sekolah perlu dan terbuka terhadap kritik serta saran yang diberikan oleh siswa maupun orangtua. Dengan begitu, sekolah dapat memberikan teladan mengenai transparansi nilai-nilai demokrasi yang baik bagi para siswa.

*Ketiga*, perlunya kegiatan rutin pembelajaran berdemokrasi di sekolah-sekolah. Harus ada kegiatan nyata di luar pembelajaran. Misalnya, seperti yang telah diuraikan di awal mengenai rutinitas setiap tahun tentang kegiatan pemilihan ketua OSIS. Salut kepada sekolah-sekolah yang telah menerapkan kegiatan pemilihan ketua OSIS yang demokratis. Hal ini bisa dikembangkan di seluruh sekolah di Indonesia.

Selain itu, sekolah dapat mengadakan acara-acara seperti pemilihan duta sekolah, forum adu pendapat, pentas seni, bahkan lomba-lomba intra-sekolah. Perlunya menghidupkan organisasi seperti OSIS dan komunitas-komunitas ekstrakurikuler lainnya, misalnya musik, jurnalistik, olahraga, karawitan, Olimpiade Sains, dan sebagainya. Sebab, demokrasi tidak selalu harus “politik”, tetapi demokrasi adalah menjunjung tinggi suatu kebebasan yang bertanggung jawab.

*Keempat*, peran pemerintah yang terus memberi ruang dan ekspresi agar pendidikan karakter terus tumbuh dan tersemai baik. Sebab, nilai-nilai demokrasi tentunya merupakan sebuah paket lengkap dari pendidikan karakter itu sendiri. Jangan sampai standardisasi hanya dari segi nilai di atas kertas, tetapi melupakan nilai-nilai hidup yang menjadi kewajiban dunia pendidikan untuk diberikan bagi generasi muda.

*Kelima*, pendidikan akan nilai-nilai demokrasi adalah pendidikan *holistic*. Artinya, harus ada kerja sama dari semua pihak selain sekolah yaitu peran keluarga dan masyarakat. Keluarga tentunya memiliki peran yang sangat penting pula. Mengingat seorang anak mendapatkan pendidikan pertamanya dari orangtua mereka. Keluarga hendaknya dapat berperan penting mengajarkan nilai-nilai demokrasi mulai dari keberanian untuk berpendapat, bertanggung jawab, dan terbuka terhadap sesama anggota keluarga lain. Dalam hal

ini, dibutuhkan kuantitas dan kualitas waktu yang baik antara anak bersama orangtuanya.

Masyarakat pun memiliki peran penting untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung untuk anak-anak muda agar dapat bertumbuh dengan wawasan demokrasi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran anak muda di lingkungan tempat tinggal. Adanya perkumpulan remaja karang taruna, misalnya, dapat terus dipupuk dan diwujudkan secara lebih konkret. Juga pembentukan komunitas-komunitas lainnya seperti pecinta alam, duta lingkungan, pecinta seni, dan sebagainya. Menciptakan generasi muda yang mengetahui konsep berdemokrasi yang baik, tentunya bukan langkah yang bisa dikatakan mudah. Solusi-solusi di atas merupakan sebuah miniatur konkret indahnya konsep berdemokrasi. Itu semua bukan sekadar angan-angan yang tidak dapat tercapai. Itu semua dapat diwujudkan. Warnailah dan hidupilah nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari *life style* dan menjadi suatu gerakan bersama yang dahsyat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua untuk selalu terus menerus membangun dan berteriak lantang: Pesona itu bernama miniatur demokrasi Indonesia.



# DEMOKRASI DAN KOMUNITAS PIARA BURUNG PUYUH

**Baiq Nabila Muftia Utami**

SMAN 1 Praya, Lombok Tengah, NTB

**S**alah satu kata kunci teori sosial yang diungkapkan oleh Bourdieu, seorang sosiolog kenamaan Perancis adalah habitus. Konsep habitus ini erat kaitannya dengan kehadiran kelompok, strata atau kelas sosial suatu masyarakat yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti faktor ekonomi (misalnya kaya-miskin, buruh-majikan), faktor pendidikan (misalnya yang terdidik dan nonterdidik), faktor sosial-budaya khususnya faktor keturunan (misalnya bangsawan dan nonbangsawan), faktor politik (misalnya politisi-pemilih), dan sebagainya.

Habitus, menurut Bourdieu, adalah sebuah sistem dalam diri seseorang yang mewujudkan sebagai sebuah gabungan pengalaman masa lalu yang berfungsi sebagai matriks atau acuan dalam pemikiran yang dapat menghadirkan suatu persepsi, apresiasi, dan tindakan yang dilakukan setiap orang (dalam Nuriadi pada <http://www.facebook.com>). Selanjutnya, habitus dapat mewujudkan secara jelas ke dalam tiga hal, yaitu (1) cara berpikir (*ways of thinking*), (2) kebiasaan, sikap

perilaku (*bodily habits*), dan (3) cita rasa (*tastes*). Berdasarkan teori ini dapat diterangkan bahwa tingkat kekayaan seseorang secara finansial ataupun keilmuan bisa diukur dan dinilai dari bagaimana kebiasaan sandang, selera, serta sikap perilaku yang ditunjukkan dalam kesehariannya.

### **Komunitas Piara Burung Puyuh**

Komunitas piara/pemiara burung puyuh merupakan kelompok pemelihara burung puyuh. Komunitas ini lahir secara fenomenal di tengah-tengah masyarakat Lombok sejak tahun 2013. Anggota komunitas ini adalah lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kelahirannya tanpa direncanakan, tetapi lahir sebagai efek dari kondisi kehidupan yang makin hari makin runyam. Jika dikaitkan dengan teori Bourdieu di atas, komunitas ini lahir sebagai konsekuensi politik yang dibangun para pejabat dan politisi. Kita ketahui bahwa tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik. Sejak tahun 2013, para politisi sudah memasang kuda-kuda menyambut pesta demokrasi tahun 2014. Semua kalangan bersiap-siap/mengambil ancang-acang. Para politisi mengumbar janji, menebar budi, memasang wajah ramah, tersenyum menyapa setiap orang. Orang-orang tenggelam dalam nuansa euforia pesta demokrasi.

Kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa bosan. Mereka muak dengan janji-janji yang diputar lima tahun yang lalu, tetapi tidak pernah direalisasikan, muak dengan tekanan ekonomi yang terus mendera tiada ampun, muak dengan kemiskinan yang melanda tiada berkesudahan, muak dengan masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Pada gilirannya, mereka lari kepada burung puyuh sebagai tindakan *refresh* yang menghibur. Daripada mendengarkan ceramah pejabat, janji para politisi, dan pikiran kusut yang tidak bisa diurai, mereka lebih memilih memelihara burung puyuh. Mendengarkan suara burung puyuh lebih nikmat daripada mempercayai “kabar burung”. Kata-kata para pejabat dan politisi diinterpretasi sebagai kabar burung (makna konotatif), sedangkan suara burung puyuh dimaknai secara mendalam sebagai kicauan yang menenteramkan (makna denotatif).

Hobi baru ini bermula dari orang per-orang yang mempunyai persepsi dan apersepsi yang kurang lebih sama melahirkan aksi piara burung puyuh yang selanjutnya membentuk komunitas. Dengan kalimat lain, komunitas ini merupakan pelarian masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan memuakkan. Para pemiara burung puyuh mencari hiburan dengan memelihara burung puyuh yang lebih “bermakna” meskipun kedalaman makna tersebut dibangun sendiri oleh para pemiara sebagai acuan mengatasi segala persoalan. Pada sisi yang ekstrim bisa dikatakan bahwa kita masih perlu belajar dari burung, paling tidak tentang kejujuran.

Eksistensi pemiara burung puyuh menjadi sesuatu yang fenomenal. Sejak pertengahan tahun 2013 hingga tahun 2014 fenomena piara burung puyuh menggegerkan hampir seluruh elemen masyarakat Pulau Lombok. Kini para pejabat sampai rakyat yang melarat memelihara burung puyuh, bahkan menjadi identitas dan ikon masyarakat Lombok. Sarang burung puyuh marak bertengger menghiasi hampir setiap rumah. Demam burung puyuh menyerang semua kalangan. Orang yang tidak hobi memelihara burungpun ikut-ikutan memelihara burung puyuh. Setiap hari setiap tempat tidak pernah sunyi dari omongan (*pelagaq lekong belah*) tentang burung puyuh. Dari ujung sebelah utara hingga pesisir pantai selatan Pulau Lombok tidak sunyi dari kicauan khas burung puyuh.

Para politisi tidak menyalakan momen emas ini. Mereka ikut bergabung menjadi bagian komunitas burung puyuh, bahkan karena kepiawaian politiknya, ia terkooptasi sebagai pengurus komunitas. Lewat komunitas ini mereka secara terselubung atau terang-terangan, langsung ataupun tidak langsung, membentuk opini yang mengarahkan publik kepada partai dan/atau calon legislatif tertentu. Kegiatan berkampanye pun dimulai dan dilakukan pada *event* lomba burung puyuh yang diadakan hampir setiap malam terutama di tahun 2014. Mereka mulai “blusukan” pada acara lomba burung puyuh yang diadakan. Mereka menjadikan hal ini sebagai media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan diri mereka tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Tak jarang, masyarakat kelas atas pun ikut berpartisipasi. Hal tersebut, semakin membuktikan bahwa

fenomena ini telah mengakar kesegala lini dan kelas sosial masyarakat pulau Lombok.

### ***Sesenggak Pelagaq Lekong Belah***

Lomba suara burung puyuh merebak. Hampir setiap malam di segala sudut kota dan desa lomba suara burung puyuh diselenggarakan. Para peserta lomba urun rembuk menyumbangkan recek untuk kepentingan lomba. Mereka secara swadaya mengumpulkan dana untuk membeli hadiah bagi pemenang lomba. Pemenang akan bahagia, pecundang pun bersemangat merajut harapan akan keluar sebagai pemenang pada lomba berikutnya. Malam lomba tampak semarak. Semua berpesta, bersuka ria melupakan segala persoalan yang ada. Para pemiara sumringah menunjukkan eksistensi komunitas. Pengakuan bahwa mereka ada dan perlu diperhatikan sebagai orang yang berdaulat pun mencuat. Orang-orang yang haus kebijakan realita bukan hanya retorika berkumpul. Mula-mula hanya sekadar berkumpul di *berugaq* tetangga untuk mengisi waktu senggang. Mereka berbincang tanpa agenda utama, *omong* utara-selatan, berdiskusi *Pelagaq Lekong Belah*.

Istilah atau ungkapan *Pelagaq Lekong Belah* sudah sangat biasa didengar di tengah keseharian komunitas atau kampung. Ungkapan ini dapat berfungsi sebagai sebuah pepatah. Ia adalah pepatah atau '*sesenggak*' (bahasa Sasak). *Sesenggak*, bagi orang Sasak, adalah sebuah ekspresi metaforis yang berfungsi sangat efektif bagi pendengarnya. Ia muncul sebagai upaya untuk menandai, mengabstraksi, dan memaknai suatu fakta, peristiwa, dan fenomena sikap perilaku masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang (*reseptif*), terus-menerus (*kontinu*), dan spontan (*simultan*) dalam hampir semua kelompok masyarakat tertentu. *Sesenggak* mengandung sebuah konsep budaya dan ajaran kehidupan yang adiluhung bagi setiap warga masyarakat. Konkretnya, ia menjadi sebuah parameter atau indikator di dalam menilai dan menandai sebuah perilaku.

Ada banyak hal yang menarik untuk dikaji dan perlu dilogiskan supaya mencapai pemahaman yang holistik. Namun, secara umum ungkapan *Sesenggak Pelagaq Lekong Belah* merupakan sebuah '*media*' bagi orang-orang Sasak di dalam bergaul dan mengakrabkan diri di

dalam komunitas. Selain itu, hal ini juga menandai bahwa masyarakat Sasak dengan habitus semacam itu menyiratkan sebuah masyarakat yang terbuka, suka berbagi, egaliter, dan lebih menyukai suasana yang informal (tidak kaku dan formal). Ciri-ciri masyarakat yang seperti ini dapat berujung pada hadirnya masyarakat yang demokratis dalam segi pergaulan serta sikap perilaku sosialnya. Kemudian, yang lebih menarik juga bahwa inti peristiwa *Pelagaq Lekong Belah* itu bukan pada 'apa dan bagaimana hasilnya', tetapi 'bagaimana dan sejauh mana prosesi' keberlangsungan peristiwa ini. Proseslah yang utama, bukan hasilnya. Artinya, aktor-aktor yang terlibat dalam *Pelagak Lekong Belah* ini tidaklah berpikir dengan sebuah keharusan untuk menghadirkan sebuah kesimpulan (*concluding remarks*) dalam diskusi/perdebatan itu, tetapi betapa proses dan keragaman sudut pandang dan argumentasi itulah yang lebih diutamakan. Itulah wujud sebuah kesantunan (*politeness*) bergaul, berbahasa masyarakat Sasak sebagai salah satu komunitas besar dengan ciri masyarakat yang *homoludens*.

### **Politeness Berpolitik**

Indonesia terkenal dengan kesantunannya (*politeness*) dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya. Namun, nyatanya kesantunan ini semakin hari semakin tergerus zaman. Hal ini bisa diteliti pada sikap para pemangku pemilu saat pra-pemilu dan pasca-pemilu. Pada pra-pemilu, para calon legislatif berlomba mengadakan kampanye. Ketika kampanye dikumandangkan, norma kesopanan sering terabaikan. Para juru kampanye dengan lantang membentangkan keburukan, kekurangan, dan aib partai lain sebagai strategi menjatuhkan lawan politik demi keuntungan pribadi atau partainya. Kebusukan demi kebusukan partai lawan politik satu per satu dibongkar dan dilucuti di hadapan publik. Sindiran dan makian pedas terlontar tanpa saringan. Kegagalan partai politik yang tengah berkuasa menjadi sembako politik yang dibagikan gratis kepada calon pemilih. Maraknya kasus-kasus yang melibatkan elit politik dan pucuk pimpinan partai lain pun dikuliti tanpa tedeng aling-alings. Isu dan info yang menjadi isi kampanye diharapkan membentuk opini yang menyublim di hati dan pikiran khalayak masyarakat. Dari upaya ini, masyarakat diharapkan

akan melek dan dapat melogiskan isu yang disampaikan lalu dengan kemantapan hati mereka mendukung calon legislatif dan atau partai yang diusung juru kampanye. Pada saat inilah adab tercela, moral rendah merupakan menu murahan yang dipersembahkan kepada publik. Dengan *title* penuh ketidakpercayaan dan meremehkan kekuatan lawan politik, masyarakat secara terang-terangan disuguhi tontonan politik kotor yang tidak sehat. Intrik politik busuk secara konkret diperagakan secara reaktif di atas panggung politik merupakan virus yang meracuni hati dan kesantunan (*politeness*) berpolitik bangsa Indonesia. Padahal, aksi intrik politik itu jelas-jelas mencederai peradaban Indonesia yang unggul dan adiluhung.

Sebuah momen yang melibatkan massa yang luar biasa masif yang seharusnya diisi dengan nutrisi menu kegiatan yang lebih “menyehatkan”, dan terlaksana dalam hidangan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye yang menyerap dana miliaran itu tidak diisi dengan edukasi politik yang dapat menguatkan kognisi para pemilih calon-calon legislatif. Substansi kampanye tidak menekankan pada visi dan misi partai politik yang seharusnya sampai dan dipahami dengan benar oleh calon pemilih. Sayang, materi semacam itu masih kalah bersaing dengan isu negatif yang lebih dekat kepada fitnah daripada realitanya. Para juru kampanye tidak mempunyai kekuatan dan rasa percaya diri untuk memenangkan pertarungan isu positif yang merupakan karakter diri dan *platform* partai yang mesti dihidangkan ke publik. Para juru kampanye lebih digdaya menyajikan isu negatif yang ironis pula lebih diminati masyarakat.

Pada pascapemilu, tragedi ‘pembunuhan’ moral terus berlanjut. Calon-calon yang merasa dirinya menang berdasarkan hasil penghitungan *quick count* yang sejatinya masih berstatus calon pemenang mulai pongah dan sombong. Mereka bak anggota DPR yang sudah dilantik. Mereka mulai berleenggak-leenggok di depan rakyat pemilihnya dan mulai melepas satu per satu janji politiknya. Antara politisi yang satu dengan yang lain, meski masih dalam satu partai, juga berseteru memperebutkan kursi dan jabatan. Mereka melukai dan mengkhianati konstituen pemilihnya. Perseteruan internal dalam tubuh PPP, PKB, dan Golkar merupakan sedikit bukti konkret yang

semua orang menyaksikannya. Sejatinya perseteruan itu telah melukai hati rakyat yang telah menyematkan kepercayaan untuk dijaga dan diperjuangkan.

Hingga kini, menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, badai fitnah berhembus dari segala arah. Setiap saat kita bisa baca di koran atau kita saksikan di media televisi, kelompok pengusung capres/cawapres mulai menebar virus kebobrokan capres/cawapres lainnya. Para pengusung saling menyerang dengan senjata yang beramunisi kejelekan calon lainnya. Isu agama, ras, dan keturunan dipolitisasi. Tragedi lumpur Lapindo yang menyengsarakan rakyat di Jawa Timur diungkap lagi. Bahkan Peristiwa Trisakti yang terjadi enam belas tahun silam diungkit kembali. Jadi, intrik politik saling hujat dan saling fitnah 'dilegalkan' untuk menjegal lawan atau saingan. Demi tercapainya tujuan, berbagai cara keji 'dihalalkan' dan dijadikan senjata agar lawan politik tidak berdaya apalagi berkuasa. Padahal, tindakan seperti itu merupakan pendangkalan keadaban terhadap nilai moral dan nilai demokrasi yang secara tanpa disadari sedang diwariskan kepada generasi muda, calon pelanjut estafet kepemimpinan bangsa.

Berbagai praktik berkampanye yang *impoliteness* di atas telah menodai kepercayaan yang dimandatkan rakyat kepada para politisi dan elit partai. Ketidaksantunan prapemilu dan pascapemilu yang dipentaskan para elit politik telah membuat lubang di hati rakyat. Ketidakpercayaan dan kemukaan telah menggenang dan memenuhi lubang hati. Rakyat pun mencari pelarian sekaligus hiburan pelipur lara. Berdasarkan persepsi dan apresiasi terhadap peristiwa politik yang sengaja dibangun petinggi partai, rakyat berspora membentuk komunitas sebagai bentuk protes bahwa rakyat lemah dan tertindas masih mempunyai harapan, yakni pengakuan keberadaan mereka (eksistensi menurut teori Maslow) yang merupakan kebutuhan. Salah satu bentuk koloni yang terbangun di Pulau Lombok adalah Komunitas Piara Burung Puyuh.

## Penutup

Burung puyuh, salah satu spesies yang biasanya dikembangbiakkan oleh peternak untuk dimanfaatkan telurnya ini kini naik pamor. Biasanya, burung-burung ini saling berebut makanan dalam satu kandang kotor yang amat sempit. Ia tak begitu diperhitungkan. Tidak populer dan sangat minim perhatian. Ia hanya terkenal karena telurnya. Tak lebih, tak kurang. Namun, segala hal unik bisa terjadi di kancah politik. Burung puyuh mendadak jadi populer saat segelintir masyarakat yang mulai muak dan jenuh dengan pemilu. Seorang demi seorang mulai memelihara burung puyuh. Pada awalnya harga burung puyuh tidak lebih dari Rp 5.000,00 kini naik 1000% menjadi Rp 50.000,00 (data dari peternak burung puyuh di wilayah Kecamatan Renteng, Praya). Pengadaan kandangnya menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan. Kreativitas pengrajin kandang burung yang biasanya tidak banyak memiliki pesanan kini meningkat. Pakan burung juga laris manis bagai kacang goreng. Bidang ekonomi menggeliat, menguntungkan banyak pihak yang mulai memperhitungkan fenomena unik ini.

Komunitas piara burung puyuh menggurita. Ribuan komunitas terbentuk secara aklamasi tanpa sistem yang rumit. Sistem formatur tidak berlaku. Program utama mereka adalah menikmati *entertainment* yang pelakunya adalah mereka sendiri. Bentuk nyata program utama itu ialah mengadakan lomba. Pelaksanaan lomba suara burung puyuh dibangun berdasarkan prinsip *sesenggak pelagaq lekong belah*. Sikap demokratis, terbuka, egaliter, dan santun merupakan nilai-nilai yang ditemukan dan diutamakan pada komunitas ini. Jadi, untaian kalimat yang pantas disajikan pada ujung tulisan ini bahwa orang Lombok yang menjadi aktor, produser, dan sutradara komunitas piara burung puyuh pada dasarnya berjiwa demokratis. Sikap *pagah* yang dimiliki sebenarnya dapat luruh oleh kebaikan yang diperlihatkan orang lain kepadanya. Bukankah pada *sesenggak pelagaq lekong belah*, kemiri yang diadu adalah kemiri yang sudah pecah?

Catatan:

<i>belah</i>	= pecah
<i>lekong</i>	= kemiri
<i>pagah</i>	= keteguhan mempertahankan prinsip/kemauan
<i>pelagaq</i>	= mengadu, membenturkan sesuatu
<i>sesenggak</i>	= ungkapan, pepatah Sasak

Praya, 13 Mei 2014



# GENERASI GAWAI MERAYAKAN DEMOKRASI

CATATAN PENUTUP LOMBA ESAI SOSIAL  
BUDAYA NASIONAL 2014

**Lukman Solihin**

Peneliti Puslitbang Kebudayaan

**P**olitik adalah praksis sehari-hari. Ia tak hanya berkenaan dengan proses menyampaikan pendapat dan meraih kekuasaan. Politik adalah aktivitas sehari-hari di mana keputusan-keputusan dibuat dan dilakukan. Ikhtiar menyadari dan membumikan kesadaran berpolitik ini penting, agar tak ada negasi antara pesta politik lima tahunan dengan aktivitas sehari-hari sesudahnya. Apa yang telah dipraktikkan di tahun 2014 ini sebagai tahun pesta pora politik, akan berdampak dan dirasakan hingga lima tahun ke depan, bahkan hingga tahun-tahun sesudahnya. Itulah mengapa kesadaran berpolitik menjadi penting, agar keputusan tiap individu merupakan keputusan yang rasional, terukur, dan bertanggung jawab.

Begitu pula dengan demokrasi, yakni sistem politik yang mengandaikan warga negara yang swatantra dalam berpendapat

dan memilih para pemimpinnya, sebetulnya tidak selesai ketika seorang calon didukung dan dimenangkan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan masyarakat yang terdidik, rasional, dan *melek* politik, sehingga kelonggaran berpendapat dan menghargai perbedaan merupakan kebiasaan yang lazim dipraktikkan. Dari sini kontrol terhadap kekuasaan dapat dilakukan oleh publik yang peduli.

Di titik inilah demokrasi memerlukan dukungan tidak hanya dari kaum elite dan para orang tua, melainkan juga kaum muda penyokong demokrasi hari ini dan masa depan. Kaum muda yang peduli, yang sadar akan tanggung jawab politik yang diembannya, merupakan soko guru bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dan melalui mereka pula, budaya demokrasi yang substansial, yakni demokrasi yang tidak hanya prosedural, dapat disemai sejak dini, atau dalam bahasa mereka seperti tersua dalam kumpulan esai ini, yaitu “sejak dari keluarga dan lingkungan sekolah”. Sebab, di dua ruang sosial itulah demokrasi senyatanya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sudah sejak lama kaum muda menyandang predikat sebagai agen perubahan. Sejak pembentukan Budi Utomo tahun 1908, Kongres Pemuda tahun 1926 yang dilanjutkan dengan kongres kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda di tahun 1928, kaum muda telah mengambil peran menyokong gagasan kebangsaan: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Dari masa pra-kemerdekaan hingga masa sebelum kejatuhan Orde Baru, kaum muda sebagai agen perubahan dicirikan sebagai kaum pergerakan. Mereka mengorganisasi diri dan berkiprah dalam politik.

Peran kaum muda juga terlihat dalam pelbagai pergerakan politik pasca-Indonesia merdeka, di mana mereka menghimpun diri dalam gerakan tahun 1966 setelah upaya kup oleh segelintir perwira, kemudian pada peristiwa Malari di tahun 1974, serta Gerakan Reformasi di tahun 1998. Namun, berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi pemuda tahun 1998 oleh Hikmat Budiman (2002: 20) disebut sebagai Generasi *Multitasking*, yaitu generasi yang tidak monolitik dan mampu mengambil peran dalam banyak hal sekaligus. Mereka bukan aktivis dengan dandanan lusuh dan rudin, melainkan generasi yang berdemonstrasi dengan dandanan wangi, sesekali menikmati sajian

McDonalds, dan tentu saja melek teknologi. Dari generasi inilah lahir Orde Reformasi.

### **Generasi Gawai**

Seolah melengkapi evolusi itu, kini kaum muda tak hanya dicirikan oleh kemampuannya yang *multitask*, tetapi juga piawai memainkan berbagai perangkat elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Sebagian orang menyebutnya sebagai “Generasi *Gadget*” atau “Generasi Gawai”. Ada pula yang menjulukinya sebagai “Generasi Menunduk” karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk memainkan telepon pintar atau sabak elektronik. Informasi tentang segala hal, termasuk politik, mereka kunyah dari sebatang telepon pintar atau selayar sabak.

Marc Prensky (2001) menyebutnya sebagai *Digital Natives*. Menurutnya, “*Our students today are all “native speakers” of the digital language of computers, video games, and the Internet*”. Hal ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang disebutnya sebagai *Digital Immigrants*, yaitu mereka yang dibesarkan oleh kebudayaan sebelum era digital dan kini harus turut bermigrasi menggunakan perangkat digital. Konsep ini diajukan sebagai kritik terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Amerika, di mana banyak guru tak mampu mengikuti perkembangan cepat dari murid-muridnya. Meskipun menuai banyak kritik, istilah tersebut telah membuka perspektif baru untuk memahami lebih jauh biografi dari *Digital Natives* ini.

Siân Bayne dan Jen Ross (2011), lebih jauh memetakan ciri khas *Digital Natives* dan *Digital Immigrant* ini dalam kerangka oposisi biner. *Digital Native* merupakan kaum muda yang cepat mengakses informasi, *multitask* dalam melakukan berbagai hal, mudah menerima informasi melalui gambar, suka bermain-main, melihat jauh ke masa depan, menggunakan perangkat digital dalam berbagai aktivitas, serta secara konstan terkoneksi dengan jejaring dunia maya. Hal ini berbeda dengan kaum *Digital Immigrants* yang umumnya berasal dari kalangan tua, berasal dari kebudayaan masa lalu, berfikir dengan *logical and serial thinking*, lebih suka membaca teks, lebih serius dalam berbagai hal, dan terkesan lebih terisolasi dari koneksitas global.

<i>Natives</i>	<i>Immigrants</i>
<i>student</i>	<i>teacher</i>
<i>fast</i>	<i>slow</i>
<i>young</i>	<i>old</i>
<i>future</i>	<i>past, or 'legacy'</i>
<i>multi-tasking</i>	<i>logical, serial thinking</i>
<i>image</i>	<i>text</i>
<i>playful</i>	<i>serious</i>
<i>looking forward</i>	<i>looking backward</i>
<i>digital</i>	<i>analogue</i>
<i>action</i>	<i>knowledge</i>
<i>constant connection</i>	<i>isolation</i>

Sumber: Siân Bayne dan Jen Ross (2011).

Kendati oposisi biner ini tidak seluruhnya benar dan masih bisa diperdebatkan, namun satu hal yang tidak bisa dibantah bahwa generasi ini merupakan anak kandung teknologi informasi yang memiliki *passion* berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi gawai ini umumnya *melek* teknologi, tanggap informasi, dan haus akan eksistensi. Tak heran jika mereka juga dijuluki sebagai “Generasi *Selfie*” karena kerap mengambil gambar diri untuk dipajang di media sosial. Menurut Lesthia Kertopati (2014, dalam <http://life.viva.co.id>), mereka mencari pengukuhan lewat media sosial dengan cara memperbarui status di *Facebook*, berkicau di *Twitter*, berbagi momen di *Path*, atau mengunggah foto aktivitas sehari-hari di *Instagram*. Media sosial bagi generasi ini adalah kendaraan menuju aktualisasi diri. Mereka juga merasa harus selalu memonitor perkembangan isu dan informasi. Itu sebabnya muncul pula fenomena yang disebut FOMO (*fear of missing out*) yang berarti takut ketinggalan berita.

Maraknya Generasi Gawai ini turut meramaikan perhelatan pesta politik. Pesta politik di tahun 2014 dicirikan oleh maraknya penggunaan teknologi internet sebagai saluran informasi serta perang urat syaraf antarpending kandidat. Pada 8 Mei 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika melansir berita bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82 juta orang, atau berada di peringkat ke-8 dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di

antaranya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun—sebagian besar di antaranya adalah pemilih pemula. Sementara untuk pengguna *Facebook*, Indonesia berada di peringkat ke-4 besar dunia (<http://kominfo.go.id>).

Kaum muda merupakan sasaran tembak terbesar dari pertempuran isu di dunia maya selama kampanye Pemilu. Melalui informasi yang menyebar cepat di media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook*, kaum muda mendapatkan berbagai asupan isu dan informasi. Alexandra Hearne, kontributor Radio Australia menulis, ada sekitar 21 juta pemilih pemula yang diperebutkan oleh para kandidat. Mereka berupaya menggaet kaum muda melalui bermacam media sosial, terutama melalui *Twitter* dan *Facebook* (Alexandra Hearne, 2014 dalam <http://www.radioaustralia.net.au>).

Ramainya penggunaan jejaring internet selama masa Pemilu menunjukkan harapan, sekaligus kecemasan. Adakah jejaring dunia maya ini mampu mendorong kepada demokrasi yang lebih baik? Lebih jauh lagi, apakah Generasi Gawai ini dapat menyokong majunya praktik demokrasi?

### **Antara Harapan dan Kesiasiaan**

Pada majalah *PRISMA* edisi “Gerakan Pemuda 1926-2011” (volume 30, 2011), Ade Armando, pakar komunikasi Universitas Indonesia, menyampaikan sangkalan kritis terhadap maraknya pengguna internet yang dianggap banyak orang dapat menyokong demokrasi. Setelah memaparkan serangkaian fakta dan optimisme, Ade Armando menyampaikan kritik bahwa generasi digital yang dibayangkan ini adalah kaum yang dibesarkan dalam kebudayaan teknologi yang sebenarnya menjauhkan mereka dari hasrat demokratisasi. Internet, menurutnya, memang memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap kontrol negara dan pemodal. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah mereka dibesarkan oleh “budaya televisi”. Sejak kecil mereka telah “dibentuk” dan dibiasakan oleh media yang dikelola secara komersial ini yang pada banyak hal sebetulnya lebih banyak menghibur daripada menumbuhkan sikap kritis.

Ade Armando mengutip pendapat Neil Postman yang mengatakan bahwa tipe media yang dominan pada sebuah masyarakat akan menentukan kapasitas berpikir masyarakat yang bersangkutan. Karena dikelola sebagai entitas komersial, televisi hadir dengan hanya menyajikan tayangan yang menarik banyak penonton. Di sinilah televisi kemudian membiasakan para penontonnya untuk melulu mendapatkan hiburan, baik yang sifatnya faktual maupun fiksi. Pada tahap selanjutnya, televisi komersial lebih banyak mendorong lahirnya masyarakat yang tidak terbiasa berdiskusi, merenung, berpikir secara mendalam atau memahami masalah secara serius. Hal ini berbeda dengan budaya literer yang membentuk masyarakatnya untuk serius merenungkan berbagai soal melalui bacaan-bacaan bermutu. Penumpulan daya kritis inilah yang perlu dikhawatirkan, karena demokrasi mensyaratkan masyarakat yang kritis.

Pada dasarnya, televisi berpengaruh terhadap pelbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda yang merupakan kelompok usia yang banyak terpapar tontonan yang hanya bersifat hiburan tersebut. Generasi yang haus hiburan inilah yang kini menjadi *digital natives* sebagai pengguna utama teknologi informasi. Sebagai media baru, internet menawarkan kecepatan, keluasan jangkauan, keterbukaan, ketiadaan kendali dan sensor, serta keringkasan. Karakter ini, menurut Ade Armando, tidak berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan bagi lahirnya warga negara yang rasional dan kritis untuk membangun demokrasi. Sangkalan kritis yang diajukan Ade Armando ini merupakan upaya agar bonus demografi berupa besarnya populasi generasi muda ini tidak hadir sia-sia. Dia menggaris bawahi bahwa *Digital Natives* berikut teknologi internet yang menjadi sarananya, di satu sisi merupakan harapan, namun di sisi lain, apabila tidak “diarahkan” hanya akan menuju kepada kesia-siaan.

Kekhawatirannya terhadap *Digital Natives* yang dia sebut lebih banyak melihat dunia sebagai “hiburan” dan “kurang serius” menanggapi berbagai persoalan, agaknya tidak seluruhnya benar. Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 dengan tema “Kaum Muda dan Budaya Demokrasi” ini sedikit banyak menjadi bukti bahwa kaum muda juga turut memikirkan secara serius dan mendalam

kondisi bangsanya. Dalam lomba ini, ada 1.000 esai yang dikirim oleh siswa SMA/ sederajat dari seluruh Indonesia—sebagian besar dikirim melalui pos elektronik. Tidak seluruhnya ditulis secara bernas dan bermutu memang. Sebagian malah hanya menyadur konsep demokrasi dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tetapi sebagian lagi berupaya keras menghadirkan pengalaman demokrasi yang mereka alami, mengkritisi praktik demokrasi dan perilaku para politikus, serta menawarkan beragam solusi yang mereka anggap perlu. Lima belas esai terbaik dalam bunga rampai ini menunjukkan luasnya pemikiran yang coba mereka ajukan perihal demokrasi.

Selama proses berlangsungnya lomba ini, kami juga merasakan spirit generasi muda yang turut merayakan demokrasi. Mereka telah ambil bagian tidak hanya dengan menyalurkan suara mereka, tetapi turut menyumbangkan pikiran untuk demokrasi yang lebih baik. Pada pesta demokrasi tahun 2014 ini kita bisa lihat semangat seperti yang tergambar nyata melalui para relawan. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, di tahun 2014 ini kita bisa saksikan fenomena baru, yaitu munculnya para relawan yang merasa perlu untuk turun tangan menyelamatkan demokrasi. Seperti diulas panjang lebar dalam majalah *TEMPO* edisi 15 – 21 Desember 2014, para relawan ini adalah anak muda dari bermacam profesi yang peduli terhadap nasib negeri ini. Mereka seolah datang dari dunia yang “lain” yang jauh dari hiruk pikuk politik. Namun demikian mereka semua seperti berbicara tentang sesuatu yang serupa: bahwa politik bukan hanya urusan para politikus, melainkan juga urusan orang kebanyakan.

Membaca esai-esai yang tersua dalam buku ini, kita menjadi yakin, demokrasi di masa depan akan terus diperjuangkan oleh mereka: Generasi Gawai!

### Daftar Pustaka

Kominfo.go.id. “Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta”, Kamis 8 Mei 2014 dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/info%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/>

berita\_satker#.VOIGFRGMr6M

- Armando, Ade. "Media Baru bagi Kaum *Digital Natives*: Demokrasi atau Kesiasaan?", dalam majalah *PRISMA*, volume 30 tahun 2011.
- Bayne, Siân dan Jen Ross. "Digital Native' and 'Digital Immigrant' discourses: A Critique", *Educational Futures Rethinking Theory and Practice* Volume 50, 2011, pp 159-169, diakses dari situs <http://www.dice.education.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2012/05/nativespaper1.pdf>
- Budiman, Hikmat. 2002. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hearne, Alexandra. "Peran Sosial Media di Pemilu Indonesia 2014", 1 April 2014 dalam <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-03-31/peran-sosial-media-di-pemilu-indonesia-2014/1285446>
- Kertopati, Lesthia. "Demam Gadget Generasi Selfie", Jum'at, 3 Januari 2014 dalam <http://life.viva.co.id/news/read/470688-demam-gadget-generasi-selfie>
- Opini Redaksi, "Memelihara Para Relawan", dalam majalah *TEMPO*, edisi 15 – 21 Desember 2014.
- Prensky, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants", *On the Horizon* (NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001), diakses dari situs <http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital%20Natives%20-%20Digital%20Immigrants.pdf>



## PROFIL



**Hurip Danu Ismadi** adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud (2012-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Non formal dan Informal (2009-2011) dan Kasubdit Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah (2011). Selain itu, menjabat sebagai *Associate Professor*, Dosen Kebijakan Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, di Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat (2007-sekarang). Pendidikan sarjana ditempuh di bidang Pendidikan Non-Formal di Universitas Negeri Yogyakarta, Master di bidang Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan Doktor di bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari universitas yang sama. Aktivitasnya dalam presentasi dan konferensi internasional, antara lain: *Nonformal Education Innovation Meeting, Innotech*, Manila, Philippine (1991); *Nonformal Education Meeting in Bangkok*, Thailand (1994); *Nonformal Education Implementing in Beijing*, China (1994); *Nonformal Education Conference in Seoul*, Korea (1994); *Life Long Learning Meeting in Kuala Lumpur*, Malaysia (1996); *Seamaul Undong Movement meeting*, Seoul, Korea (2001); *Functional Literacy Conference*, Islamabad, Pakistan (2005); *Life Long Learning Implementation meeting*, Busan, Korea (2006); *UNESCO Equivalency Education meeting*, Cairo, Egypt (2009); *UNESCO Equivalency Education meeting*, Bangkok, Thailand (2009); *UNESCO Equivalency Education conference*, Semarang, Indonesia (2009); *ASEM life Long Learning Conference*, Nhtrang City, Vietnam (2010); *Community Learning Center Meeting*, Hongkong (2010); *International Inspiration Meeting*, Cardiff Wales, England (2010); *Lecturer of Non Formal Education at UNESCO Timor Leste* (2011); *International Meeting of ASEAN Study at Frankfurt University*, Germany (2012).



**M. Alie Humaedi.** Lahir di Cirebon, 20 Juli 1976. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di tempat kelahiran. Jenjang pendidikan tinggi: SI jurusan Tafsir Hadits (1998; beasiswa Departemen Agama), S2 jurusan Hubungan Antar Agama (2001; beasiswa Departemen Agama & Catholic Relief Services), dan S3 dengan spesifikasi Antropologi Agama (2007; Beasiswa Departemen Agama & Netherland Institute voor Oorlogs Documentatie Belanda), ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga menempuh pendidikan S2 Ilmu Budaya pada Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma (2004; beasiswa Ford Foundation melalui IIEF). Sekarang bekerja sebagai peneliti bidang Humaniora, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan bidang kepakaran pada Kajian Budaya yang melekat pada aspek kebencanaan, kemiskinan dan komunitas adat terpencil. Pernah menjadi relawan kebencanaan (1997-2004); Relawan dan Koordinator Lapangan Penanganan Bencana Rebana Indonesia di Yogyakarta (2006-2007); menjadi Peneliti Utama Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (2000-2006), menjadi Peneliti Sejarah dan Etnografi untuk Netherland Institute voor Oorlogs Documentatie (NIOD Belanda, 2003-2007), menjadi *Research Investigator* untuk Program *Livelihood* dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi di Aceh pada Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia dan Christian Aid (2007); *Prime Investigator* Program Penelitian Kebencanaan pada United Nation for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA, 2010-2011), Anggota Panitia Teknis BNPB dan BSN (2014-2015), dan menjadi penulis pada Dewan Analisis Strategis. Aktif meneliti, serta menulis buku dan puluhan artikel di berbagai jurnal. Alamat: [aliehumaedi@yahoo.com](mailto:aliehumaedi@yahoo.com).



**Lukman Solihin**, lahir di Probolinggo, 23 April 1984. Alumnus jurusan Antropologi Budaya dari Universitas Gadjah Mada ini memulai karir sebagai PNS di awal tahun 2010 di Direktorat Tradisi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Aktivitas yang digemarinya sejak mahasiswa adalah membaca dan menulis. Itulah mengapa akhirnya di tahun 2012

dia pindah ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai peneliti. Salah satu minat penelitiannya menyangkut diaspora Indonesia yang menghasilkan beberapa terbitan, antara lain buku *Menjadi Boyan: Strategi Adaptasi Keturunan Bawean Singapura* (2011, ditulis bersama Dewi Indrawati dan Sukiyah), “Mereka yang Memilih Tinggal: Telaah Strategi Adaptasi Mahasiswa-Perantau Bugis-Makassar di Melbourne, Australia” (*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Balitbang Kemdikbud), dan “Melayu di Luar Boyan di Dalam: Politik Identitas Orang Bawean Singapura” (*Jurnal Masyarakat dan Budaya*, PMB-LIPI). Publikasinya yang lain berjudul “Pencitraan Hindia yang Elok dan Fajar Industri Pariwisata di Hindia Belanda” (*Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Puslitbang Pariwisata), “Sirih Pinang dalam Kebudayaan Melayu” (*Jurnal Kebudayaan*, Puslitbang Kebudayaan), “Mengantar Arwah Jenazah ke *Parai Marapu*: Upacara Kubur Batu pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur” (*Jurnal Patanjala*, BPNB Bandung), dan “Setahun Kita Bekerja, Sehari Kita Makan: Tradisi *Meugang* pada Masyarakat Aceh” dalam buku *Kebudayaan Indonesia* (2013). Selain menulis serius, suka juga menulis hal ringan dan resensi buku. Artikelnya di *siteblog* berjudul “Tukang Becak: Yang Bebas dan Yang Terpaksa Memilih”, mendapatkan juara II pada kontes yang diselenggarakan oleh Voice of America (VOA), Jakarta.



**Arini Ayatika Sadariskar** lahir di Jakarta, 7 Juni 1997. Pendidikan dasar ia tempuh di SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun sebelum kemudian melanjutkan ke SMPN 115 Jakarta. Pendidikan menengah atas ditempuhnya di SMA Labschool Jakarta, sebuah tonggak kuat yang telah membekalinya dengan berbagai pelajaran hidup. Arini yang akrab disapa

Aya, aktif sebagai Ketua Umum OSIS SMA Labschool Jakarta periode 2013-2014. Ia pernah menempuh pendidikan menengah di Arnhem International School, Belanda, selama satu setengah tahun. Esainya yang berjudul “Tantangan Demokrasi di Sekolah dan Rumah Kita” meraih juara pertama dalam Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud RI. Sebelumnya, ia pernah dinobatkan sebagai Pemenang III Lomba Menulis Artikel Populer HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan berpartisipasi dalam Parlemen Remaja Nasional 2013 kerjasama Universitas Indonesia dengan DPR-RI. Pada waktu buku ini diterbitkan, ia sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Di waktu senggang ia menulis di [fincht.tumblr.com](http://fincht.tumblr.com).



**Alief Moulana**, dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juli 1997, dia baru menyelesaikan pendidikannya di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung dan berencana untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat di bidang neurosains dan filsafat, dan sedang menjalani *gap year*: mengajar di Komunitas Jendela Bandung, mengikuti kelas-kelas MOOC, membaca buku-buku dari seluruh dunia (dari Rusia hingga Amerika Serikat) dan *travelling*. Ia aktif sebagai wakil ketua OSIS, ketua redaksi jurnalistik, dan tim sains sekolahnya. Selain itu Alief juga punya ketertarikan terhadap *a cappella*, bahasa asing, hak asasi manusia, sejarah *holocaust*, filsafat Sartre, buku klasik, astronomi, dan tulis-menulis. Prestasinya antara lain meraih Medali Perunggu *International Sustainable World Energy, Engineering, and Environment Project 2013* di Houston TX, Amerika Serikat, *Honorable Mentionee International Science Project Olympiad 2013* di Jakarta, Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional 2013 bidang Kimia di Bandung, dan 10 Besar Peraih Nilai UN Tertinggi Nasional Jurusan IPA. Dalam dunia tulis-menulis, ia menulis novel, puisi, dan non-fiksi; saat ini menjabat sebagai kolumnis “*Study of Humans*” di *The Global Youth Journal*, yang merupakan wadah jurnalistik untuk pemuda dari

berbagai penjuru dunia. Ia baru saja melakukan *self-publish* novelnya yang berjudul “*Dear Nottes*”, dan menjadi juara dua di kompetisi travel blog Kompas Nasional.



**Jessica Anzamar Sibarani**, lahir pada tanggal 13 Maret 1998 di Jambi, sekarang duduk di kelas 11 IPS-1 SMAN 03 Kota Jambi. Diawali dari kecintaannya terhadap musik dan menulis naskah serta partitur lagu, sejak duduk di bangku SD dan SMP sudah beberapa kali menjuarai lomba musik tradisional (juara 2 tingkat kota), festival biola Yamaha (juara 2), menulis (cipta) lagu sebagai juara 1 tingkat kota, juara 1 tingkat provinsi, dan akhirnya menjadi duta Provinsi Jambi dalam lomba Cipta Seni Siswa Nasional (Cipta Lagu) tingkat Nasional di Istana Presiden Cipanas - Jawa Barat tahun 2012, menyabet juara harapan ke-2. Gadis yang akrab disapa Jejes ini, merasa pengalamannya sangat berkesan karena mempunyai kesempatan menyanyikan lagu ciptaannya dengan menggunakan biola di depan Presiden SBY dan Ibu Negara pada saat itu. Berbekal moto kehidupan adalah seni, Jessica terus berkiperah dalam dunia seni musik, bahasa, dan tulis-menulis. Dalam dunia musik menjadi violis tim orkestra TBJ (Taman Budaya Jambi) pada pertunjukan besar yang dihadiri oleh gubernur Jambi (Bapak Hasan Basri Agus) antara lain pada acara Jambi International Ethno Music Composer Forum, 3-4 Desember 2013, Pameran Lukisan se-Provinsi Jambi, April 2014, Pembukaan Pemilihan Putri Pariwisata se-Provinsi Jambi, April 2014, dan Malam Keagungan Melayu-4, tanggal 06 Januari 2015 (hari Ultah Provinsi Jambi). Jessica juga menyukai bidang fotografi dan pernah menyabet juara 1 Lomba Fotografi Water and Energy (Hari Air Sedunia) yang diadakan oleh Disbudpar Provinsi Jambi, Mei 2014. Dalam bidang bahasa, Jessica gemar belajar bahasa Jepang. Pernah menyabet juara 2 Lomba Kana Contest MGMP Bahasa Jepang se-Provinsi Jambi, 20 Agustus 2014 serta Juara 3 Lomba Rodoku MGMP Bahasa Jepang se-Provinsi Jambi, 20 Agustus 2014. Sedangkan dalam dunia tulis-menulis Jessica sempat meraih juara 2 Lomba menulis Apa Idemu yang diadakan oleh Koran Daerah Jambi Ekspres-April 2014, menjadi finalis lomba menulis cerpen Badan Bahasa se-Provinsi Jambi

(April 2014). Pada tanggal 16-21 Juni 2014, suatu pengalaman paling berkesan, Jessica terpilih menjadi finalis Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 tingkat SMA, Puslitbang Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud, di Best Western Hotel–Jakarta dengan mengangkat kearifan lokal Kabupaten Kerinci esai berjudul “Belajar dari Seloka Adat Kerinci sebagai Kearifan Lokal menuju Demokrasi Indonesia yang Beradab”.



**I Wayan Juniartawan**, lahir di Klungkung, 27 Juni 1996. Remaja kelahiran Bali yang kini tercatat sebagai salah satu siswa di SMA Negeri Bali Mandara, pernah menjabat sebagai ketua dalam organisasi Palang Merah Remaja (PMR) Wira Bhakti Mandara periode 2013/2014, sebagai dirigen dalam kelompok Paduan Suara Gema Nada Mandara, dan tergabung dalam Kelompok Siswa Pecinta Mata Pelajaran (KSPM) Bahasa Indonesia. Kecintaannya terhadap dunia sastra dan tulisan ditunjukkan dari berbagai prestasi yang pernah diraihinya semasa SMA, antara lain Juara I Lomba Mengarang Puisi Programa 2 RRI Singaraja Se-Kabupaten Buleleng Serangkaian Kegiatan Bulan Merah Putih Tahun 2013, Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA/MA/SMK Se-Bali Tahun 2013 Serangkaian Geosphere Competition IV yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial HMJ Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha, Juara I Lomba Karya Tulis Sejarah Tingkat SMA/MA/SMK se-Bali Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial HMJ Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha, Juara II Lomba Menulis Puisi “Tunjukkan Cintamu” Tingkat SMA Se-Indonesia Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Tirana House, Juara Harapan II Lomba Cipta dan Baca Puisi dalam Event Buleleng Festival, Juara I Lomba Menulis Puisi Tingkat SMA/SMK Se-Bali yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Juara III Lomba Menulis Cerpen Tingkat SMA/SMK Se-Bali yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, Juara I Lomba Esai Tingkat SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan oleh FKIP-BK Universitas Panji Sakti, Juara I Lomba Tulis Naskah Drama Nasional Tingkat Mahasiswa dan SMA oleh Laskar Sastra FKIP Universitas Halu

Oleo, dan Peraih Medali Emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2014 pada Bidang IPS dan Humaniora. Salah satu karyanya juga berhasil lolos sebagai 15 besar finalis Lomba Esai Sosial Budaya 2014 yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud.



**Rahmat Nur Hidayat**, lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan tepatnya pada 1 Januari 1998. Saat dia mengikuti lomba esai sosial budaya ini, dia duduk di bangku kelas X dan saat ini dia mengenyam pendidikannya di semester ke-4 di SMA Negeri 8 Bulukumba. Di sekolahnya, dia mengikuti Olimpiade Kimia, dan mulai mengikuti ekskul debat bahasa

Inggris. Ia juga aktif dalam organisasi KIR dan OSIS yang ada di sekolahnya. Rahmat menjadi Finalis Lomba Esai Sosial Budaya 2014 yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud dengan judul esai “Mengatasi Konflik Komunal Mahasiswa Makassar dengan *Tudang Sipulung*” dan menjadi Finalis terbaik dalam PIR regional Sulawesi Selatan dengan judul “Suara Ombak sebagai Alternatif untuk Mengatasi Stress”. Sekarang ia fokus untuk mengikuti olimpiade kimia dan ujian kompetensi (Kurikulum 2013) yang sebentar lagi dilaksanakan. Selain mengumpulkan piagam-piagam lomba, ia juga hobi mengoleksi piagam-piagam *workshop*. Menulis KTI menurutnya adalah “mengungkapkan pokok pikiran tanpa adanya tekanan”.



**Zihaul Abdi**, lahir di Padang pada Jumat, 26 Juni 1998. Sedang menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Padang. Kini ia duduk di kelas XI IIS. Minatnya pada bidang jurnalistik dan kepenulisan menghantarkannya menjadi Pemimpin Redaksi Majalah *EksisGua* SMPN 8 Padang (2012) dan Pemimpin Redaksi Majalah Media SMAN Sa (2014). Ia juga menjadi reporter tetap di rubrik

Singgalang Masuk Sekolah pada koran Harian Umum Singgalang. Kebiasaannya membaca koran sedari SD mempengaruhi ia untuk peka terhadap persoalan politik dalam negeri. Hingga pada 2013, ia

berkesempatan untuk merasakan menjadi politisi lewat kegiatan Parlemen Remaja. Selain itu ia juga pernah menjadi Delegasi Provinsi Sumatera Barat dalam Forum Pelajar Indonesia 5 (2013). Adapun prestasi yang pernah ia raih adalah Juara 1 Lomba Menulis Surat Cinta Untuk Ibu FKG UNAND (2012); Juara 3 Lomba Menulis Opini Siaga Bencana Padang Ekspres (2013); Juara 1 Lomba Menulis Artikel tentang Perpustakaan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat (2013); Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang IPS SMAPSiC 9+Jr6 (2014); Juara 2 Lomba Menulis Cerpen Pekan Jurnalistik VI Genta Andalas (2014); 30 Besar Finalis *Letter Writing Competition* PT Pos Indonesia (2014); Juara 3 Olimpiade Pasar Modal Provinsi (2014); Juara 2 Olimpiade Ekonomi SMAN 2 Painan (2014); Juara 3 Olimpiade Ekonomi SMAN 1 Gunung Talang (2014); Juara Harapan 2 Olimpiade Bahasa dan Sastra Indonesia UNP (2014); Juara 1 Cerdas Cermat Kepahlawanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (2014); Juara 1 Lomba Tangkas Terampil Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat (2014); Juara 3 Cerdas Cermat Sejarah IV UNAND (2014); dan Finalis Olimpiade Ilmu Sosial FISIP UI Ke-11 (2014). Selain itu, kecintaannya pada dunia sastra membuat sejumlah cerpen dan puisinya dimuat di koran lokal Haluan dan Singgalang. Esainya yang berjudul “Duduak Barapak, Nilai Dasar Demokrasi Khas Minangkabau yang Terlupakan” menjadikan ia sebagai Finalis Lomba Esai yang diadakan Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud RI (2014). Kini ia aktif menulis di blog pribadinya [abdizihaul.wordpress.com](http://abdizihaul.wordpress.com).



**Rifaldy Fajar**, seorang remaja muslim berdarah bugis-makassar lahir di Bulukumba, 20 April 1996. Pada saat mengikuti lomba esai ini, ia tercatat sebagai siswa kelas XII IPA 1 di SMA Negeri 1 Bulukumba. Remaja yang hobi travelling dan memiliki mimpi untuk menjelajah Indonesia dan dunia ini pernah aktif dalam CECSB (Creative English Club SMANSA BEKA), Anggota PASKIBRA SMAN 1 Bulukumba Periode 2011/2012, Wakil Sekretaris OSIS I Periode 2012/2013, Sekretaris KIR Periode 2012/2013 dan seorang volunteer dalam RuBaH (Rumah Baca Harapan) di Ujungloe,

Bulukumba. Semasa SMA, remaja berkacamata ini pernah meraih beberapa prestasi dan penghargaan antara lain sebagai Peserta Terbaik Putra Pesantren Ramadhan SMA Negeri 1 Bulukumba 2011, TIM Terbaik 1 dalm PIR Nasional Kota Bontang, Kalimantan Timur Bidang IPSK 2012 yang diadakan oleh LIPI, Juara 2 Lomba Puisi Bahasa Inggris pada English Camp Kab. Bulukumba 2012 oleh BEMC, Juara 3 Olimpiade Fisika (OSN) Tk. Kab. Bulukumba 2013, Juara Harapan 1 Olimpiade Fisika Tk. Provinsi UIN Alauddin Makassar 2013, Juara Harapan 2 Cerdas Cermat Fisika Tk. Provinsi UIN Alauddin Makassar 2013, Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Se-Indonesia Timur Momentum di UNISMUH Makassar 2013, Juara 3 LKTI Tk. Provinsi Gebyar Civitas Fisika di UNM Makassar 2013, Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah Litbang Daerah Tk. Kab. Bulukumba 2013, Juara 1 LKTI 8 Research Competition di SMA Negeri 8 Jakarta Bidang IPSK 2013, Juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara serta Narkotika Tk. Kab. 2013 oleh KESBANGPOL, Finalis LKTI Balitbangda Tingkat Provinsi 2013, Peraih Silver Award Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR Ke-45) oleh LIPI Bidang Kependudukan 2014, serta beberapa prestasi lainnya. Putra Pasangan dari Fadjar. S dan Elfiany. S ini memiliki jargon atau moto hidup "*Man Jadda Wa Jada*".



**Citra Anggia Fathia**, panggil saja ia Bunga (nama samaran). Lahir prematur pada tanggal 12 Juli 1997 di kota Jakarta. Cita-citanya adalah menjadi diplomat yang memiliki bisnis di bidang sandang, pangan, papan, dan hiburan. Saat ini terdaftar sebagai siswi SMA Negeri 5 Bekasi kelas XII jurusan IPS angkatan ke-26. Di waktu senggangnya, ia adalah

seorang penyanyi papan atas yang sering menggelar konser tunggal di kamar mandi. Selain itu, ia juga menekuni kegiatan melukis dan menggambar dengan objek favoritnya adalah bidang-bidang geometris berperspektif. Siswi yang aktif dalam ekstrakurikuler English Club ini pernah menjadi MC di acara English Contest, salah satu acara besar tahunan perlombaan berbahasa Inggris di sekolahnya. Dulu ia lebih sering berekspresi secara lisan daripada tulisan, itulah mengapa

perempuan cerewet berdarah sunda ini juga sering mengikuti perlombaan sejenis 'Story Telling', 'Speech' dan membaca puisi sejak SD. Beberapa di antaranya meraih juara sampai tingkat kota. Ia juga pernah mengikuti perlombaan debat 'ASEAN Meeting Simulation' dalam bidang ekonomi di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Padahal sewaktu kecil, ia lebih dulu tertarik pada dunia utak-atik kata dalam tulis-menulis, banyak cerpen dan puisi yang telah ia buat namun hanya menjadi koleksi pribadi karena ia enggan mempublikasikannya. Kini, ia sering berceletoh dalam tulisan-tulisan bebas dan singkat selayaknya remaja 'alay' seusianya di akun Twitter-nya: @cigitha. Namun, baginya Lomba Esai 2014 adalah pengalaman pertamanya dalam mengemukakan pendapatnya melalui esai. Sehingga, mendapatkan juara ketiga merupakan hal yang tidak ia sangka-sangka.



**Hendra Sugianto**, remaja yang berasal dari timur Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Berau ini lahir di Samarinda, 13 April 1997. Saat ini ia duduk di kelas XII, SMA Negeri 4 Berau. Remaja yang akrab dipanggil Hendra ini memiliki hobi olahraga, membaca, menulis, dan menonton. Ia juga tercatat pernah tergabung dalam organisasi sekolah seperti Karya Tulis Ilmiah (KIR), Paduan Suara, dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Saat ini, ia telah mengukir beberapa prestasi antara lain, Juara Favorit Lomba Menulis Artikel Internet Cerdas Nasional tahun 2012, Top Tiga Puluh Tim Terbaik Lomba Veterinary Olympiad (Venol) Online Nasional tahun 2012, Juara Empat Lomba Karya Tulis Ilmiah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014, Juara Tiga Lomba Mading Tiga Dimensi Hari Ulang Tahun Berau Post se-Kabupaten tahun 2014, Juara Tiga Lomba Paduan Suara Hari Ulang Tahun Kabupaten Berau tahun 2014, dan menjadi Finalis Lomba Menulis Esai Sosial Budaya Nasional tahun 2014 yang diselenggarakan Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud RI dengan judul esai "Jangan Salahkan Pemuda Indonesia". Ketertarikan penulis dalam menulis sudah tertanam sejak ia duduk

di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga sekarang. Beberapa karya tulisan yang pernah ia ciptakan yaitu berupa puisi, cerpen, artikel, karya tulis ilmiah, dan esai.



**Cicilia Yeo**, lahir di Tanjungpinang, 12 desember 1998, saat ini bersekolah di SMA Djuwita Tanjungpinang kelas XI. Pada saat kelas X, saya mengikuti lomba menulis esai sosial budaya nasional 2014, dengan esai yang berjudul “Etnis: Faktor Penentu Reputasi dan Perbedaan Hak Demokrasi di Indonesia” dan meraih juara harapan dua. Ini adalah lomba menulis esai yang ke pertama kali saya pernah ikut serta dan saya sangat senang esai yang saya tulis ini bisa mendapatkan juara harapan dua dan menjadi salah satu naskah esai yang akan diterbitkan.



**Ani Triana**, terlahir dari keluarga sederhana yang lahir pada tanggal 28 Maret 1998 di desa kecil Sowon Kidul, Jepara. Siswi yang dari kecil belajar di YPI. Safinatul Huda ini, saat ini sedang duduk di kelas XI IPA MA. Safinatul Huda, Jepara. Prestasi yang pernah diraih adalah juara satu olimpiade “Maper Sains” Siswa Ma’rif, Jepara. Kegemarannya adalah menggambar, menulis karya sastra, dan karya ilmiah. Menulis esai merupakan pengalaman dan pengetahuan yang baru untuknya. Esai perdananya itu telah mengantarkannya menjadi Finalis Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 yang diadakan oleh Puslitbang Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud RI. Lomba ini telah memberi banyak pelajaran dan manfaat yang berharga baginya.



**M. Arief Wicaksono**, lahir di Malang pada tanggal 2 Februari 1996. Memulai ketertarikannya di bidang tulis-menulis sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga ia mendapat beasiswa dari Putera Sampoerna Foundation di SMAN 10 Malang (Sampoerna Academy). Saat ini ia menempuh

pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saat SMP dan SMA, ia sempat memimpin ekstrakurikuler jurnalistik dan menjadi redaktur serta menjadi pimpinan redaksi media sekolah. Selain itu ia juga menjadi bagian dari tim *marketing communication*. Berbagai kompetisi kejuaraan menulis telah diikutinya, baik tingkat regional maupun nasional. Pernah meraih Juara 1 tingkat Jawa Timur lomba menulis esai dalam Parade Cinta Tanah Air yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, memperoleh medali perak dalam lomba menulis esai pada Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan Juara harapan 3 pada menulis esai di Puslitang Kebudayaan ini.



**Denise Weldy Hellen Sahulata**, lahir di Ambon pada tanggal 17 Juni 1997. Saat ini duduk di kelas XII SMA Kristen Kalam Kudus Ambon. Prestasi yang pernah diraih antara lain Delegasi Konferensi Anak, Majalah Bobo, Jakarta 2008; Finalis Olimpiade Sains Nasional (IPA) SD, Makassar 2008; Duta Sanitasi Provinsi Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 2010; Juara 3 (Medali Perak) Olimpiade Sains Biologi SMP (*Science Days*), Universitas Pattimura, Ambon 2011; Finalis Olimpiade Sains Nasional (Biologi) SMA, Bandung 2013; Juara 1 (Medali Emas) Olimpiade Sains Biologi SMA (*Science Days*), Universitas Pattimura, Ambon 2014; Aktif menulis cerpen dan artikel, pernah tergabung sebagai kontributor dalam ‘Suara Anak Maluku’, koran lokal Maluku hingga akhir 2010. Esainya yang berjudul “Restorasi Budaya Demokrasi Bangsa Melalui Pembentukan Karakter Kaum Muda” merupakan Finalis Lomba Esai Sosial Budaya 2013 yang diadakan oleh Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud RI.



**Putri Demes Dharmesty** atau yg lebih dikenal dengan panggilan Demes saat ini masih duduk di bangku kelas XII SMA Santa Maria Surabaya. Lahir di Surabaya, 23 Desember 1996. Sangat tertarik dan telah menggeluti bidang tulis menulis dan jurnalistik sejak SMP. Terutama di SMA ini, Demes aktif dalam keanggotaan redaksi majalah sekolah, *Krisan*, peraih rekor muri

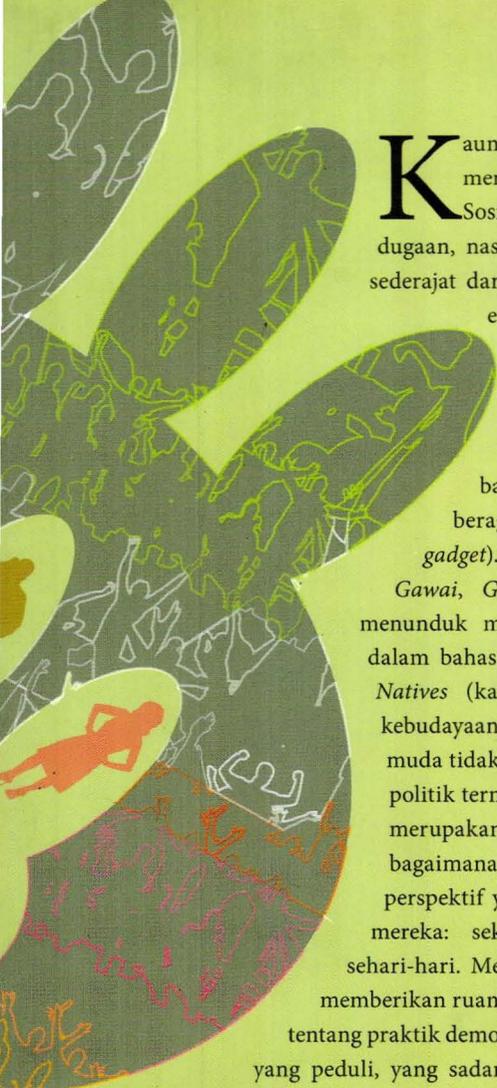
Majalah Sekolah Peraih Prestasi Terbanyak. Dalam redaksi, ia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi periode tahun 2013-2014. Prestasi yg pernah diraih selain Juara Harapan 1 Lomba Menulis Esai Sosial Budaya Nasional 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah, Juara 1 Lomba Menulis Esai tingkat Nasional oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tahun 2014, Juara 3 lomba menulis esai TIK oleh UPT-Tekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Juara 1 *Journalist Competition* oleh Jawa Pos tahun 2013. Selain menulis, ia juga aktif dalam tim debat Sanmar—sebutan SMA Santa Maria dan pernah menjuarai lomba debat politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya.



**Baiq Nabila Muftia Utami**, biasa dipanggil Nabila, lahir di Praya (Lombok Tengah), 29 Maret 1998, merupakan siswa SMAN 1 Praya, Lombok Tengah, NTB. Saat ini Nabila memperoleh kesempatan pertukaran pelajar selama satu tahun di GlenOak High School, Ohio, Amerika Serikat. Kegiatannya selama ini menjadi Sekretaris II OSIS SMAN 1 Praya, pemegang sabuk

hijau Taekwondo, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, antara lain English Club dan LKIR (SMAN 1 Praya), Key Club, Speech and Debate Club, Ohio Model United States Club, World Language Club (GlenOak HS, Ohio). Sejak SD tertarik dengan Olimpiade dan sempat mengikuti Olimpiade Matematika hingga tingkat Provinsi. Namun, sejak SMP mulai tertarik dengan bidang sastra dan seni lalu dibawa terus hingga masa SMA. Gemar bermain musik terutama bermain gitar dan piano. Namun, tak kalah gemar mencoba berbagai penelitian sederhana. Penulis favoritnya adalah Andrea Hirata, Leo Tolstoy dan

John Green. Saat ini tinggal di kota Canton di negara bagian Ohio. Prestasi yang pernah diraih, antara lain: Pemenang Favorit LMCR Lip Ice-Selsun Golden Award 2009; Pemenang 1 Lomba Cerita Pendek G3A (AKINO, ADONO ABSANO) Tk. Provinsi NTB; Finalis Astra Honda Motor *Best Student* 2013; Latihan Dasar Kepemimpinan Osis Nasional 2013; Juara 5 kategori *Duo Interpretation Speech and Debate Tournament Carrollton*, Ohio; Peserta Ohio Model United Nation (simulasi PBB) di Columbus, Ohio dan berperan menjadi delegasi negara Thailand; Peserta *Civic Education Week di Washington DC*; Finalis Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014 yang diselenggarakan Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud; dan menjadi Siswi pertukaran pelajar Kennedy-Lugar *Youth Exchange and Study Programme* ke Amerika tahun 2014-2015



**K**aum Muda dan Budaya Demokrasi merupakan tema dalam Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2014. Di luar dugaan, naskah yang dikirim oleh siswa SMA/ sederajat dari seluruh Indonesia mencapai 1.000 esai. Antusiasme yang besar, disokong oleh gagasan yang kontekstual, dalam, dan beragam, seolah sedang melakukan bantahan terhadap anggapan sementara orang, bahwa kaum muda hanya sibuk dengan beragam perangkat elektronik (gawai/ gadget). Mereka disebut sebagai *Generasi Gawai*, *Generasi Menunduk* (karena sering menunduk memainkan perangkat digital), atau dalam bahasa pengamat dinamai sebagai *Digital Natives* (karena lahir sebagai anak kandung kebudayaan digital). Anggapan bahwa kaum muda tidak tahu apa-apa tentang demokrasi dan politik ternyata keliru. Dari 15 esai terbaik yang merupakan finalis lomba ini kita bisa membaca bagaimana politik dan demokrasi ditilik dari perspektif yang sangat dekat dengan kehidupan mereka: sekolah, keluarga, dan pengalaman sehari-hari. Melalui tema ini, setidaknya kita telah memberikan ruang kepada kaum muda untuk bersuara tentang praktik demokrasi di negeri ini. Sebab, kaum muda yang peduli, yang sadar akan tanggung jawab politik yang diembannya, merupakan soko guru bagi masa depan demokrasi Indonesia.



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ISBN : 978-602-72093-1-2



9 786027 209312

Perpustakaan  
Jenderal